



ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund

LAPORAN TRIWULAN 3

2018

Periode JULY-SEPTEMBER

INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND
2018

Daftar Isi



Pengantar **__2**

Rencana Kerja ICCTF Tahun 2018 **__3**

Fokus Area 1: Mitigasi Berbasis Lahan **__4**

Fokus Area 2: Adaptasi & Ketangguhan **__22**

Fokus Area 3: Energi **__26**

Summary Laporan Verifikasi Perhitungan
Penurunan Emisi Karbon Program ICCTF
2010-2018 **__28**

Progress Program UKCCU *Batch 2* Tahun
2018 **__29**

Progress Scale-up Program & Batch 3
Program USAID Tahun 2018 **__32**

Progress Program DANIDA pendanaan Baru
Tahun 2018 **__40**

Komunikasi & Penjangkauan **__42**

Networking **__50**

Pengembangan Proposal *Fundraising* **__59**

Kelembagaan **__61**

Monev Tools **__62**

Laporan Keuangan **__63**

Lampiran: Liputan Media **__64**

Pengantar

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dibentuk pada tahun 2009 sebagai satu-satunya lembaga dana perwalian untuk penanganan perubahan iklim. Dengan tujuan mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional, ICCTF memobilisasi sumber dana baik sumber daya domestik maupun internasional untuk aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Berbagai aksi tersebut sejalan dengan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API). Program dan kegiatan ICCTF terbagi ke dalam 4 (empat) fokus area meliputi mitigasi berbasis lahan, mitigasi berbasis kelautan, energi, serta adaptasi dan ketangguhan.

Sebagaimana tercantum dalam *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC), Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Melalui pelaksanaan berbagai proyek pada tahun 2010 hingga 2018, ICCTF sendiri telah berkontribusi sebesar lebih dari 9 juta ton CO₂eq. Upaya ini dilakukan dengan dukungan pendanaan baik dari Pemerintah Indonesia maupun dukungan internasional meliputi United States Agency for International Development (USAID), United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU) dan Danish International Development Agency (DANIDA).

Quarterly Progress Report ini merangkum aktivitas dan capaian ICCTF selama kuartal ketiga pada tahun 2018. Salah satu momen penting pada periode ini adalah pelaksanaan ICCTF Day pada 31 Juli 2018 di Bappenas. Pada event ini, ICCTF mensosialisasikan capaian pelaksanaan program-programnya kepada berbagai pihak baik pemerintah pusat, lembaga donor dan mitra pembangunan lainnya. Selain melalui ICCTF Day, sosialisasi capaian ICCTF juga dilaksanakan melalui ekspose program di Kalimantan Tengah pada 7-8 September 2018. Pada kuartal ini, ICCTF juga berpartisipasi dalam berbagai acara atau kegiatan penting diantaranya Low Carbon Development Indonesia (LCDI), Blue Carbon Summit 2018 dan 7th UCLG ASPAC Congress.

TUJUAN ICCTF

Mendukung Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui ekonomi rendah karbon dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim.



Rencana Kerja ICCTF Tahun 2018

Rencana Kerja ICCTF Tahun 2018 telah disetujui dalam Pertemuan Majelis Wali Amanat ICCTF pada tanggal 22 Maret 2018 di Bappenas. Dalam Rencana Kerja *Quarter 3* (Q3) 2018, beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain: Seminar Hasil *Project Closing* USAID dan UKCCU, *New Proposals for Fundraising* (GEF-COREMAP, BMUB-Bimindo, dll), *New ICCTF Preparation*, ICCTF Day, Monev & Pemeriksaan BMN, *Arrangement New Office* ICCTF, dan Audit Eksternal.

Untuk Rencana Kerja Q4 2018, ICCTF akan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: UNFCCC COP-24 & *Low Carbon Development Initiative* (LCDI) di Bali, *ICCTF Annual Report 2018*, *ICCTF Annual Work Plan 2019*, *New Project Implementation* (COREMAP, dll), *Staff Hiring for 2019*, *2nd Annual MWA Meeting*, *ICCTF Massive Promotion Bali – IMF/WB Annual Meeting* serta Monev & Pemeriksaan BMN.

KUARTAL 1

JANUARI - MARET

- *Project Closing* USAID Batch 1
- *Additional Funding* DANIDA & UKCCU
- *Emission & Carbon accounting*
- *Amendment of ICCTF Bylaws*
- *Technical Guidelines* (SOP) ICCTF
- *ICCTF Social Media Optimization*
- *1st Annual MWA Meeting*
- *Monev & Pemeriksaan BMN*

KUARTAL 3

JULI - SEPTEMBER

- Seminar Hasil *Project Closing* USAID dan UKCCU
- *New Proposals for Fundraising* (GEF-COREMAP, BMUB-Bimindo, NAMA *Facility-Green Chiller*, etc.)
- *New ICCTF Preparation*
- *ICCTF Day*
- *Monev & Pemeriksaan BMN*
- *Arrangement New Office* ICCTF
- *Audit Eksternal*
- *Expose tingkat Provinsi*
- *Analisa dan FGD Grand Design* Komunikasi
- *Pembuatan Dokumenter dan kerja sama TV*
- *Pembenahan website* ICCTF
- *Kampanye publik* ICCTF *Greeninitiative*

KUARTAL 2

APRIL - JUNI

- *Project Closing* UKCCU (11 *proponent*)
- *Project Closing* USAID (16 *proponent*)
- *Call for Institution* USAID & UKCCU
- *Induction Workshop*
- *Validation of Emission & Carbon Accounting*
- *Media Visit* USAID & UKCCU
- *BIMINDO Workshop*
- *Capacity Building Staff* ICCTF
- *Monev & Pemeriksaan BMN*
- *Ekspose Tingkat Provinsi*

KUARTAL 4

OKTOBER - DESEMBER

- UNFCCC COP-24 & *Low Carbon Development Initiative* (LCDI) in Bali
- *ICCTF Annual Report 2018*
- *ICCTF Annual Work Plan 2019*
- *New Project Implementation* (COREMAP, etc.)
- *Staff Hiring for 2019*
- *2nd Annual MWA Meeting*
- *ICCTF Promotion Bali – IMF/WB Annual Meeting*
- *Monev & Pemeriksaan BMN*
- *Finalisasi Grand Design* Komunikasi
- *Media Engagement*



Fokus Area 1

MITIGASI BERBASIS LAHAN

Fokus area ini bertujuan untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui dukungan pendanaan terhadap program-program reforestasi/rehabilitasi lahan-lahan terdegradasi, pemulihan lahan terdegradasi menjadi hutan masyarakat, energi-biomassa dan agroforestry, rendah karbon dan manajemen produktif lahan gambut terdegradasi, dan pengelolaan kawasan konservasi lestari.

Pada tahun 2016 -2018, ICCTF telah mendanai total sebanyak 31 proyek mitigasi berbasis Lahan yang terdiri atas 20 proyek ICCTF-USAID dan 11 Proyek ICCTF-UKCCU. Pada Quartal-4 (Q4) 2017 yang lalu terdapat 1 proyek Mitigasi Berbasis Lahan ICCTF-USAID yang telah selesai yaitu SESAMI. Sedangkan pada (Q1) 2018 terdapat total 12 proyek yang telah selesai, yaitu 8 proyek ICCTF-USAID (STIK, Yayorin, Javlec, UMP, Walestra, YPAM, LOH, dan Yayasan Tessonilo) dan 4 proyek ICCTF-UKCCU (YMI, Walhi Sumsel, KRG Jambi, dan BNF). Sedangkan sisanya total 18 proyek Mitigasi Berbasis Lahan telah berakhir pada Q2 dan Q3 Tahun 2018 ini. Selama Q3 2018, ICCTF telah melaksanakan kegiatan *financial spot check* dan *program monitoring* serta pemeriksaan BMN keberapa lokasi proyek untuk memastikan pelaksanaan proyek Mitigasi Berbasis Lahan sesuai dengan rencana kerja dan mekanisme pengelolaan proyek yang ditetapkan oleh ICCTF baik UKCCU dan USAID sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Capaian Monitoring Program, Keuangan dan Pengecekan BMN UKCCU - Q3

Tanggal	Proponen	Lokasi	Hasil
28-29 Juli 2018	Konsorsium Gaia-dB, CFES, dan LMDH Puncak Lestari	Puncak, Bogor	Pemeriksaan BMN (<i>On the track</i>)
31 Jul-2 Agus 2018	WALHI Sumsel	Sumatera Selatan	Pemeriksaan BMN (<i>On the track</i>)
1-3 Agustus 2018	IFGI	Kabupaten Lebak, Banten	Pemeriksaan BMN (<i>On the track</i>)
3-5 Agustus 2018	Konsorsium Indonesian Forest Watch Indonesia, Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W-LPPM IPB)	Bogor	Pemeriksaan BMN (<i>On the track</i>)
3-5 Agustus 2018	KRG Jambi	Jambi	Pemeriksaan BMN (<i>On the track</i>)
10-12 Agustus 2018	HAKI	Palembang, Sumatera Selatan	Pemeriksaan BMN (<i>On the track</i>)
22-24 Agustus 2018	Perkumpulan Pancur Kasih (PPK)	Pontianak, Kalimantan Barat	Pengecekan BMN (BMN sesuai)
23-25 Agustus 2018	Universitas Jember	Jember, Jawa Timur	Pengecekan BMN (BMN sesuai)

23-25 Agustus 2018	Borneo Nature Foundation (BNF)	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Pengecekan BMN (BMN sesuai)
6-9 September 2018	Fahatan Univ. Tanjungpura	Pontianak, Kalimantan Barat	Kick-off meeting (On the track)
11-13 September 2018	Konsorsium Elang, YMI dan Konsorsium RWWG	Siak, Riau	Kick-off meeting (On the track)
12-14 September 2018	Fakultas Kehutanan UGM	Blora dan Yogyakarta	Pengecekan BMN (BMN sesuai)
14-16 September 2018	Yayasan Palung	Kayong Utara, Kalimantan Barat	Pengecekan BMN (BMN sesuai)
16-19 September 2018	Yakkum Emergency Unit (YEU), SESAMI, ENERBI, dan Javlec	Magelang dan Yogyakarta	Monitoring Program dan Spotcek Keuangan (On the track)
28-30 September 2018	Puslit Karet	Sumatera Selatan	Pengecekan BMN (BMN sesuai)

Capaian kegiatan pada fokus area Mitigasi Berbasis Lahan UKCCU

Kunjungan ke WALHI Sumsel

Perjalanan dari Palembang menuju Desa Nusantara, Air Sugihan, OKI, Sumsel menggunakan kapal mesin 40 PK selama sekitar 3 jam lamanya menyusuri sungai Musi arah ke muara lalu masuk ke anak sungai menuju Sungai Air Sugihan dan masuk di Kanal Jalur 19 Padang Alang untuk menuju kanal nusantara. Lokasi Desa Nusantara berada pada titik koordinat – 2.556213, 105.281757.

Kegiatan Walhi Sumsel sudah berakhir pada tanggal 31 Maret 2018. Untuk itu, Bappenas dan ICCTF akan melakukan pemeriksaan dan penelitian atas semua BMN yang sudah dibeli oleh Walhi Sumsel dan diserahkan ke kelompok masyarakat di Desa Nusantara, Air Sugihan, OKI, Sumsel.

Dalam diskusi bersama kelompok masyarakat yang diwakili oleh Pak Sukirman disampaikan bahwa program Walhi Sumsel di Desa Nusantara berhasil dan dapat diterima masyarakat, serta dapat menambah pendapatan masyarakat desa disana. Hal ini dikarenakan bantuan tersebut langsung diterima oleh masyarakat tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit.

Setelah berdiskusi, kemudian dilanjutkan pengecekan BMN yang berada di Desa Nusantara dimulai dari Pengecekan Sekat Kanal dengan sistem buka tutup yang berfungsi juga sebagai jalur *transport* warga ke sawah dan kebunnya.

- Kondisi sekat kanal 1 saat ini kering dan banyak ditumbuhi tanaman purun, hal ini karena sedang musim kemarau sehingga akan dilakukan

normalisasi kanal terlebih dahulu oleh pemerintah daerah dalam waktu dekat. Setelah itu baru sekat kanal akan ditutup kembali.

- Kondisi sekat kanal 2 sudah lebih baik karena kanalnya sudah dinormalisasi, namun saat dilakukan pengecekan salah satu pintu air dari 3 pintu air dibuka, hal ini dikarenakan malam sebelumnya terjadi banjir besar dibagian hulu sehingga menggenangi tanaman jagung dan cabe masyarakat disana sehingga ketinggian air dikurangi terlebih dahulu.

Disamping sekat kanal Desa Nusantara terdapat demplot tanaman padi di hamparan seluas sekitar 1.200 ha, dimana saat pengecekan BMN tanaman padi sudah panen 1x dan saat ini dalam tahap pembenihan untuk penanaman ke-2. Bibit padi yang ditanam antara lain Inpari 32, Bromo, dan Sanapi.

Pengecekan berikutnya ke bibit Kopi Liberika, Desa Nusantara mendapatkan bibit kopi sejumlah 1.000 bibit. Dari sejumlah bibit tersebut sebagian besar sudah ditanam di lokasi kebun di tengah hamparan gambut, namun ada sebagian kecil yang belum ditanam karena saat masyarakat memperoleh bibitnya masih kecil sehingga dipelihara lebih dahulu di pekarangan rumah. Nanti setelah ketinggian mencapai sekitar 50 cm baru akan ditanam.

Pengecekan BMN semua dalam kondisi ada dan baik, yaitu:

- *Hand Tractor*

- Tanaman Nanas
- Tanaman Jagung Manis
- Pompa *Portable*
- Selang Spiral
- Selang Besar

Pengecekan BMN bibit tanaman sayuran dimana sudah dilakukan pemanenan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari yaitu:

- Tanaman Bayam
- Tanaman Kangkung
- Tanaman Cabe
- Tanaman Kacang Panjang
- Tanaman Tomat
- Tanaman Timun
- Tanaman Pakcoy
- Tanaman Oyong
- Tanaman Caisin

Diskusi lanjutan bersama Kelompok Masyarakat, dimana Masyarakat di desa ini sangat peduli terhadap pengelolaan lahan gambut dan pencegahan kebakaran

hutan. Desa Nusantara menjadi Desa yang proaktif terhadap pencegahan alih fungsi dan pembukaan lahan gambut. Belum banyak dampak ekonomi yang dapat dirasakan karena *agroforestry* baru akan menghasilkan dalam jangka waktu 5-10 tahun mendatang sehingga baru benar-benar terasa dampak ekonominya.

Dampak yang langsung terasa di masyarakat saat ini adalah:

- Adanya *hand tractor* maka dapat mempercepat proses penanaman tanaman padi sehingga diharapkan yang semula setahun panen 1x menjadi setahun panen 3x.
- Permintaan beras gambut akan semakin meningkat sehingga dapat mengembalikan kejayaan Desa Nusantara sebagai salah satu lumbung beras di Sumatera Selatan dengan berbagai varian.
- Keberlanjutan program yang sudah diinisiasi oleh ICCTF ini oleh INAGRI anggota konsorsium Walhi Sumsel adalah pendampingan secara terus menerus sampai masyarakat terbantu.



Kondisi Sekat Kanal yang belum dinormalisasi.



Hand Traktor di Desa Nusantara.



Bibit Tanaman Kopi Liberika yang siap ditanam.



Kondisi Sekat Kanal yang sudah dinormalisasi.

Kunjungan Ke Lokasi KRG Jambi

Kegiatan kunjungan lapangan dilakukan ke 3 Desa untuk memeriksa kondisi BMN hasil proyek ICCTF-KRG Jambi. Pengecekan barang dilakukan secara keseluruhan yang berada di Kelompok Tani dan juga Sekat Kanal yang ada di lapangan untuk mengetahui kondisi dan pemanfaatannya. Barang-barang yang ada di kelompok tani hampir semuanya telah digunakan namun terdapat pula barang yang tidak ada di gudang barang.

Barang-barang yang belum digunakan adalah selang, pompa air dan alat-alat pendukung lainnya untuk pemadaman api. Barang tersebut belum dipakai karena hingga saat pengecekan belum pernah terjadi kebakaran gambut di lokasi tersebut.

Sekat kanal di lokasi sudah terbangun semua dengan kondisi dan bahan material yang digunakan sangat baik. Sekat kanal juga sudah dilakukan pemasangan papan nama untuk setiap titiknya.



Foto Sekat Kanal Proyek KRG Jambi.

Untuk pembelian bibit tanaman, diperuntukan bagi edukasi kelompok sekitar untuk pemanfaatan lahan gambut dalam bercocok tanam. Telah terbukti beberapa kali dilakukan panen dan hasilnya dirasakan langsung oleh kelompok tani. Beberapa tanaman sudah dalam kondisi mati karena telah dipanen. Kendala penanaman adalah adanya babi liar yang dapat merusak kebun sekolah lapang. Sekolah lapang ini dibangun di setiap desa.



Demplot Kebun Sekolah Lapang Proyek KRG Jambi.



MPA Proyek KRG Jambi.

Kunjungan ke Lokasi HAKI

Kunjungan lapangan dilakukan ke Desa Menang Raya, Kecamatan Pangkalan Lampam, Palembang penerima hibah BMN yaitu Kelompok Masyarakat Gambut Peduli Kebakaran menerima 22 jenis barang hibah BMN. Adapun Hasil penelitian fisik antara lain: Bibit tanaman jelutung, nanas, kopi dan meranti. Semua tanaman telah ditanam oleh para anggota KMGPK di demplot

Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan di Desa Perigi, Kecamatan Pangkalan Lampam Palembang. Penerima barang hibah BMN yaitu Kelompok masyarakat gambut peduli kebakaran menerima 22 jenis barang hibah BMN. Kondisi barang tidak jauh berbeda dengan barang yang berada di kelompok desa Menang Raya, adapun barang-barang yang berada disana antara lain: Pos

Panta, Genset, Demplot Agroforest, Bloking Kanal, Mesin Pompa, Sumur Bor, HT, Plang nama lokasi Demplot dan Plang nama lokasi sumur bor.

Kesimpulan tim pemeriksa BMN adalah:

- Terdapat beberapa bibit yang tidak masuk dalam *list* BMN,
- Tim peneliti hanya melakukan cek fisik ke beberapa lokasi dikarenakan keterbatasan waktu dan jarak tempuh yang jauh.
- Kekurangan dokumen pendukung akan disampaikan setelah penelitian selesai dilakukan.
- Plang untuk sumur bor belum terpasang, masih tahap *finishing*.



Pengecekan Bibit Nanas.



Pengecekan Selang, Nozel dan pompa.



Pengecekan Sumur Bor.



Pengecekan Pos Jaga.

Kunjungan ke Lokasi Pancur Kasih

Kunjungan lapangan dilakukan ke Desa Sungai Enau, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak. Fisik barang hibah BMN yang berlokasi di Desa ini adalah 11 barang antara lain: bibit karet, coklat dan petai. Terdapat barang yang tidak ada dilokasi karena digunakan untuk *event* adalah mesin pompa.

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kepada penerima barang hibah BMN yaitu Kel. Tani Tuah Raya yang menerima 10 jenis barang hibah BMN. Kondisi barang tidak jauh berbeda dengan barang yang berada di kelompok tani Daya, adapun barang-barang yang

berada disana antara lain: Bibit Kopi liberica, Karet, Petai, Mesin Pompa Pemadam, Selang Pemadam, Nozel Pemadam, Adaptor Pemadam, Selang Spiral, Plang nama Kelompok, dan Plang EWS.

Hasil pemeriksaan tim menyimpulkan bahwa: Tim peneliti hanya melakukan cek fisik ke Kelompok Tani Tuah raya dan Kelompok Tani daya dikarenakan keterbatasan waktu dan jarak tempuh yang jauh dan ada beberapa tanaman kopi, coklat dan petai yang belum di tanam karena musim kemarau.



Pengecekan Plang nama Kelompok Tani Tuah Raya.



Pengecekan Mesin Pompa Honda, Selang Pemadam, Nozzel, Adaptor pemadam, Selang Spiral.



Pengecekan bibit Coklat di Kel. Tani Daya.



Diskusi dengan kelompok Tani Tuah Raya dan Tani Daya di Desa Sungai Enau.

Kunjungan ke Lokasi Borneo Nature Foundation (BNF)

Perjalanan Menuju Dermaga Kereng Bingkarai untuk melakukan pengecekan aset fisik yang terdapat di sekitaran taman nasional sebangau berupa Bendungan, HOB0 *Water Level* (100ft) Titanium, HOB0 are PRO v.3 x for PC & Mac, *Waterproof Shuttle*, dan *Water level Logger Carrying Case*. Namun, aset yang dapat dilihat hanya Bendungan & *waterproof Shuttle*, dikarenakan jauh dan sulitnya untuk dijangkau saat musim kemarau.

Pengecekan dilanjutkan ke lokasi Pos Tim Patroli Sebangau untuk melihat aset lainnya yaitu Sepatu *Safety*, *Drone*, Alat Pengukur *Water Flow*, HT, *Radio Rig*, Antena Diamond, *Power Supply*, Konektor, Kabel Antena, Mesin Pompa *portable*, Selang Spiral, Baju PDH, dan GPS. Seluruh aset yang tercatat pada Tim Patroli Sebangau ditemukan dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik.

Pengecekan selanjutnya dilakukan ke posko MPA Kereng Bingkarai untuk melihat aset sebagai berikut: Baju PDH, Celana PDH, Helm, Kaos Oblong Lapangan,

Celana Lapangan, Kacamata, Sepatu Lapangan, Topi, Mesin Pompa, Selang kain, Selang Spiral, Nozzle, Kopleng, Klip & Saringan, Plang nama MPA, Sarung Tangan, Jas Hujan, Senter Kepala, Sepatu Boot Lapangan, Masker, Botol Minum, Cangkul, Parang, Sekop, Kapak, Kotak P3K, Keyyok, Garuk Cangkul, HT, *Radio Rig*, Antena Diamond, *Power Supply*, Konektor, Kabel Antena, Mesin Pompa *portable*, Selang Spiral 1,5 inch dan GPS. Pengecekan BMN pada penerima manfaat MPA Kereng Bingkarai ditemukan kekurangan antara lain perlengkapan *Radio Rig*, dan GPS hal ini dikarenakan Posko MPA baru saja pindah dikarenakan pergantian ketua MPA yang bersifat tahunan dan seluruh perlengkapan radio masih berada di posko yang lama. Adapun kerusakan pada aset di MPA Kereng Bingkarai adalah selang kain yang sudah mulai robek. Pemeriksaan aset yang terakhir dilakukan di MPA Sabaru untuk memeriksa aset yang sama seperti di MPA Kereng Bingkarai dimana Seluruh aset ditemukan dalam kondisi lengkap dan baik.



Perjalanan Menuju Lokasi Bendungan.



Foto Bersama dengan MPA Kereng Bingkarai.



Flowatch FL-03 Tim Patroli Sebangau.



BMN Botol Minum, Senter, Sarung Tangan Kaos Oblong MPA Kereng Bingkarai.

Kunjungan Lapangan ke Konsorsium Elang, YMI dan Konsorsium RWWG

Dalam membangun Kordinasi dan sinergisitas dengan pemangku para kepentingan maka Konsorsium Elang, Konsorsium Yayasan Mitra Insani, dan Konsorsium RWWG melakukan kegiatan *Kick-off* dan Ekspose Bersama Program Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk Mengurangi Emisi di Indonesia Melalui Kegiatan Lokal (Tegak) di Kab. Siak, Riau pada tanggal 12 September 2018.

Dalam acara ini disampaikan Sambutan dari Deputi III BRG (Myrna Safitri), Sambutan dan Pembukaan Acara oleh Bupati Siak (Drs. H. Samsuar M.Si) serta Paparan dari *Team Leader* PMU ICCTF-UKCCU (Eko Putranto) Dan Paparan Program ICCTF-UKCCU di Riau oleh Konsorsium YMI & Elang (Muslim Rasyid).

Dalam sambutannya, Myrna menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mensinergiskan kolaborasi dan koordinasi program secara efektif sehingga setiap pihak memahami dan mengetahui perannya masing-masing, dan dapat saling mendukung program serta kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, Bupati Siak, Syamsuar menyampaikan program ini adalah program yang baik untuk bangsa dan kemakmuran rakyat, bagaimana menjaga gambut, menjaga tidak terjadi kebakaran dan ekonomi kerakyatan juga ikut bangkit. Riau tidak ingin terus menjadi sorotan kebakaran hutan dan penyebab bencana asap. Kebakaran dimulai karena adanya perkebunan-perkebunan yang dilakukan oleh swasta maupun bumh. Semoga ke depan bersama-sama bisa menjaga Riau terjaga dari kebakaran gambut. Siak yang paling besar, terdiri atas 9 kecamatan yang wilayahnya bergambut.

Program di Siak akan dilaksanakan oleh 3 konsorsium lembaga yaitu: 1) Konsorsium Mitra Insani yang terdiri atas YMI, Jaringan Masyarakat Gambut Riau, dan Fitra Riau; 2) Konsorsium Elang yang terdiri atas Perkumpulan Elang, KAR, Teras Riau, SART; 3) Konsorsium RWWG yang terdiri atas Riau Women Working Group, Kaliptra Andalas.

Tujuan program ini adalah meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut melalui kerja sama langsung dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan strategi penanggulangan kebakaran dan mempromosikan praktik-praktik terbaik di masyarakat.

Implementasi program meliputi 18 desa di wilayah KHG Sungai Siak-Sungai Kampar yang meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan (4 desa/kampung) dan Kabupaten Siak (14 desa/kampung).

Aktivitas utamanya meliputi prinsip 3R (*Rewetting*: Pembasahan Kembali; *Revegetasi*: Penanaman Kembali; *Revitalisasi*: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal) dengan target capaian sebagai berikut:

- 67 unit sekat kanal (Elang: 12; RWWG: 15; YMI: 40).
- 5 Km penimbunan Kanal (RWWG: 1 Km; YMI: 4 Km).
- 178 unit sumur bor (Elang: 18; RWWG: 60; YMI: 100).
- 130 ha/61.000 Bibit Tanaman Hutan (Elang: 20 ha/9.000 bibit; RWWG: 10 ha/24.000 bibit; YMI: 100 ha/28.000 bibit).
- Demplot PLTB dan *Agroforestry* seluas 21 ha (Elang: 6 ha; RWWG: 1 ha; YMI: 14 ha) yang akan didahului dengan Padiatapa.
- 200 orang terlatih tentang ekosistem gambut.
- 200 orang terlatih memanfaatkan produk agroforestri.

- Sekolah Lapang PLTB dan Paludikultur.
- 200 MPA terlatih dalam pemantauan lahan gambut.
- SOP dan EWS Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di 18 desa/kampung.
- 4 Menara Pantau (Elang: 1; RWWG: 1; YMI: 2).
- Desiminasi yang ditujukan kepada masyarakat dalam bentuk: 2.000 leaflet, 2.500 poster, 1.000 komik, beberapa film, 4 baliho.
- Pembangunan *Dashboard Portal* KHG Siak Kampar (www.khgsiakkampar.id).

Kegiatan ini juga diliput oleh beberapa media online dan cetak antara lain Media ANTARA, Riau Online, Radio Greeners Riau dan Tribun Pekanbaru. Terdapat kuranglebih 20 publikasi dan pemberitaan media mengenai kegiatan ini.



Sambutan oleh Deputi III BRG Ibu Myrna Safitri.



Foto bersama Para Pemangku Kepentingan.



Sambutan Bupati Siak Bp. Drs. H. Syamsuar, M.Si sekaligus membuka acara Kick off.



Diskusi Terbatas antara Bapak Bupati dengan BRG, ICCTF dan Proponen ICCTF di KHG Siak-Kampar.

Capaian kegiatan pada fokus area Mitigasi Berbasis Lahan USAID

Kunjungan Lapangan ke Lokasi Konsorsium Gaia-dB, CFES, dan LMDH Puncak Lestari

Lokasi yang di kunjungi adalah Demplot Proyek Konsorsium CFES, Gaia dB dan LMDH Puncak Lestari di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sedangkan, lokasi/daerah penerima hibah yaitu desa Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Dalam kunjungan lapangan ini dilakukan beberapa kegiatan antara lain

1. Pembicaraan pendahuluan dengan Pihak Konsorsium CFES, Gaia dB dan LMDH Puncak Lestari
2. Kunjungan lapangan/Penelitian hibah BMN ICCTF ke lokasi/daerah penerima hibah dan keberadaan BMN yang diterima secara *sampling*.
3. Diskusi dengan Pihak Penerima Hibah BMN ICCTF.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen dan pengecekan fisik BMN di lokasi/daerah penerima hibah ICCTF dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Total dana hibah USAID USAID yang disalurkan melalui konsorsium CFES, Gaia dB dan LMDH Puncak Lestari sebesar Rp 420.486.500 dengan rincian:
 1. Tahun 2017 sebesar Rp 338.174.000.
 2. Tahun 2018 sebesar Rp 82.312.500.
2. BMN hibah yang diberikan berupa alat elektronik, mesin produksi kopi, bibit tanaman, dan setup madu.
3. Dari dokumen yang disampaikan Pihak CFES dan LMDH Puncak Lestari seluruh BMN tersebut telah didistribusikan ke beberapa kelompok tani hutan (KTH).
4. Hasil penelitian secara sampling terhadap BMN hibah, secara umum kondisi BMN baik dan sudah dimanfaatkan oleh KTH dan LMDH Puncak Lestari.



Diskusi di kantor LMDH Puncak Lestari.



Setup Madu.



Mesin Roasting kopi.



Bibit Puspa.

Kunjungan Lapangan ke Lokasi IFGI

Sekretariat ICCTF serta Tim pelaksana hibah BMN ICCTF telah melakukan kegiatan Kunjungan Lapangan Pemeriksaan dan Penilaian terhadap Barang Milik Negara yang akan diserahkan ke kelompok Masyarakat pada tanggal 01 - 03 Agustus 2018 pada Demplot proyek IFGI di daerah Kabupaten Lebak, provinsi Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian Barang Milik Negara (BMN) yang sudah dilaporkan ke ICCTF dengan keadaan fisik dilapangan sebelum dilakukan Berita Acara Serah Terima Aset tersebut ke Kelompok Masyarakat. Lokasi yang dikunjungi adalah Demplot Proyek IFGI antara lain di Desa Cigemblong, Cisareat, Cikadondong, dan Mugijaya, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten serta Lokasi/daerah penerima hibah yaitu 9 (sembilan) Desa yang ada di Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Kegiatan yang dilakukan selama kunjungan ini antara lain: Pembicaraan pendahuluan dengan pihak IFGI. Kunjungan Lapangan/ Penelitian hiah BMN ICCTF ke lokasi/daerah sebaran penerima hibah dan keberadaan BMN yang diterima secara sampling, dan diskusi bersama pihak-pihak terkait, antara lain kelompok tani/ masyarakat, dan pihak pemerintahan setempat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen dan pengecekan fisik BMN di lokasi/daerah penerima hibah ICCTF dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Total dana hibah USAID yang disalurkan melalui IFGI sebesar Rp 531.312.500 dengan rincian:
 - a) Tahun 2017 sebesar Rp 135.300.000.
 - b) Tahun 2018 sebesar Rp 396.012.500.
2. BMN hibah yang diberikan berupa bibit, dengan rincian BMN yang dihibahkan: Nilam, Lada, kapulaga, Durian-Otong, cengkeh, Terong Ijo, Kembang Kol, Tomat, Rawit Ijo, Sawi bentol, Timun, Gambas, Kol Daun, Seledri, kangkung Idaman, pare Belut, dan Cabe Kriting.
3. Dari dokumen yang disampaikan pihak IFGI, seluruh BMN tersebut telah didistribusikan ke beberapa kelompok tani di sembilan desa sebagai demplot proyek ICCTF-IFGI
4. Hasil penelitian secara sampling terhadap BMN hibah, secara umum kondisi BMN baik dan sudah dimanfaatkan oleh Kelompok tani.



Tim Penelitian BMN di Kecamatan Cikadondong.



Salah satu bibit tanaman program IFGI.



Tim BMN sedang mengecek kondisi bibit.



Foto Bersama Kegiatan Penelitian BMN di Kecamatan Cikadondong.

Kunjungan Lapangan ke Kegiatan Forest Watch Indonesia (FWI)

Pada kunjungan lapangan kegiatan ini dilakukan di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor dan Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk pemeriksaan BMN yang akan diserahkan kepada penerima manfaat proyek Forest Watch Indonesia (FWI). Penerima hibah BMN adalah KTH Cibulao Hijau yang akan menerima 45 jenis barang hibah BMN.

Adapun Hasil penelitian fisik antara lain:

1. Pemeriksaan fisik barang hibah BMN yang berlokasi di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor terdapat 41 barang yang berada dilokasi ini:
 - a. Bibit tanaman: Bibit Bambu & Bibit Sengon
 - b. Kemasan Kopi: Kemasan 250 gr stand pouch, Kemasan 100 gr craft, Kemasan 250 gr craft, Kemasan Greenbean 30 kg, Kemasan Greenbean 60 kg dan Paper Filter V60-02. Namun kemasan kopi ini direkomendasikan menjadi barang habis pakai.
 - c. Peralatan untuk mengolah kopi dalam kondisi yang baik. Namun, untuk jenis “bangunan kebun bibit” tidak dikategorikan bangunan tetapi tempat penyamaian bibit, karena hanya dipasang bambu dan terpal bukan bangunan permanen.
 - d. Terdapat tiga barang yang tidak ada dilokasi dikarenakan sedang digunakan untuk event: Firna glass, Timbangan digital black, dan kettle. Dan satu barang yang telah habis digunakan yaitu kemasan 100 gr stand pouch.

2. Untuk pemeriksaan fisik barang hibah BMN yang berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor dengan penerima barang hibah BMN yaitu Kel. Tani Gunung Mas akan menerima 19 jenis barang. Kondisi barang tidak jauh berbeda dengan barang yang berada di kelompok tani cibulao hijau, adapun barang-barang yang berada disana antara lain: Pulper Kopi, Grinder Latina, V60, Tiamo Server V60, Hario Paper Filter VCF-02, Timbangan Digital , Kettle Leher Angsa, Luminarc Box with Wood, Pitcher Latina, Server Saji, Sendok Cupping, French Press, Thermometer Digital, Cookmaster Coffee Drip VCD06, Cookmaster Coffee Drip VCD08, Firna Glass P158BF, Sub Shaker 350MI, Gelas Sloky dan Firna Carafe 250MI.



Tempat Pembibitan Jenis Tanaman Sengon, Bambu, Kopi, dll.



Coffee Roaster Kapasitas 1 KG.

Grinder Kopi Latina.



Teko Leher Angsa.

Kunjungan Lapangan ke Lokasi Universitas Jember

Rangkaian kegiatan kunjungan lapangan ke lokasi Universitas Jember dimulai dengan melakukan ramah tamah bersama rektor dan wakil rektor di ruang rapat roktorat UNEJ. Selanjutnya, dilaksanakan audiensi dengan OPD Pemkab Jember dan Pemdes Wonoasri. Audiensi dihadiri oleh Dinas INDAKOP, Dinas Bapemas, BKSDA, TN Meru Betiri, LPPM UNEJ, Bakorwil Jatim, Kades Wonoasri, Bappenas, dan UNEJ.

Bapak Rektor, Drs. Moh. Hasan, MSc., PhD, dalam sambutannya berterima kasih untuk kehadiran Team Bappenas. Selanjutnya, menjelaskan perkembangan UNEJ di Jawa Timur dan adanya komitmen UNEJ untuk melanjutkan program mitigasi yang dibiayai ICCTF Bappenas dengan cara menjadikan Desa Wonoasri sebagai desa binaan UNEJ. Sampai saat ini sudah banyak KKN dan penelitian mahasiswa serta dosen diarahkan ke Wonoasri. Kegiatan ini akan diteruskan di waktu mendatang.

Selanjutnya, Bapak Irtama Bappenas, Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si, dalam sambutannya menjelaskan tentang rencana pembangunan pemerintan RI melalui Bappenas. RPJMN 2019-2024 diarahkan kepada perencanaan pembangunan rendah karbon, oleh sebab itu pilot proyek yang berhasil dilaksanakan UNEJ bersana TN Meru Betiri dengan pembiayaan hibah USAID yang disalurkan oleh ICCTF Bappenas dapat direplikasi oleh dinas dan instansi di daerah. Diharapkan masyarakat Wonoasri dapat mandiri.

Dinas INDAKOP Jember menjelaskan adanya komitmen besar untuk mendukung hasil intervensi proyek, dan memajukannya. Pertama instansinya mengurus proses PIRT, mengurus proses HAKI batik warna alam ke INDAKOP provinsi Jawa Timur. Ibu Bupati memerintahkan untuk mengurus proses perdagangan produk wonoasri ke Transmart. Mendukung dalam pelaksanaan pameran di JIE, Indakop Propinsi, Asian Games di Palembang. Ibu Bupati akan melakukan pameran ke Eropa untuk batik warna alam Wonoasri dalam waktu dekat.

Adapun Kepala TN Meru Betiri, Ir. Kholid Indarto, menjelaskan bahwa keberhasilan ini sudah mulai dibawa ke desa lainnya. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama Darwis (Kesadaran Wisata), maka dibuat kegiatan kunjungan atau studi banding ke Ciremai, Jawa Barat. Hasilnya 4 dari 8 desa penyangga akan segera melaksanakannya dan satu desa sudah mulai mengembangkan pariwisata yaitu Desa Mulyosari.

Kegiatan kunjungan diteruskan ke lokasi rehab TN Meru Betiri. Team BMN memeriksa aset berupa pohon MPTS, bibit cabe, jamu. Dilakukan diskusi antara Bapak Irtama Bappenas dengan UNEJ, Ka BTN Meru Betiri, dan KTH anggota LMDH. Dilakukan pemeriksaan aset berupa tanaman. Pemeriksaan BMN selanjutnya ke Fasilitas pembibitan MPTS, UNEJ menunjukkan fasilitas greenhouse sebagai aset yang akan diserahkan kepada LMDH. Greenhouse saat ini berisi bibit tanaman kemiri dan pinang.

Lebih lanjut, acara audiensi dengan masyarakat bertempat di Balai Desa Wonoasri. Sambutan Irtama Bappenas, Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si, disampaikan bahwa dalam perencanaan pembangunan tahun 2019, KLHK menganggarkan dana reboisasi yang besar, oleh sebab itu tentu saja masyarakat desa bersama TN Meru Betiri agar dapat mengambil peluang tersebut. Melalui kegiatan ini BMN akan diserahkan, selanjutnya akan dihapus dari aset Bappenas. Penyerahan tentu saja kepada penerima manfaat yang realistis, misalnya alat ukur atau analisa karbon sebaiknya diserahkan ke UNEJ hal ini memungkinkan.

Dalam diskusi ada tanggapan yang menarik dari masyarakat umum bernama Sugeng, staf Dinas Kesehatan Jember. Dalam pandangannya menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan program ICCTF-UNEJ, selanjutnya menyarankan agar monev selanjutnya tetap dipertahankan. Mengusulkan agar dipadu dengan agro-wisata. Karena Batik Wonoasri mahal tidak terjangkau masyarakat, maka disarankan ditambahkan batik sablon, tetap menggunakan warna alam. Komentar Bpk Kholid (KaTNMB) dalam padangannya ke depan seluruh stakeholder harus bersatu, siapa berbuat apa atau berbagi peran. Selanjutnya, Komentar kepala desa menjelaskan bahwa 3 desa minta didampingi untuk meriplikasi KUBE di Wonoasri (diketuai bu Sujud). Desa yang dimaksud adalah Mulyorejo, Andongrejo dan Sanenrejo.

Rangkaian akhir adalah pemeriksaan BMN Kube Batik. Dalam kunjungan ini kelompok batik menjelaskan proses pembuatan batik warna alam. Selanjutnya menunjukkan peralatan yang diadakan oleh proyek ICCTF-UNEJ: berupa drum, dandang, ember, cap, peralatan mebatik, dll. Kondisi alat baik walupun sudah ada yang rusak sedikit misalnya anglo dari bahan tanah liat. Kegiatan ditutup dengan Pemeriksaan BMN Kube Pengolahan makanan.



Ka TNKMB menjelaskan kepada bpk Irtama tentang perawatan bibit dengan infus.



Penjelasan dari bu Hari tentang budidaya cabe jamu di tegakan yang ada.



Bpk Irtama memberikan sambutan pada acara audiensi dengan masyarakat.



Kunjungan outlet batik di BUMDES.

Kunjungan Lapangan ke Lokasi Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura

Kegiatan dimulai dengan sosialisasi program kepada 11 Kepala desa dari 3 kabupaten yang berbatasan dan bersinggungan bertempat di hotel Orchardz Ayani Pontianak. Acara sosialisasi dihadiri perwakilan dari 11 desa meliputi Kepala Desa dan BPD. Desa-desanya tersebut adalah: Simpang Kasturi, Mandor, Kayu Ara, Kayu Tanam, Sumsum, Sui Segak, Redtop, Kubu Padi, Peniti Besar, Segedong dan Peniti Dua.

Perwakilan Fakultas Kehutanan UNTAN, Gusti Hardiansyah, menjelaskan bahwa KHDTK dikukuhkan melalui SKmenLHK No. 656 tahun 2016 belum pernah kami mensosialisasikan menyeluruh kepada pemerintah desa. Pertemuan sosialisasi hari ini menjadi penting karena Fak. Kehutanan Untan dapat bertemu dengan seluruh Kades dan BPD yang akan menjadi mitra pengelolaan KHDTK di masa mendatang. Luasan KHDTK 19.662 ha berada di 3 kabupaten yaitu Kubu Raya, Mempawah dan Lamdak. Sampai tahun 2016 terjadi degradasi sebesar 2.425 ha (12%).

Dalam acara ini, masing-masing perwakilan desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi dan permasalahan yang terjadi didaerahnya. Semua masukan telah dicatat dan akan ditindaklanjuti melalui program UNTAN-ICCTF kedepan. Acara ini ditutup oleh Dekan Fakultas Kehutanan UNTAN.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama Pemda Provinsi Kalbar yang dihadiri oleh PJ Gubernur Kalbar beserta jajarannya. PJ Gubernur Kalbar, Dody, menjelaskan peran pemerintah provinsi. Suatu kenyataan yang dihadapi adalah SDM yang masih rendah baik di pemerintah maupun di masyarakat. Untuk mendukung mitigasi kebakaran lahan, pemerintah provinsi sudah bekerjasama dengan semua unsur termasuk pemerintah desa sehingga penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah dilakukan dengan lebih baik. Masih ada pembakaran lahan di masyarakat untuk budidaya pertanian. Oleh karena itu, masih perlu ditingkatkan pendidikan dan latihan tentang praktek pertanian tanpa bakar (PLTB).

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan acara *Kick-off Meeting* dan *Expose Proyek* yang turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur terpilih Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Sutarmidji, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik inisiasi program yang diusung oleh Universitas Tanjungpura melalui pendanaan ICCTF dan seluruh jajaran dinas terkait diharapkan mendukung penuh implementasi program ini. Komitmen para pihak yang berada di dalam/sekitar KHDTK dan sinergitas program dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Kabupaten penting dalam upaya mendukung perlindungan dan pengelolaan gambut di KHDTK guna mencegah laju deforestasi dan degradasi hutan.

Selanjutnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan dalam pidato penutupannya bahwa Inisiasi arah kebijakan pembangunan Indonesia yang mengusung keseimbangan pilar pembangunan berkelanjutan dalam kerangka Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang rendah emisi karbon. Program UNTAN ini sejalan dengan Komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim yang ditindaklanjuti melalui implementasi kebijakan dan rencana aksi yang komprehensif. Kementerian PPN/Bappenas sebagai system integrator berperan penting memastikan upaya tindak lanjut komitmen tersebut dengan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial.



Foto bersama acara sosialisasi rencana kerja KHDTK terkait proyek Fhut UNTAN-ICCTF.



Diskusi bersama PJ Gubernur Kalbar tentang mitigasi lahan gambut Kalbar.



Kick-off Meeting proyek ICCTF-UNTAN.



Menteri PPN/Kepala Bappenas mendengarkan penjelasan penggunaan peralatan yang diserahkan ke kelompok.



Praktek penggunaan alat pemadam oleh MPA.

Kunjungan Lapangan ke Lokasi Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada

Kunjungan lapangan dilakukan di Desa Ngrawoh, Kec. Kradenan, kab. Blora, Jawa Tengah untuk melakukan pengecekan asset BMN yang akan diterima oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan berupa 8 jenis barang hibah BMN. Adapun Hasil penelitian fisik antara lain: Fisik barang hibah BMN yang berlokasi di desa ini dalam kondisi yang baik berupa alat dan bibit tanaman yaitu Mesin Pencacah Rumput, Mesin Jahit, Benih Padi, Gentong, Benih Jagung NK 212, Benih Jagung Pertiwi 2, Benih jagung NK 7328 dan Benih padi. Semua Bibit tanaman ini telah ditanam oleh para anggota LMDH di demplot.

Kunjungan dilanjutkan ke Desa Nginggil, Kec. Kradenan, Kab. Blora, Jawa Tengah. Penerima barang hibah BMN yaitu Lemaga Masyarakat Desa Hutan menerima 13 jenis barang hibah BMN. Kondisi barang tidak jauh berbeda dengan barang yang berada di kelompok desa Ngrawoh, adapun barang-barang yang berada disana antara lain: Mesin Pencacah Rumput, Mesin Jahit, Mata Gergaji, Gentong, Bibit jati, Benih Jagung 1 Kg DK 77, Benih Jagung 1 Kg NK 7326, Benih padi, Benih Jagung

NK 212, Benih Jagung Pertiwi 3, Benih jagung NK 7328, Benih Jagung Pertiwi 2 dan Bibit Jati.

Total dana hibah USAID yang disalurkan melalui pihak Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada sebesar Rp 277.438.150 dengan rincian:

- a) Tahun 2017 sebesar Rp 49.702.650
- b) Tahun 2018 sebesar Rp 227.735.500

Catatan pemeriksaan menyatakan Gentong yang ada di desa ngrawoh tidak dapat ditunjukkan secara fisik karena sedang dipinjam di desa lain. Tim peneliti hanya melakukan cek fisik kebeberapa lokasi dikarenakan keterbatasan waktu dan jarak tempuh yang jauh. Terdapat kekurangan dokumen pendukung yang akan disampaikan setelah penelitian selesai dilakukan. Diketahui juga bahwa seluruh bibit tanaman sudah dimanfaatkan oleh anggota LMDH di demplot. Hasil penelitian secara sampling terhadap BMN hibah, dapat disimpulkan secara umum kondisi BMN baik dan sudah dimanfaatkan oleh Kelompok tani atau penerima manfaat yang ada.



Foto Bersama Dengan Tim Dari FKT UGM.



Koordinasi Dengan FKT UGM.



Diskusi Dengan Tim Dari FKT UGM dan Ketua LMDH.



Mesin Pencacah Rumput di Desa Nginggil.

Kunjungan Lapangan ke Lokasi YEU, SESAMI, ENERBI dan Javlec

Kunjungan pertama dilakukan dengan menghadiri *kick off meeting* SESAMI di Magelang. Kepala Bappeda dan Litbangda kabupaten Magelang, Drs. Sugiyono, Msi, menyampaikan sambutan dalam acara ini. *Kick off meeting* dilakukan di Ruang rapat Bappeda, di Kota Mungkid. Hadir pada acara tersebut staf Bappeda, Dinas ESDM dan Dinas Pertanian.

Dalam sambutannya, Drs. Sugiyono, Msi, diakui bahwa pranoto mongso sudah tidak bisa tepat dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sesami-ICCTF Bappenas. Magelang sedang mengembangkan pertanian organik, sehingga proyek ini sejalan dengan program kabupaten. Kenyataan bahwa pertambangan belum terkelola dengan baik. Proyek ini dirasa tetap berhasil jika ditinggalkan, karena masih tetap berlanjut secara mandiri. Yang perlu dikerjakan adalah perencanaan bersama stakeholder. Ada program IDB yang masuk untuk pertanian organik selama 8 tahun, saat ini sudah mencapai 1.050 ha. *Biodigester* memacu pertanian organik, diminta pak Joko Dinas Pertanian untuk secara serius menindaklanjuti program ini. Menentukan jenis tanaman yang paling tepat, dan menghasilkan nilai ekonomi.

Setelah pertemuan ini, diminta Litbangda (pak Edy), untuk mengkoordinasikan secara khusus dengan OPD terkait. Bila diperlukan, dibuat rancangan Perda agar dapat didukung dengan penganggaran dari APBD, termasuk dinas dan dana desa.

Kegiatan selanjutnya adalah monev program yang dilakukan di dusun Stabelan, Boyolali. Pembangunan digester masih dalam pengerjaan. Pemangunan akan membutuhkan waktu sekitar 10 hari ke depan. Pembangunan di lokasi belakang rumah dekat kandang sapi, dekat dengan tebing sungai. Menurut penuturan warga lokasi ini tidak pernah longsor (kuat). Pemilihan lokasi menjadi penting untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan pemanfaatan sarana.

Berikutnya kunjungan dilakukan ke Desa Keningar di Kec. Dukun, Magelang. Saat itu petani hortikultura sedang mempersiapkan lahan untuk menanam sehingga kebutuhan pupuk rendah. Kunjungan ke pusat pembibitan menemui kenyataan bahwa produksi bibit terhenti, fasilitas nurseri kosong. Pupuk *bioslurry* banyak tersedia dalam drum di pusat produksi pupuk organik dengan kondisi siap pakai. Kantor Sesami dilakukan diskusi tindak lanjut dan diharapkan Sesami membantu mengkomunikasikan dengan pengusaha/pebisnis agar *bioslurry* produk dari Kelompok Keningar Hijau dapat

menghasilkan keuntungan untuk dana perawatan sarana dan alat perawatan *biodigester*. Selain itu tentu saja dapat mengarah kepada dana simpan pinjam. Dana sangat dibutuhkan petani terutama biaya penanaman dan perawatan tanaman.

Pada hari berikutnya, dilakukan kunjungan ke lokasi proyek Javlec di Desa Giri dimana rombongan diterima KTH di aula Watu Payung. Kelompok menjelaskan bahwa KTH dibentuk tahun 2002, menanam jati di 17,5 ha pada tanah HP Perhutani. Tahun 2010 status HP berubah menjadi hutan lindung. Tahun 2011 BPDAS membawa kelompok ke Kalibiru, Kulonprogo. Sampai 2017 pengelolaan belum menggembirakan dan kelompok hampir putus asa. Dengan masuknya Javlec-ICCTF, dan mengadakan acara perawatan pohon yang dihadiri Wabup Gunungkidul dan ICCTF, maka kemudian KPH membangun jalan, dan diikuti desa memperbaiki joglo (pendopo).

Kelompok Pandai Ruang (ISI Yogyakarta) membantu dengan sukarela membangun hiasan untuk fotografi. Secara resmi lokasi wisata dibuka tgl 3 Mei 2018. Kunjungan rata-rata dengan pemasukan saat lebaran 40 an juta dan saat ini 16-20 juta setiap bulan. Pengelola saat ini berjumlah 45 orang.

Kemudian dilanjutkan kunjungan ke Proyek Enerbi dimana kunjungan pertama dilakukan ke kelompok pengelola air, menguji bak penampungan utama dan bak distribusi. Rombongan bertemu dengan Danramil Gunungkidul (bpk. Taufik Hanaf) yang sedang survey air karena mendapat perintah dari Danrem 051 DKI Jaya (Bobby Rinal Makmum) untuk melihat potensi percepatan infrastruktur air di Gunungkidul. Tahap pertama sumber air yang sudah diangkat ke permukaan di Girisubo dengan pipa saat ini 3 inch dan sedang disiapkan 4 inch. Dan dusun Pule Jajar, Jepitu. Minta bantuan untuk disurvei agar dapat mengikuti contoh yang ada di Banyu Meneng ini. Hal ini disampaikan ke Bappeda untuk berkoordinasi. Akan segera ditindaklanjuti dengan rakor Bappeda, PU dan PDAM.

Selanjutnya dilakukan kunjungan monev program YEU di Desa Girikarto. Kelompok tani telah berkumpul di rumah kepala dusun. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Bidang Produksi, Dinas Pertanian dan hortikultura Gunungkidul bpk Adinoto. Intervensi YEU dalam mendampingi masyarakat di 2 kecamatan yaitu Panggang dan Purwosari. Ketertarikan masyarakat untuk menerapkan produksi bibit padi segreng handayani secara mandiri, penerapan penggunaan pupuk dan pestisida organik,

serta pakan ternak organik. Masyarakat merasa untung karena mengurangi biaya produksi, dan kepastian panen.

Rangkaian akhir kunjungan dilakukan ke lokasi proyek YEU-Enerbi. Menurut tokoh masyarakat (Hasan) menjelaskan bahwa di 4 dusun saja yang belum kebagian PAM dari sumber Bribin, Semanu. Namun perlu dipertimbangkan bagaimana agar nantinya tidak terjadi konflik sosial akibat kesalahan persepsi jika tidak semua anggota masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas. Bu dukuh Tegalweru menjelaskan sangat penting untuk bekerjasama antar warga, dan siap untuk membangun bersama. Enerbi menjelaskan bahwa survei lokasi dan sosialilasi sudah dilakukan bersama kepala desa. Selanjutnya akan dilakukan FGD, pembentukan kelompok calon pengelola air, survei sosek dan studi banding ke Banyumeneng, Panggang.

Suparnos selaku Ketua RW menjelaskan bahwa dari mata air Cluwakan sudah dibangun jaringan distribusi air bersih melalui proyek Pamsimas. Ada 3 titik penampungan, namun baru titik pertama yang dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan minuman ternak sapi sekitar 11 kepala keluarga yang sapinya berada di sekitar bak 1. Bulan lalu diupayakan menghidupkan pompa menuju bak kedua namu banyak yang bocor akibat terkena cangkul, sabit, dan sebab lainnya. Oleh karena itu jika nanti dilakuan survei, harus mempertimbangkan ketepatan penempatan. Kasus bak ke 2 yang dipaksakan pindah karena pemilik lokasi tidak mengijinkan penempatan bak menjadi salah satu hal yang mungkin menyebabkan tidak berfungsinya sistem tersebut. Kunjungan lapangan ke sumber air Cluwakan yang berada di tebing pantai. Terlihat ada bekas rumah pompa/generator yang kosong karena lokasinya yang dekat pantai, menjadikan alat yang berbahan besi mudah berkarat dan rusak.



Hadir Kabid Produksi Pertanian dalam Monev program YEU di desa Girisuko, Panggang, Gunungkidul.



Monev ke Dusun Stabelan, Desa Tlogolele, Kec. Selo, Boyolali.



Menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan kepada Wabup Gunungkidul.



Kepala Bappeda membuka acara dan memberikan sambutannya.



Koordinasi dengan Kodim Gunungkidul (Taufik Hanif) yang meminta bantuan kita untuk melihat konstruksi air di desa Giri Subo, Panggang.

Kunjungan Lapangan ke Lokasi Puslit Karet

Lokasi yang di kunjungi adalah Demplot Proyek Pusat Penelitian Karet di Desa Sungai Rengit Kabupaten Banyu Asin dan Lokasi/daerah penerima hibah yaitu Kelompok Tani Sumber Jaya Desa Sungai Rengit Kabupaten Banyu Asin. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah pembicaraan pendahuluan dengan pihak Pusat Penelitian Karet dan masyarakat penerima manfaat yaitu Kelompok Tani Sumber Jaya. Dilanjutkan kunjungan lapangan/Penelitian hibah BMN ICCTF ke lokasi/daerah penerima hibah dan keberadaan BMN yang diterima secara sampling.

Kemudian diskusi dengan Pihak Penerima Hibah BMN ICCTF. Berdasarkan hasil penelitan terhadap dokumen dan pengecekan fisik BMN di lokasi/daerah penerima hibah ICCTF dapat diuraikan sebagai berikut: Total dana hibah USAID USAID yang disalurkan melalui Pusat Penelitian Karet sebesar Rp 498.407.000 dengan rincian:

- a) Tahun 2017 sebesar Rp 29.720.000.
- b) Tahun 2018 sebesar Rp 468.687.000.

BMN hibah yang diberikan berupa timbangan duduk, mesin pencacah, 5 buah sekat kanal yang tersebar, *hand tractor*, mesin air, *hand sprayer*, Gas Analyzer Li-80, Mesin pompa dan selang, bibit semangka. Dari dokumen yang disampaikan Pihak Pusat Penelitian Karet seluruh BMN tersebut telah didistribusikan ke kelompok masyarakat di Kab Banyu Asin dan Muara Enim. Hasil penelitian secara sampling terhadap BMN hibah, secara umum kondisi BMN baik dan sudah dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Sumber Jaya.



Foto Bersama Tim Puslit Karet dan Masyarakat.



Pengecekan Hand tractor, hand spryer, mesin pompa.



Meninjau Sekat kanal.



Memeriksa Mesin Li-Cor Gas Analysis.



Fokus Area 2

ADAPTASI & KETANGGUHAN

Fokus area ini bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga lokal dan nasional di Indonesia serta masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui diseminasi informasi iklim, pengembangan dan inovasi strategi adaptasi, pemanfaatan teknologi dan pengetahuan, serta mempromosikan penyusunan kebijakan untuk adaptasi.

Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, ICCTF juga telah mendanai 11 proyek Adaptasi dan Ketangguhan melalui pendanaan USAID. Pada Quartal-4 (Q4) 2017 dan Q1 2018, 7 proyek telah selesai yaitu ITB, IPB, YLHS, YEU, Transformasi, UGM dan Puska-UI. Sedangkan proyek yang berakhir pada Q2 2018 adalah sebanyak 5 proyek. Selama Q3 2018, ICCTF telah melaksanakan kegiatan *financial spot check* dan *program monitoring* serta pemeriksaan BMN ke beberapa lokasi proyek untuk memastikan pelaksanaan proyek Adaptasi dan Ketangguhan sesuai dengan rencana kerja dan mekanisme pengelolaan proyek yang ditetapkan oleh ICCTF sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tanggal	Proponen	Lokasi	Hasil
24 - 26 Juli 2018	FIELD	Sulawesi Selatan	Pengecekan BMN (BMN sesuai)
26 - 28 Agustus 2018	FTP UGM	Kupang, NTT	<i>Kick-off meeting (On the track)</i>
29 - 31 Agustus 2018	CIS Timor	NTT	Pengecekan BMN (BMN sesuai)

Capaian kegiatan pada fokus area Adaptasi dan Ketangguhan:

Kunjungan ke lokasi FIELD

Kegiatan kunjungan dimulai dengan menuju Mandoti yaitu tempat konsultan FIELD di Kabupaten Maros setelah itu dilanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pangkep (Pangkajene Kepulauan) yang diawali dengan kunjungan ke Desa Taraweang, Desa Barabatu dan Desa Kanaungan yang ditempuh dengan perjalanan darat selama kurang lebih 2 jam perjalanan. Dalam kunjungan ini Team BMN (Bappenas & ICCTF) serta Pihak FIELD dan Mandoti menemukan beberapa hal diantara:

Desa Taraweang

- Alat pembuatan lubang biopori yang berjumlah 2 unit ada dengan kondisi baik, alat ini digunakan untuk membuat lubang biopori sebanyak 5 lubang dari 25 orang anggota kelompok tani Balla Sipatuwo (125 lubang).
- Sumur resapan berjumlah 3 unit yang digunakan

untuk menyimpan air dari hujan yang digunakan untuk lahan penanaman.

- Tempat penanaman dari benih sayuran masih digunakan oleh masyarakat/Kelompok Tani Balla Sipatuwo.

Desa Barabatu

- Alat pembuatan lubang biopori berjumlah 2 unit dalam keadaan kondisi baik.
- Sumur resapan berjumlah 3 unit dalam keadaan baik dan masih bisa digunakan.
- Tempat penanaman sudah beberapa kali proses tanam dari hasil benih pada tahun 2017.
- Tanaman yang ada seperti, Cabai, Bayam, Kangkung, Timun, dan Kacang Panjang mendapatkan hasil yang baik.
- Lokasi penanaman di Desa Barabatu dikelola oleh

Kelompok Tani Balla Sipatuwo berjumlah 25 orang yang akan membuat lubang biopori sebanyak 125 lubang biopori.

- Kelompok Tani Balla Sipatuwo mendapatkan bantuan berupa mesin pembuat kompos organik dari lembaga lain dan sering dijadikan lahan/tempat belajar para siswa/karyawan dari sekolah/dinas sekitar.

Desa Kanaungan

- Alat pembuatan lubang biopori berjumlah 2 unit yang diterima oleh Kelompok Tani Siporenu/Daoc dalam keadaan baik.
- Sumur resapan berjumlah 3 unit.
- Pakan ikan yang digunakan juga berupa dari hasil campuran sisa dari buah-buahan, sayuran dan cacing yang disimpan dalam drum besar.
- Ada beberapa tambak yang digunakan untuk pembudidayaan/ternak ikan dan udang.
- Tambak/kolam yang digunakan sering dijadikan untuk tempat pelatihan masyarakat dalam bentuk Sekolah Lahan Tambak.
- Lahan Tambak pada saat musibah banjir mengakibatkan tercampurnya antara ikan dan udang.



Team melakukan pemeriksaan Tempat Penanaman Benih Sayuran.



Lahan yang sudah siap dilakukan proses tanam kembali di Desa Barabatu.



Team melakukan pemeriksaan asset Sumur Resapan di Desa Taraweang.



Foto bersama di Desa Barabatu bersama Kelompok Tani Balla Sipatuwo.

Kunjungan Lapangan ke Lokasi FTP UGM

Kunjungan pertama dilakukan ke lokasi replikasi SRI di Desa Tarus, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Tim mengunjungi lokasi sawah SRI dan bertemu dengan anggota kelompok tani. Pada saat ini kelompok tani beranggotakan 68 orang, dari anggota tersebut 20 orang diantaranya sudah melakukan replikasi budidaya padi SRI di sawahnya. Total luasan lahan replikasi lebih kurang 10 ha di Desa Tarus. Mereka tertarik menerapkan SRI karena produksi yang tinggi. Namun demikian masih ada kendala yaitu: tingginya biaya perawatan tanaman berupa penyiangan. Kendala lainnya kebutuhan pupuk organik belum dapat terpenuhi karena ketersediaan pupuk organik yang terbatas di toko.

Penyiangan padi cara tanam biasa yang umumnya dilakukan 1 kali dengan upah sebesar Rp 750.000/0,5 ha (Rp 1,5 jt/ha), menjadi 2 kali penyiangan sehingga biaya naik Rp 1,5 jt per ha. Hal ini karena jarak tanam yang lebar 30x30 cm, dan jajar legowo tanaman 2+1. Berdasarkan perhitungan maka sebenarnya masih menguntungkan dari 2 sisi. Jika menggunakan tenaga buruh tani maka pendapatan buruh tani menjadi dua kali lipat. Hasil panen meningkat antara 3-5,6 ton dengan harga gabah Rp 4.000/kg. Keuntungan kotor per musim tanam menjadi (Rp 12 jt-1,5 jt=10,5 jt/ha) sampai (Rp 22,4 jt-1,5 jt=20,9 jt/ha).

Hal ini dapat ditindak lanjuti dengan pendampingan produksi pupuk organik kelompok tani. Pembersihan gulma perlu mengenalkan alat pembersih rumput mekanis, tentu saja alat ini perlu diproduksi massal di NTT agar petani mudah mendapatkan/membelinya.

Selanjutnya, Tim melaksanakan koordinasi persiapan *Kick off meeting* di Kupang. Dilaksanakan diskusi dengan FTP UGM, UKAW, ICCTF, dan Dinas PUPR NTT. Dinas PUPR, Benny, menjelaskan bahwa NTT memiliki 26 daerah irigasi dan 15 sungai yang mengalir sepanjang tahun. Saat ini sudah dibangun 46 bendungan. Luas lahan irigasi sawah fungsional yang ditangani/menjadi kewenangan pusat 70.000 ha, dalam pengelolaan provinsi 60.000 ha dan di setiap kabupaten. Jika ditotal seluruh NTT potensi pengembangan sawah berdasar jaringan irigasi seluas 300.000 ha. Namun kenyataan yang ada tidak semuanya sudah tercetak sawah. Jumlah ini yang menjadi konsentrasi Dinas PU provinsi NTT bersama BBWS NTT.

Saat ini jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian, oleh sebab itu berapapun banyak produksi air belum tentu berkorelasi dengan jumlah produksi, akan sangat bergantung pada teknologi dan pemanfaatan air. Oleh sebab itu, jika metode SRI diterapkan secara luas, sebenarnya akan memecahkan masalah koordinasi antara dinas dan memberikan hasil positif pada semua pihak yaitu: efisiensi air, produktivitas air, produktivitas lahan, dan ketahanan pangan.

Pada acara *Kick-off meeting* yang dilaksanakan di Kupang, FTP UGM, Bayu Dwi Aprinugroho, menjelaskan proyek SRI secara menyeluruh. Proyek ini sudah direplikasi dari sisi penyediaan air oleh Dinas PUPR NTT yaitu pada manajemen pengelolaan air dengan sistem online. Replikasi tersebut dilakukan di Manggarai Barat (Mabar) dan Timor Tengah Selatan (TTS). Selanjutnya



Diskusi perkembangan metode SRI di kelompok tani Desa Tarus.

saat ini diterapkan di Sumba Timur yaitu Desa Lambanapu, Kec. Kambera, Sumba Timur. Demplot seluas 0,8 ha sudah ditanam 2 hari yang lalu. Air irigasi berasal dari bendungan Kambaneru. Bendungan Kambaneru mengairi kurang lebih 3.000 ha sawah irigasi.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda NTT, Sonny Libing, membuka acara dan menjelaskan bahwa NTT memiliki lahan basah 12% dan lahan kering 88%. Oleh karena itu dengan kemajuan yang sudah dicapai, harapannya air yang diproduksi dapat dibagi ke lahan tidur dan lahan kering. Pemda NTT berterima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat bersama UGM kepada NTT.

Selanjutnya, tim melaksanakan sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk panel kuliah umum di ruang rapat UKAW. Materi disampaikan oleh 3 orang yaitu Sudaryanto (ICCTF) tentang pengelolaan dana hibah proyek perubahan iklim. Chusnul Arif (Teknik Sipil Pertanian, IPB) tentang SRI; dan Rizki M. (FTP UGM) tentang perubahan iklim.

Kunjungan ini diakhiri dengan kunjungan ke lokasi riset Pertanian Lahan Kering di kampus UNDANA Kupang. Kunjungan dilakukan untuk melihat potensi aksi adaptasi bidang pertanian di lahan kering. Kunjungan ini didampingi penanggungjawab penelitian budidaya pertanian terintegrasi di lahan kering Universitas Nusa Cendana (UNDANA). Lokasi berada di kampus bagian belakang. Di lokasi riset Tim melihat sumber listrik dari solar panel, pengubahan lahan dari bebatuan menjadi petakan lahan budidaya dengan menambahkan lapisan tanah mineral dari luar kedalaman 15-20 cm diatas lapisan batuan. Tampak tanaman percobaan terdiri atas cabai, padi, beraneka ubi. Tampak satu unit alat produksi air dari embun di malam hari.



Sambutan Kabid Ekonomi Sonny Libing.



Suasana Kuliah umum UKAW oleh ICCTF, FTP UGM dan Pertanian IPB berlangsung 3,5 jam.



Kunjungan ke lab pangan dosen UKAW (pak Zet Malelah) didampingi Dekan FTP (Andreas Mega).

Kunjungan Lapangan ke Lokasi CIS Timur

Sebelum menuju Desa Oelasin dan Desa Boni, Tim singgah di Bappeda Rote untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi tentang program ICCTF dan CIS TIMOR yang telah dijalankan. Setelah itu, tim menuju ke lokasi Desa Oelasin dan Desa Boni di Kabupaten Rote Barat Daya yang ditempuh dengan perjalanan darat selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Dalam kunjungan ini Team BMN (Bappenas & ICCTF) serta Pihak CIS TIMOR menemukan beberapa hal diantara:

Desa Oelasin

- Panel Surya berjumlah 9 set ada dengan kondisi baik, alat ini digunakan untuk mengaliri listrik ke pompa air sumur, pompa air hidroponik, serta 1 rumah anggota kelompok.
- Pompa Air Sumur berjumlah 2 dengan kondisi baik,

yang digunakan untuk menaikkan air dari sumur ke atas untuk keperluan penyiraman tanaman dan kebutuhan rumah tangga.

- 1 Tower Air dengan kapasitas 2300 liter dan 1 drum dengan kapasitas 250 liter untuk menyimpan air dalam jumlah besar.
- 1 set peralatan hidroponik.
- 2 set pompa siram.

Desa Boni

- Panel Surya berjumlah 9 set ada dengan kondisi baik.
- Pompa Air Sumur berjumlah 2 dengan kondisi baik.
- 4 drum plastik untuk menyimpan air.
- 1 set peralatan hidroponik.
- 2 set pompa siram.



Tim sedang berdiskusi dengan Kepala Bappeda Rote.



Tim BMN melakukan pemeriksaan aset Hidroponik di Desa Oelasin.



Tim BMN melakukan pemeriksaan aset Panel Surya di Desa Oelasin.



Tim melakukan pemeriksaan Tempat Penanaman Benih Sayuran.



Fokus Area 3

ENERGI

Opsi awal Mekanisme Pembiayaan Pengembangan *Renewable Energy* di Indonesia yang difasilitasi Kementerian PPN/Bappenas.

- 1 **PT. SMI**
- 2 **BLU - RE**
- 3 ***Clean Green Fund***
- 4 ***Escrow Account***
- 5 ***Existing ICCTF***

Capaian kegiatan pada fokus area Energi:

Menindaklanjuti arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pada tahun 2018 ICCTF bersama Direktorat Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan (ESDMP) Bappenas mendapatkan mandat untuk melakukan kajian dan memfasilitasi pengembangan pendanaan proyek *Renewable Energy* (RE). Lanjutan dari sebelumnya, pada Q3 2018 telah diadakan beberapa kali pertemuan lanjutan untuk pembahasan beberapa opsi mekanisme pengelolaan pendanaan sebagai alternatif bagi penyaluran dana hibah maupun pinjaman

untuk pengembangan investasi pembangkit RE, yaitu:

1. Pertemuan pembahasan potensi pendanaan untuk 44 proyek EBT yang telah mendapatkan PPA dengan PLN melalui pendanaan EIB pada tanggal 25 Juli 2018 di Hotel Sari Pacific Jakarta yang mengundang Exim Bank dan KADIN.
2. Pertemuan dengan Program Konsultan MCAI (Pak Windhu) untuk mengidentifikasi potensi program RE MCAI yang telah mendapatkan PPA dengan PLN untuk memperoleh pendanaan melalui EIB pada awal bulan Agustus 2018.
3. Pertemuan lanjutan pembahasan potensi pendanaan dari EIB untuk proyek EBT yang telah mendapatkan PPA dengan PLN pada tanggal pertengahan Agustus 2018 di Hotel Sari Pacific Jakarta.
4. Diskusi *teleconference* antara Bappenas, EIB, ICCTF dan Bank Excim untuk pembahasan potensi pendanaan dari EIB untuk proyek EBT yang telah mendapatkan PPA dengan PLN di Bappenas pada pertengahan September 2018.
5. Pertemuan lanjutan bersama Dit. ESDMP untuk pembahasan potensi pendanaan dari EIB untuk proyek EBT yang telah mendapatkan PPA dengan PLN melalui Reksadana di Kantor ICCTF pada akhir September 2018.

Dari berbagai Opsi-opsi yang telah ditelaah lebih lanjut untuk pengembangan mekanisme *Blended Financing* untuk RE tersebut, mekanisme yang dikembangkan untuk pendanaan dari EIB paling potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, akan dilaksanakan beberapa diskusi lanjutan dan penyusunan rekomendasi untuk Menteri PPN/Kepala Bappenas.



Pembukaan acara pembahasan potensi pendanaan untuk 44 proyek EBT yang telah mendapatkan PPA dengan PLN melalui pendanaan EIB.



Pertemuan pembahasan potensi pendanaan untuk 44 proyek EBT yang telah mendapatkan PPA dengan PLN melalui pendanaan EIB.



Pembukaan acara pertemuan lanjutan pembahasan potensi pendanaan dari EIB untuk proyek EBT.



Pertemuan lanjutan pembahasan potensi pendanaan dari EIB untuk proyek EBT.



Diskusi teleconference antara Bappenas, EIB, ICCTF dan Bank Excim untuk pembahasan potensi pendanaan dari EIB untuk proyek EBT.



Peserta Diskusi teleconference antara Bappenas, EIB, ICCTF dan Bank Excim untuk pembahasan potensi pendanaan dari EIB untuk proyek EBT.

Summary Laporan Verifikasi Perhitungan Penurunan Emisi Karbon Program ICCTF 2010-2018

Pada periode Juli-September 2018, ICCTF melakukan verifikasi terhadap penghitungan penurunan emisi CO₂ dari berbagai program dan kegiatan ICCTF pada kurun waktu 2010-2018. Penghitungan penurunan emisi tersebut sebelumnya telah dilakukan melalui serangkaian *workshop* dengan mengundang seluruh *proponent project*. Berdasarkan hasil penghitungan awal, ICCTF berhasil menurunkan emisi sebesar 9.5 juta ton CO₂ equivalen.

Setelah dilakukan verifikasi terhadap 40 proyek mitigasi dan adaptasi, diperoleh hasil penurunan emisi karbon sebesar 9,4 juta ton CO₂ equivalen. Verifikasi dilakukan dengan mengelompokkan kegiatan mitigasi dan adaptasi yang dilakukan ICCTF ke dalam 4 *cluster*, yaitu *peatlands, mangrove, dryland forest* dan *sustainable agriculture*.

Secara rinci, ringkasan penurunan emisi karbon program ICCTF pada kurun waktu 2010-2018 ditampilkan pada tabel berikut.

Cluster Program	Potensial Penurunan Emisi (ton CO ₂ e/ tahun)	Persentase penurunan emisi
<i>Peatland</i>	8.721.385	93%
<i>Mangrove</i>	323.175	4%
<i>Dryland Forest</i>	319.993	3%
<i>Sustainable Agriculture</i>	7	0%
Total	9.364.562	100%

Dari hasil verifikasi tersebut diperoleh gambaran bahwa penurunan emisi karbon terbesar dari proyek ICCTF berasal dari klaster gambut (*peatland*), sebesar 8,7 juta ton CO₂e. Secara total, ICCTF telah berkontribusi terhadap target penurunan emisi karbon dalam NDC sebesar 1%.

Namun demikian, penghitungan karbon yang dilakukan pada kurun waktu 2010-2018 tersebut belum mencantumkan kontribusi dari *window* energi. Kedepan, pemutakhiran hasil capaian penurunan emisi karbon dari berbagai program dan kegiatan ICCTF perlu dilakukan secara berkala, dengan mengikutsertakan penghitungan pada dua *window* lain, yaitu energi dan *marine based*.

Progress Program UKCCU Batch 2 Tahun 2018

Pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia membentuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) sebagai mekanisme keuangan terintegrasi untuk mendukung kebijakan dan program nasional Indonesia mengenai perubahan iklim. Sebagai sebuah Lembaga Wali Amanat Nasional (*National Trust Fund*), misi ICCTF adalah untuk memobilisasi, mengelola, dan mengalokasikan dana dari dunia internasional serta sektor publik dan swasta untuk memfasilitasi pendanaan program dan proyek yang selaras dengan target mitigasi dan adaptasi nasional. Untuk memfasilitasi kegiatan mitigasi dan adaptasi, ICCTF memiliki tiga windows Utama: Mitigasi Berbasis Lahan (*Land Based Mitigation Window*), Konservasi Energi dan Energi Terbarukan (*Energy Window*), serta Ketahanan dan Adaptasi (*Resilience and Adaptation Window*).

Terkait peran dan tanggung jawab ICCTF yang terus berkembang sebagai Lembaga Wali Amanat Nasional dan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, ICCTF saat ini telah menjadi Lembaga Wali Amanat Nasional (*National Trust Fund*) sepenuhnya dengan disahkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2013 dan diperbaharui melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.10 Tahun 2014. Lembaga Wali Amanat (LWA) ICCTF terdiri dari Majelis Wali Amanat (MWA), Pengelola Dana Amanat (PDA), Sekretariat, dan Unit Pendukung Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pada 5 April 2016, ICCTF dan UKCCU telah menandatangani perjanjian kerjasama kontribusi pendanaan dari UKCCU sebesar £ 3.000.000 (tiga

juta pounds sterling) atau senilai Rp 56,5 milyar untuk mendukung ICCTF dalam pelaksanaan program “Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk Mengurangi Emisi di Indonesia melalui Kegiatan Lokal”. Tujuan dari program ICCTF-UKCCU ini adalah untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut melalui kerjasama langsung dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan strategi penanggulangan kebakaran dan mempromosikan praktik-praktik terbaik (*best practices*) di masyarakat. Pada bulan September 2016, ICCTF telah mengadakan *Call For Proposal* untuk Program ICCTF-UKCCU tersebut. Program itu akan dilaksanakan pada 5 lokasi provinsi sebagai berikut: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Masih dalam mendukung Program TEGAK, pada tanggal 1 November 2017 telah ditandatangani perubahan *Grant Agreement* yang telah ditandatangani antara ICCTF dan UKCCU pada tanggal 5 April 2016 dimana dalam perubahan tersebut disebutkan adanya perpanjangan waktu hingga 31 Maret 2019 dengan penambahan dana sebesar £ 1.000.000 hingga berakhirnya program. Oleh karena itu dalam mendukung pelaksanaan program TEGAK telah dilakukan *Call for Institution* yang telah ditutup pada tanggal 7 Mei 2018.

Untuk mendukung pelaksanaan program TEGAK maka dilakukan *Call for Institution* (CFI). Dalam rangkaian kegiatan CFI ini, dilakukan persiapan mulai Februari 2018 dan kegiatan ini selesai tanggal 5 Juni 2018 dengan penandatanganan kontrak kepada proponent yang terpilih. Terdapat 5 proponent yang terpilih, yakni:

No	Lembaga	Judul Kegiatan	Usulan Dana (RP)	Lokasi
1	Yayasan Mitra Insani (YMI)	Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Peningkatan Peranserta Para Pihak dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut Sungai Siak – Sungai Kampar	4.194.233.000	Kab. Pelalawan & Kab. Siak
2	Konsorsium Riau Women Working Group (RWWG)	Perlindungan dan Pengelolaan Gambut oleh Kelompok Perempuan Secara Berkelanjutan Dalam Mengurangi Emisi Dari Karhutla Semenanjung Kampar	2.122.043.500	Kab. Pelalawan & Kab. Siak

3	Konsorsium Perkumpulan Elang	Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Upaya Restorasi berbasis Masyarakat melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk mewujudkan Praktek-praktek Pengelolaan Lahan Gambut secara Berkelanjutan dan Mendukung Program Kabupaten Siak Hijau	1.565.430.000	Kab. Siak
4	P2KLH Universitas Palangkaraya	Implementasi 3R Program Restorasi gambut pada blok A dan E eks Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah	5.178.325.000	Kab. Kapuas
5	KONPHALINDO & Universitas Kristen Palangkaraya (UNKRIP)	Pembasahan dan Pencegahan Kebakaran pada Lahan Gambut	2.412.255.000	Kab. Kapuas & Kab. Barito Selatan
TOTAL			15.472.286.500	

Progress 5 (lima) Program UKCCU Batch 2 Tahun 2018 selama Q3 Tahun 2018 ditunjukkan oleh Tabel berikut:

Proponen	Capaian Program UKCCU Batch 2 selama Q3 2018
Yayasan Mitra Insani	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya draft konsep baseline sosial ekonomi dengan Tim Ahli. Tersusunnya draft SID dan DED sebagai dokumen awal untuk pembangunan sekat kanal sumur bor dan tower. Terlaksananya Ekspose proyek bersama yang dihadiri oleh Bupati Siak sekaligus Gubernur terpilih Propinsi Riau. Terbangunnya 7 <i>pilot sites</i> yang merupakan scaling up dari proyek sebelumnya dan telah dilakukan proses komunikasi dengan desa melalui sosialisasi. Terlaksananya pelatihan <i>Peat Agroforestry Ecosystem</i>. Pelatihan mengenai pelatihan produk hasil <i>agroforestry</i>.
RWWG	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya draft akhir dokumen <i>baseline</i> pengurangan emisi dan sosial ekonomi. Terlaksananya ekspose proyek bersama dan pertemuan para pihak di tingkat Propinsi. Terlaksananya sosialisasi program ditingkat desa. Terbangunnya 2 <i>pilot sites</i> yang akan menggunakan prosedur <i>rewetting</i>. Terlaksananya pelatihan pembuatan sekat kanal. Pelatihan pembuatan sumur bor. Penyiapan lahan pembangunan <i>peat ecosystem agroforestry</i>.
Perkumpulan Elang	<ul style="list-style-type: none"> Telah terlaksananya Sosialisasi Program tingkat desa/kampung, dihadiri 33 orang (25 laki-laki dan 8 perempuan) dari <i>stakeholder</i> terkait (masyarakat kampung, pemerintah kampung, pemerintah kecamatan, Babinsa, PKK, Babinkamtibmas, Bapekam) yang dilaksanakan tanggal 31 Juli 2018. Telah tersusunnya <i>baseline</i> pengurangan emisi dan sosial ekonomi yang dilakukan dalam dua tahap yakni pengumpulan data sekunder dan data primer yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan <i>baseline</i>. Telah terlaksananya ekspose program bersama yang dihadiri 48 orang (39 laki-laki, 9 perempuan). Terbangunnya 6 <i>pilot sites</i> menggunakan aturan dan prosedur mengenai restorasi dan <i>rewetting</i> pada lahan bekas terbakar. Kegiatan ini dimulai dengan persetujuan kepala kampung dan masyarakat. Tersusunnya SOP mengenai pembangunan sekat kanal, sumur bor dan pembangunan tower pemantau kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan pengelolaan <i>website</i> desa, hasilnya terdapat 8 orang terlatih, 6 laki-laki dan 2 perempuan. Dilakukan komunikasi awal terhadap MPA di 6 kampung terkait pelatihan dan pembangunan sekat kanal. Telah ditentukan lokasi pembangunan yang dilaksanakan di 5 kampung intervensi. Telah ditentukan lokasi pembangunan sumur bor di 6 kampung intervensi.

P2KLH	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terbangunnya <i>pilot site</i> di 7 desa yang akan didorong menggunakan prosedur. • Tersusunnya baseline pengurangan emisi dan sosial ekonomi. • Telah dilakukan ekspose proyek dilakukan bersama ICCTF dan BRG serta University of Queensland serta Pemerintah Kabupaten Kapuas. • Telah dilakukan pertemuan tingkat desa. • Telah dilakukan penyusunan rencana aksi desa pengelolaan hutan dan rawa gambut dan telah didiskusikan dengan pemeritah desa dan telah disahkan oleh aparatatur desa. • Telah terpilih dan dilakukan persiapan lokasi pembangunan sekat kanal.
Konphalindo UNKRIP	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersusunnya studi pengurangan emisi dan sosial ekonomi dilakukan 15 orang (8 laki-laki da 7 perempuan). • Telah terbangun 2 desa sebagai <i>pilot sites</i> yang menggunakan prosedur <i>rewetting</i> dengan persetujuan pemerintah desa dan diikuti oleh 73 orang (45 laki-laki dan 28 perempuan). • Pembangunan sekat kanal (telah ditentukan lokasi dan penyusunan dokumen DED) yang disusun oleh 15 orang (8 laki-laki dan 7 perempuan). • Terlaksananya sosialisasi pembuatan sumur bor kepada sebanyak 30 orang dari 2 desa oleh MPA (30 laki-laki). • Telah tersedianya demplot <i>agroforestry</i> di 2 desa hasil diskusi dengan perangkat desa dan masyarakat dengan pembuata demplot dilakukan 14 orang (laki-laki). • Terlaksananya <i>workshop</i> pemantapan pembangunan <i>peat ecosystem agroforestry</i> dengan seluas 25 ha diikuti 50 orang dengan rincian 29 laki-laki dan 21 perempuan. • Telah dilakukan diskusi untuk pengayaan tanaman <i>agroforestry</i> dengan tanaman ekonomi tinggi dilakukan 10 orang (6 laki-laki dan 4 perempuan).

Progress Scale-up Program & Batch 3 Program USAID Tahun 2018

Sekretariat ICCTF telah melaksanakan *Call for Institution* (CFI) untuk program Mitigasi Berbasis Lahan serta Adaptasi dan Ketangguhan dengan pendanaan dari USAID. Terdapat 6 program di bawah proses CFI ini, meliputi 2 di fokus area Adaptasi dan Ketangguhan, serta 4 Mitigasi Berbasis Lahan. Selain itu, Sekretariat ICCTF juga bekerjasama dengan mitra pelaksana tengah mempersiapkan *scaling up* untuk 2 program di bawah *window* Adaptasi dan Ketangguhan.

Dengan proses CFI serta *scaling up* tersebut, secara keseluruhan ICCTF telah mendanai 8 program *Batch 3*, sebagai berikut:

	WINDOW	LOKASI	NILAI PROYEK	PROSES
1	Adaptasi	Gunungkidul, DIY	950,000,000.00	<i>Scaling Up</i>
2	Adaptasi	Gorontalo	900,000,000.00	<i>Scaling Up</i>
3	Adaptasi	Sumba, NTT	400,000,000.00	CFI
4	Adaptasi	Bitung, Sulawesi Utara	1,000,000,000.00	CFI
TOTAL ADAPTASI			2,350,000,000.00	
5	Mitigasi	Magelang, Boyolali, Klaten, Jawa Tengah	400,000,000.00	CFI
6	Mitigasi	Kotawaringin Barat, Kalteng	900,000,000.00	CFI
7	Mitigasi	Kubu Raya, Landak, Mempawah, Kalbar	1,500,000,000.00	CFI
8	Mitigasi	Sumbawa, NTB	1,000,000,000.00	CFI
TOTAL MITIGASI			3,800,000,000.00	
GRAND TOTAL			6,150,000,000.00	

Setelah 8 (delapan) program *Batch 3* terpilih, Sekretariat ICCTF juga telah melaksanakan *Workshop* Pembekalan Manajemen Proyek Program ICCTF-USAID 2018 (*Batch 3*) pada tanggal 9 - 12 Juli 2018 di Hotel Manhattan Jakarta. Para mitra pelaksana mendapatkan peningkatan kapasitas dalam menyusun pelaporan administrasi keuangan dan pelaporan program untuk melaksanakan manajemen proyek ICCTF USAID *Batch 3* kedepan.

Progress pelaksanaan 8 (delapan) proyek *scale-up* program & *Batch* 3 Program USAID Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1 YAKKUM Emergency Unit (YEU)

Capaian Program UKCCU Batch 2 selama Q3 2018

- Pengadaan peralatan produksi pertanian untuk gapoktan berupa 8 unit *handtractor Quick* spesifikasi Cakar Baja. *Handtractor* digunakan untuk memudahkan penggemburan tanah di lahan pertanian pada masa persiapan tanam. Ukurannya dipilih yang kecil, memudahkan untuk menjangkau lahan sempit dan “perengan”.
- Pemberian legalitas 8 kelompok tani dari BPP kecamatan. Pembuatan unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Kegiatan ini ditujukan untuk membuat kemandirian kelompok tani dalam bidang usahanya baik dari sisi permodalan usaha tani maupun peningkatan sumberdaya manusia. Selain itu, UPJA akan menjamin keberlanjutan proyek percontohan.
- Sosialisasi program kepada 20 kelompok tani (tingkat dusun) dari 2 kecamatan yaitu Kec. Panggang dan Purwosari, diluar 8 kelompok *Batch* 1. Anggota satu kelompok mencapai 120 petani.
- Uji kualitas benih di laboratorium menghasilkan daya tumbuh yang tinggi rata-rata 92%. Hal ini memberi keyakinan kepada petugas penyuluh pertanian dan petani untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan benih padi segreng handayani di desa masing-masing.
- Survei lokasi sumber air Cluwakan, Dusun Tegalweru, Desa Tepus, Kec. Tepus. Diskusi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat luas di 4 dusun.



Penyerahan sampel uji kualitas benih padi segreng.



uji coba *handtractor* yang diserahkan kepada 8 kelompok tani.



Sosialisasi perencanaan PATS dan dampak perubahan iklim.



Survei debit air di sumber air Cluwakan.

Capaian Program UKCCU Batch 2 selama Q3 2018

- *Kick off meeting* dengan *stakeholder* provinsi NTT yang dihadiri Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bappeda, Litbangda, UNKRIS Artha Wacana, Dinas Ketahanan Pangan NTT. Bappeda dan OPD sangat antusias untuk mendukung dan berpartisipasi untuk mengembangkan padi SRI.
- Sosialisasi pengenalan SRI kepada 40 orang anggota kelompok tani di Sumba Timur. Kegiatan selanjutnya memutuskan lokasi percontohan di Desa Lambanapu.
- Pemasangan Telemetry dan alat pengukur debit air irigasi di Desa Lambanapu, Kec. Kambera, Kab.

Sumba Timur. Peralatan ini diadakan oleh BPWS NTT bersama Dinas PUPR provinsi NTT. Peralatan pengukur debit air adalah satu diantara 15 unit yang dipasang di Sumba.

- Penanaman demplot padi SRI 0,8 ha di Desa Lambanapu dan desa sekitarnya di Kec. Kambera, Sumba Timur. Pertumbuhan tanaman cukup baik. Penanaman dilakukan pada bulan Agustus dan diperkirakan akan panen pada pertengahan bulan November 2018. Lokasi demplot berada di daerah irigasi Kambaniru yang mengairi 3.000 ha sawah.



Kick off meeting di Bappeda Provinsi NTT.



Persiapan Lahan di Sumba Timur.



Instalasi Telemetry debit air.



Kondisi tanaman di Sumba Timur.

Capaian Program UKCCU Batch 2 selama Q3 2018

Beberapa tahapan sudah dilakukan untuk mempercepat capaian *output* yang direncanakan oleh LOH yaitu:

- Sosialisasi kepada 107 orang anggota kelompok dan *stakeholder* tingkat kabupaten. Proyek mendapatkan dukungan teknis secara penuh dari BKPH Ampang Plampang tentang kerjasama kelompok dan membangun ekowisata, Dinas Pertanian Sumbawa untuk penambahan bibit.
- Sosialisasi di Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir. Desa Labuhan Kuris Kec. Lape. Desa Teluk Santong Kec. Plampang.
- Dilakukan Pelatihan pengelolaan organisasi 25 orang peserta. Praktek pengelolaan organisasi kelompok tani secara mandiri dengan pendampingan bersama LOH dan staf BKPH.
- Dilakukan pendampingan administrasi organisasi di 6 kelompok (2 HKm: Ngali, Olat Rawa).
- Sudah dilakukan survei stok karbon sebagai *baseline* dan sedang dilakukan survei Sosial ekonomi sebagai *baseline*. Saat ini proses penyusunan laporan.
- Pembibitan tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan menunjukkan perkembangan yang baik. Pertumbuhan tanaman cukup baik. Pemeliharaan bibit tanaman *mangrove* sudah dilakukan untuk persiapan rehabilitasi tambak dengan sistem wanamina.
- Setiap kegiatan dilakukan pengambilan gambar untuk bahan pembuatan dokumen film selama proyek berlangsung.
- Sumberdaya lokal: sesuai komitmen maka Dinas Pertanian Sumbawa melakukan pendampingan kelompok dan memberikan bantuan bibit kelapa untuk petani pesisir.
- BKPA Ampang sudah menyiapkan naskah kesepakatan dengan kelompok pengelola, dan mulai membantu bahan untuk pengembangan ekowisata. Ekowisata Teluk Santong kelompok kemitraan dibantu BKPH. Persiapan bantuan peralatan pengolahan hasil pertanian senilai 50 jt.



Kick off meeting di Kabupaten Sumbawa.



Pemetaan partisipatif di kecamatan Lape.



Pendederan tanaman kehutanan.



Pendederan bibit Mangrove.

4 Perkumpulan SESAMI

Capaian Program UKCCU Batch 2 selama Q3 2018

Kegiatan yang dilakukan Perkumpulan Sesami pada Triwulan ketiga adalah:

- Kick off meeting di Ruang rapat Bappeda, Kabupaten Magelang di Kota Mungkid.
- Survei dan penentuan 10 titik calon lokasi *biodigester*
- Pembangunan konstruksi 6 unit *biodigester*. Tiga unit di Dusun Stabelan, Desa Tlogolele, Kec. Selo, Boyolali. Tiga unit di Dusun Grogol, Desa Mangunsoka, Kec. Dukun
- Pemesanan bibit kopi kepada penyedia bibit yang akan dikirim bulan Desember 2018



Kick off meeting di Kabupaten dibuka Kepala Bappeda kabupaten Magelang.



Survei lokasi biodigester.



Survey penentuan lokasi biodigester.



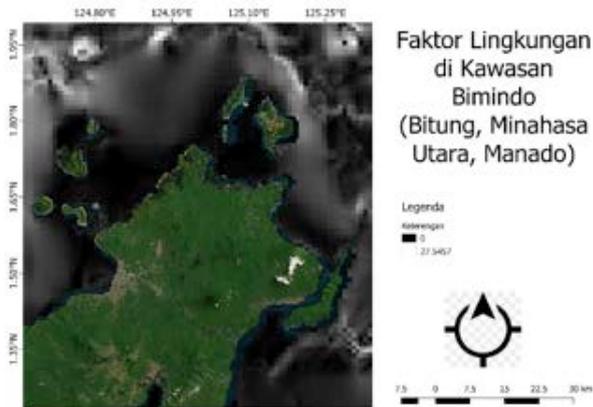
Proses pembangunan biodigester di Boyolali.

5 Yayasan Terangi

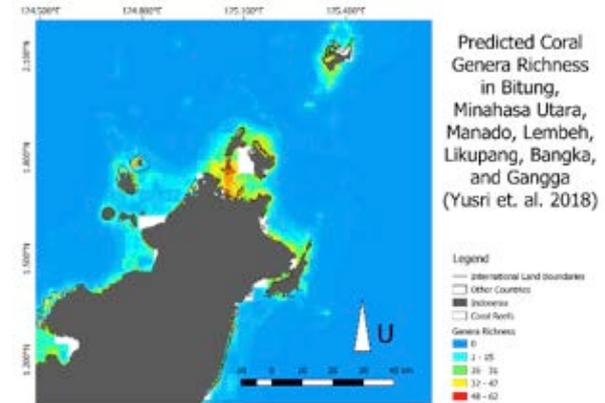
Capaian Program UKCCU Batch 2 selama Q3 2018

- Dalam rangka meningkatkan ketangguhan masyarakat, maka tahap pertama adalah melakukan analisa kerentanan untuk mengukur kepekaan satu sistem terhadap paparan perubahan iklim dan kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Sudah dilakukan survei dan analisis menggunakan 3 metode yang meliputi kuantitatif, kualitatif, dan spasial.
- Sudah dilakukan *workshop* dengan melibatkan *stakeholder* setempat untuk menyusun peta kerentanan dan mendalami bersama opsi adaptasi perubahan iklim bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

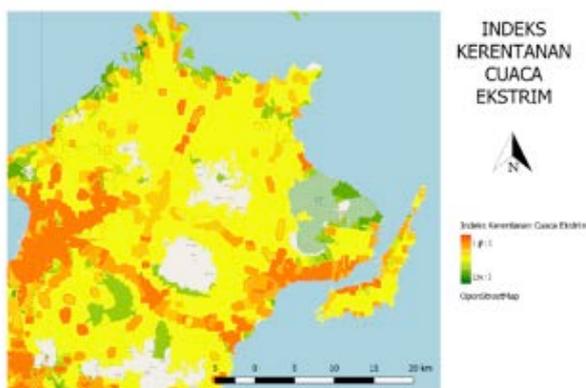
- Sudah dilakukan pembuatan Peta Kerentanan Pulau Lembeh dan Pantai Likupang, Kota Bitung terhadap bencana dan perubahan iklim.
- Sudah dilakukan survei dan pembuatan peta habitat bentik perairan dangkal Pulau Lembeh.
- Sudah dibuat peta kerentanan kawasan (biofisik, sosial, ekonomi) meliputi: Indeks kerentanan banjir, Indeks kerentanan cuaca ekstrim, Indeks kerentanan gelombang dan abrasi, Indeks kerentanan kebakaran hutan dan lahan, Indeks kerentanan kekeringan, serta Indeks kerentanan longsor.
- Kendala dihadapi adalah belum diperolehnya Data Potensi Desa (PODES) tahun 2018.



Peta Kelerengan.



Peta Sebaran.



Resiko Cuaca.



Resiko Gelombang.

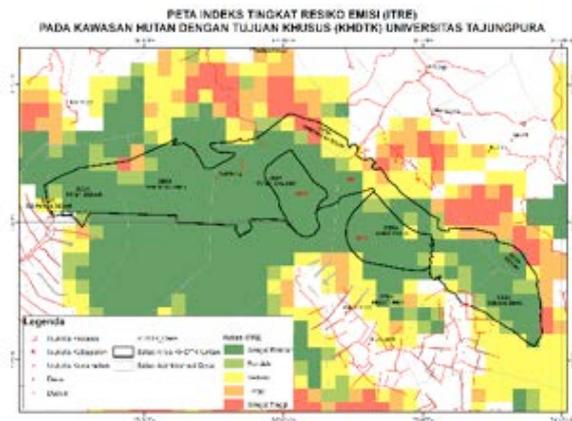
Capaian Program UKCCU Batch 2 selama Q3 2018

- *Kick off meeting* dengan *stakeholder* provinsi Kalbar dilakukan bekerjasama dengan Bappeda Kalbar dan Sekretariat Kantor Gubernur Kalbar. Dalam *Kick off* dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Kalbar dan Bupati. Menteri dan Gubernur sangat mengapresiasi inisiatif FHut UNTAN untuk mengelola KHDTK dengan melibatkan desa sekitar.
- Sudah Tersusun dan disyahkan Rencana Aksi Pengelolaan Gambut KHDTK yang terintegrasi dengan Rencana TRGD Provinsi Kalbar.
- Sudah dilakukan Penandatanganan MOU dan dilakukannya sosialisasi pengelolaan KHDTK antara FHut UNTAN dengan 11 desa yang berbatasan dengan KHDTK.



Kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Kalbar pada pameran peralatan dari FHut UNTAN.

- Sikronisasi peta desa dengan batas KHDTK di Desa Retok, Kab. Kubu Raya, dan Desa Sungai Segak, Kab. Landak.
- Sedang dilakukan survei *baseline* stok karbon dan sosial ekonomi, dan KEHATI.
- Sudah melakukan petroli pencegahan Karhutla khususnya di batas terluar KHDTK. Temuan Penebangan pohon di Desa Sum Sum. Masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.
- Sedang dipersiapkan data untuk pembuatan Peta Indeks Resiko Emisi (ITRE) pada kawasan KHDTK UNTAN untuk dasar pembangunan sumur bor.
- Sudah dilakukan *monev* lapangan pada triwulan pertama untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.



Peta Indeks Tingkat Resiko Emisi (ITRE) KHDTK UNTAN.



Masyarakat membakar lahan untuk pertanian.



Temuan tim patroli, masih ada *illegal logging* di KHDTK.

Capaian Program UKCCU Batch 2 selama Q3 2018

- Dilakukannya koordinasi gapoktan dan penyuluh pertanian, 5 kepala desa, dan Dikas teknis. Koordinasi dilakukan di Kecamatan Arut Selatan.
- Sudah dilakukan persiapan untuk pembangunan demplot mina padi dan pertanian hortikultura organik dengan sistem tanpa bakar (PLTB) di 5 desa Kec. Arut Selatan.
- Dilakukan Pendampingan 9 kelompok tani: (1) Kelompok Tani Wanita Cabe Rawit Desa Mendawai RT 22; (2) Kelompok HKm Sepakat Desa Tanjung Putri; (3) Kelompok Tani Ikan Setia Kawan Desa Tanjung Terantang; (4) Kelompok Tani Hutan Wanita Mandiri Desa Tanjung Putri; (5) Kelompok HKm Tani Sejati Desa Mendawai RT 23; (6) Kelompok HKm Mawar Bersemi Desa Tanjung Terantang; (7) Kelompok Tani Cabe Rawit Desa Mendawai RT 22; (8) Kelompok MPA Cahaya Fajar; dan (9) Kelompok HKm Sei Gandis Desa Mendawai Seberang.
- Pemagangan petani desa Sabuai Timur untuk belajar PLTB di demplot PLTB Desa Tanjung Putri. Hal ini adalah replikasi mandiri oleh petani sekitar Desa Tanjung Putri.



Demplot PLTB Sayuran di Kelompok Tani wanita Cabe Rawit, Mendawai RT 22.



Pertemuan kelompok tani hutan Wanita Mandiri Tanjung Putri.

Progress Program DANIDA pendanaan Baru Tahun 2018

Pada tahun 2017-2018, ICCTF telah mendapatkan dukungan pendanaan dari DANIDA melalui program ESP3 sebesar 2,3 Milyar Rupiah yang diperuntukan bagi dukungan terhadap aktivitas Sekretariat ICCTF. Kegiatan yang telah dilakukan melalui pendanaan ini meliputi dukungan terhadap pengembangan *thematic window* ICCTF, Pengembangan Komunikasi ICCTF, Dukungan Kegiatan Perubahan Iklim Nasional, Peningkatan Kapasitas Staf, Kegiatan *Monitoring & Evaluasi* Program, serta Operasionalisasi Sekretariat ICCTF.

Selanjutnya Pada pertengahan tahun 2018, ICCTF kembali mendapatkan tambahan dukungan pendanaan dari Danida sebesar 2,5 juta DKK (dua setengah juta Danish Kroner) melalui persetujuan yang diberikan oleh

Komite Pengarah Program ESP3 pada pertemuan ke-10 tanggal 8 Mei 2018 tentang usulan realokasi anggaran ESP3 untuk memberikan dukungan bagi ICCTF dalam pelaksanaan program-program inti selama 2018 dan dukungan dalam menyiapkan peta jalan (*Road Map*) untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia/SDG's pada tahun 2030. *Letter of Agreement* (LoA) ICCTF-Kedutaan Besar Kerajaan Denmark tentang "Tambahan dari ESP3 bagi ICCTF untuk Program Inti dan Perumusan Peta Jalan untuk TPB Indonesia Tahun 2017-2030" telah ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2018.

Rencana kerja untuk pendanaan tambahan dari DANIDA tersebut akan digunakan sebagaimana table dibawah ini:

Output	Detailed Activities	Amount IDR	Amount DKK	Timeline Disbursement
1	Communication & Fundraising for ICCTF	2.337.717.606	1.040.332	
1.1.1	Outreach Activity	2.337.717.606	1.040.332	
a	Public Relation Program ICCTF(Talkshow & Segmen Program TV Nasional, Advetorial, Kampanye Publik Perubahan Iklim)	1.013.600.000	451.073	Oct - Nov 2018
b	Website Development (Optimalisasi Digital, Media Social dan Media Monitoring)	63.000.000	28.036	Aug - Oct 2018
c	Audio Visual Production (Motion Graphics Credential)	99.680.000	44.360	Sep - Oct 2018
d	Fund Raising Program ICCTF	597.700.000	265.989	Oct-18
e	Donor Visit	563.737.606	250.875	Nov-18
2	Capacity Develoment Staff ICCTF	330.000.000	146.857	
2.1.1	Capacity Development for Staff - Jasa Konsultan (Soft Skill)	240.000.000	106.805	Sep - Dec 2018
2.1.2	Capacity Development for Staff - Jasa Lainnya (Soft Skill)	90.000.000	40.052	Sep - Dec 2018
3	Audit	150.000.000	66.753	
3.1.1	Independent External Audit	150.000.000	66.753	Nov - Dec 2018
4	Sustainable Development Goals (SDGs)	2.800.000.000	1.246.058	
4.1.1	SDG Roadmap	500.000.000	222.510	Oct - Dec 2018
4.1.2	Spatial and Non Spatial Modeling Projection for Environmental Pillars Goals	1.600.000.000	712.033	Oct - Dec 2018
4.1.3	National Workshop on SDG Roadmap	300.000.000	133.506	Nov-18
4.1.4	Publication Material (Video, Comic dan Cetak Dokumen Roadmap SDGs)	400.000.000	178.008	Oct-18
Total		5.617.717.606	2.500.000	

Perkembangan pelaksanaan kegiatan pendanaan baru Danida selama Q3 2018 adalah sebagai berikut:

- Pengadaan lelang sederhana *Website Development* (Optimalisasi Digital, Media Sosial dan *Media Monitoring*) dengan target pengerjaan selama September – Oktober 2018.
- Pengadaan lelang sederhana *Audio Visual Production (Motion Graphics Credential)* dengan target pengerjaan selama September – Oktober 2018.
- Pengadaan Lelang terbuka *Spatial modelling and database development to support SDGs Roadmap* akan mulai pekerjaan pada Oktober 2018.
- Pengadaan Lelang terbuka *Non Spatial modelling to support Low Carbon Development and SDGs Roadmap* akan mulai pekerjaan pada Oktober 2018.
- Pengadaan Lelang terbuka *Support to SDGs Center in formulating SDGs roadmap 2017-2030* ► Lelang ulang.
- Pengadaan Lelang terbuka *Public relation and outreach program* akan mulai pekerjaan pada November 2018.

Komunikasi & Penjangkauan

1 KOMUNIKASI DAN PENJANGKAUAN PUBLIK

Kegiatan komunikasi ICCTF terbagi atas dua strategi yaitu komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan-kegiatan komunikasi ini, eksistensi ICCTF sebagai satu-satunya lembaga perwalian dana perubahan iklim yang dimandatkan oleh pemerintah di Indonesia diharapkan dapat lebih dikenal dan diakui, baik oleh pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri. Komunikasi internal menyasar seluruh staf ICCTF di semua level untuk meningkatkan manajemen pengetahuan untuk staf tentang visi-misi ICCTF, menginternalisasi nilai-nilai strategis organisasi, dan membangun soliditas staf agar terbangun suatu budaya kerja positif di ICCTF.

Sedangkan untuk kegiatan komunikasi eksternal, ICCTF menekankan pada pengenalan visi-misi organisasi, peranan strategis organisasi, serta eksistensi dan fungsi dari pengembangan program-program ICCTF. Selain itu juga menyebarkan capaian serta pembelajaran program-program ICCTF yang layak untuk disebarluaskan dan direplikasi di daerah lainnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan serupa. Upaya pengenalan dan penjangkauan publik ICCTF dilakukan secara intens dengan pola yang beragam dan target yang variatif. Pola komunikasi yang diterapkan secara umum tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dan ekspose program-program ICCTF, tetapi juga dalam bentuk kunjungan dan liputan media ke lokasi program, *focus group discussion* (FGD), pameran dan seminar, optimalisasi sosial media dan website ICCTF, serta peningkatan relasi dengan media melalui kegiatan *media gathering*. Pada triwulan 3, komunikasi lebih fokus pada komunikasi eksternal melalui penyelenggaraan kegiatan ekspose, pameran, seminar publik, Media

serta keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan bertaraf internasional seperti IMF-WBG Annual Meeting di Bali serta persiapan kegiatan-kegiatan komunikasi ICCTF yang akan dilaksanakan pada Triwulan 4.

Sejak awal tahun 2018, ICCTF melakukan strategi pendekatan komunikasi interaktif dan *real time* melalui pengelolaan media sosial ICCTF yang terdiri atas **Facebook** (<https://www.facebook.com/Indonesia-Climate-Change-Trust-Fund-122147097846153/>); **Twitter** (@ICCTF_ID); **Instagram** (@icctfofficial); **Youtube** (ICCTF) dan **website** ICCTF (<https://www.icctf.or.id/>). ICCTF berupaya untuk selalu mengoptimalkan kanal informasi yang tersedia termasuk media sosial dengan memperbaharui penyebaran konten informasi dan foto-foto kegiatan terkini yang dilakukan oleh ICCTF dan para mitra pelaksana di daerah. Informasi-informasi tersebut dibagikan agar para pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian program ICCTF dan nilai-nilai pembelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan program di tingkat tapak.

Selain optimalisasi media sosial, ICCTF juga melakukan *monitoring* terhadap publikasi dan pemberitaan media yang memuat visibilitas ICCTF, baik di media cetak, elektronik, dan online nasional maupun lokal. Pada Triwulan 3, ICCTF telah terekspose sebanyak empat puluh lima (45) pemberitaan media yang memuat visibilitas ICCTF dan mitra pelaksana di daerah. Diharapkan penjangkauan publik ICCTF akan semakin menguat dengan strategi peningkatan relasi media. Pemberitaan ICCTF tersebut secara rinci dapat dilihat pada lampiran di akhir laporan triwulan 3 ini.

2 MEDIA VISIT ICCTF KE LOKASI PROGRAM RIAU WOMEN WORKING GROUP (RWWG) DI DUMAI, RIAU

Kunjungan dan Liputan Media ke Lokasi Program ICCTF atau biasa disebut "Media Visit ICCTF" merupakan agenda rutin ICCTF yang diselenggarakan setiap tahun. Sejak tahun 2013, ICCTF telah menyelenggarakan Media Visit sebanyak tiga belas (13) kali ke lokasi program yang berbeda-beda. ICCTF melibatkan media, pemerintah daerah, donor, para penerima manfaat, dan seluruh pihak yang terlibat dan terkait untuk saling bertemu dan bertukar informasi pembelajaran program yang telah

dilaksanakan. Media Visit lokasi program ICCTF-RWWG di Dumai, Riau, yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 Juli 2018 merupakan yang kedua sepanjang tahun 2018.

Hingga saat ini ICCTF sudah mendukung pendanaan 76 proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai lokasi di Indonesia meliputi tiga fokus area yaitu, mitigasi berbasis lahan (46), adaptasi dan ketahanan (22), dan energi (8) yang didukung oleh

Kementerian PPN/Bappenas, United States Agency for International Development (USAID), dan The UK Climate Change Unit (UKCCU). Dari 76 proyek melalui dukungan tersebut, 13 proyek tengah berjalan sampai dengan tahun 2018 ini. Untuk mengimplementasikan program-program tersebut di daerah, ICCTF bekerja sama dengan lembaga mitra pelaksana yang terdiri atas Kementerian/Lembaga, LSM/CSO, dan Universitas/Lembaga Pusat Penelitian.

Kegiatan Media Visit ICCTF merupakan sarana ICCTF untuk mensosialisasikan keberhasilan program-program unggulan di lapangan yang dapat menjadi pembelajaran bagi khalayak luas melalui berbagai kanal media. Media massa merupakan salah satu kanal yang tepat karena memiliki jangkauan publik yang lebih luas dengan dampak yang lebih masif karena fungsinya sebagai agen sosialisasi massa. Pada Media Visit ICCTF kali ini, ICCTF berkesempatan membawa rekan-rekan media dan segenap unsur pemerintah pusat, pemerintah lokal, mitra pelaksana serta masyarakat lokal untuk berdialog dan melihat secara langsung hasil dan pembelajaran program ICCTF yang didampingi mitra Riau Women Working Group (RWWG) di Dumai, Provinsi Riau. Program tersebut unik dengan adanya keterlibatan langsung dan aktif dari kelompok perempuan pengelola kolam bioflok dan agroforestri jahe merah di empat kelurahan di Kota Dumai.

Berbicara tentang perempuan yang merupakan pihak yang paling terdampak dan rentan terhadap perubahan iklim, pelibatan perempuan dalam pengelolaan lahan gambut dan penanggulangan perubahan iklim memegang peranan penting. Dengan adanya upaya penanaman jahe merah melalui agroforestri dan budidaya ikan melalui inovasi kolam *biofloc*, para kelompok perempuan memiliki aktivitas alternatif yang dapat melatih kemampuan berorganisasi dan memiliki kegiatan bernilai ekonomi sehingga lebih produktif.

Rangkaian acara media visit ini diawali dengan kegiatan dialog pada tanggal 5 Juli yang dilakukan di pelataran halaman rumah warga di lahan gambut yang sederhana yang berjudul "Dialog dan Sosialisasi Program ICCTF-UKCCU di Dumai, Riau" yang dihadiri oleh Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku Sekretaris MWA ICCTF dan Kepala Bappeda Kota Dumai mewakili Walikota Dumai, serta seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Dumai dan Lurah di empat lokasi program ICCTF.

Acara ini merupakan pembukaan dari serangkaian kegiatan Media Visit ICCTF di Dumai, yang sekaligus menjadi sarana untuk mempertemukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), penerima manfaat

(beneficiaries), akademisi, media, mitra pembangunan, serta pemerintah daerah dan instansi dinas terkait yang dapat digandeng untuk menjaga keberlanjutan program yang digagas RWWG dan didukung ICCTF-UKCCU.

Kurang lebih dua ratus orang memadati halaman rumah yang disulap menjadi ruang dialog bersama untuk membahas program 'Inisiasi Kelompok Perempuan dalam Mengurangi Emisi yang Berasal dari Kebakaran Hutan, Kebun, dan Gambut di Kelurahan Pelintung, Guntung, Mundam dan Teluk Makmur Kotamadya Dumai' yang diimplementasikan oleh mitra pelaksana RWWG.

Hadir memberikan sambutan, selaku tuan rumah, Walikota Dumai yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kota Dumai. Kepala Bappeda Kota Dumai membacakan sambutan dari Walikota Dumai yang apresiasi positif terhadap program ICCTF di Dumai melalui mitra pelaksana Riau Women Working Group (RWWG).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretaris MWA ICCTF, menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang berkontribusi besar dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2010, Presiden RI yakni Bapak SBY berkomitmen menurunkan emisi sebesar 26% di tahun 2020. Kemudian pada tahun 2015, Presiden selanjutnya yakni Bapak Joko Widodo melanjutkan komitmen penurunan emisi GRK yakni 29% pada tahun 2030. Bappenas mulai mengembangkan "*innovative financing*" dan muncul gagasan untuk membentuk *trust fund*. Tujuannya adalah untuk membantu Pemerintah untuk mengejar target penurunan emisi dengan menjadi *pooling fund*. Saat membentuk *trust fund* ini banyak sekali tantangannya karena belum ada lembaga serupa yang dibentuk di dunia. Namun demikian, akhirnya pada tahun 2009 terbentuk ICCTF di bawah manajemen UNDP. Saat berada di bawah manajemen UNDP, ICCTF dapat menyalurkan dana ke kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Namun setelah di bawah manajemen Bappenas sebagai Satker, ICCTF hanya bisa membiayai kegiatan yang proponent-nya adalah non pemerintah. ICCTF mendapat dukungan dari banyak pihak seperti Inggris, Swedia, dan lainnya. ICCTF terus berevolusi hingga akhirnya saat ini berstatus sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian PPN/Bappenas. Harapannya ICCTF kedepan akan lebih mandiri lagi sehingga mempunyai badan hukum sendiri dan menjadi *trust fund* yang benar-benar fleksibel. Hingga saat ini ICCTF sudah banyak mengelola program dan mengelola dana hingga lebih dari 180 milyar rupiah. Dana ini digunakan untuk membantu daerah dengan mendukung organisasi masyarakat sipil (CSO) yang ada di daerah. Meskipun memiliki keterbatasan,

ICCTF tetap dapat membiayai langsung lembaga di daerah seperti Yayorin. Kegiatan Yayorin terkait dengan pengelolaan gambut serta mendukung program yang termasuk dalam prioritas nasional. ICCTF juga bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) sehingga semua kegiatan terkait gambut akan dikoordinasikan dengan BRG. Kegiatan Yayorin adalah kegiatan yang dinilai menghasilkan capaian yang baik. Untuk itu ICCTF melakukan kunjungan dan liputan media ke lokasi proyek Yayorin untuk bisa mengangkat pembelajaran dan *success story* ke masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretaris MWA ICCTF juga menyampaikan tentang sejarah ICCTF yang dibentuk pada tahun 2009 dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah RI dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, menjadikan Indonesia sebagai negara rendah karbon, dan beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. ICCTF mendukung kebijakan perubahan iklim di Indonesia termasuk kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Kebijakan ini akan dituangkan dalam peraturan presiden yang merupakan penyempurnaan dari Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK. Kebijakan ini mempromosikan pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. ICCTF bekerja pada 3 fokus area yakni mitigasi perubahan iklim, energi, serta adaptasi dan ketangguhan. Kegiatan RWWG di Kota Dumai, Provinsi Riau termasuk dalam fokus area Mitigasi Berbasis Lahan. Sejak dibentuk hingga tahun 2018, ICCTF-UKCCU telah mengelola sebanyak 76 proyek yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia mulai dari wilayah Sumatera sampai Papua. Selain proyek RWWG, proyek yang didanai ICCTF di Provinsi Riau adalah proyek dengan FAPERIKA Universitas Riau di Sungai Tohor, Kepulauan Meranti, dan Yayasan Mitra Insani (YMI) di Kabupaten Siak. Kegiatan RWWG merupakan salah satu yang terbaik dari sekian banyak program ICCTF yang didukung pendanaannya oleh UKCCU. ICCTF berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Diharapkan rekan-rekan media



dapat mengangkat keberhasilan program ini sehingga menjadi pembelajaran bagi semua pihak termasuk pemerintah agar dapat dilanjutkan dan direplikasi di wilayah lainnya. Beberapa capaian dari proyek RWWG diantaranya: pelatihan dan pemberdayaan terhadap 4 kelompok perempuan di 4 kelurahan di Kecamatan Medang Kampai), terbangunnya agroforestri di ekosistem gambut dan promosinya melalui penanaman 600 tunas jahe merah dan 1.000 bibit Jelutung, terbangunnya budidaya ikan dengan sistem *biofloc* di kolam terpal oleh 4 kelompok perempuan, tersedianya 12 unit mesin pembuat pelet ikan beserta alat-alat pendukungnya, terbentuknya 4 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di 4 kelurahan yang telah mendapat SK dari kelurahan dan pemberian peralatan pemadam kebakaran, terbangunnya 4 sekat kanal, serta tersampainya diseminasi dan sosialisasi karhutla melalui poster, buku dan video ke sekolah dan puskesmas.

Pada hari kedua, kegiatan terpusat di lokasi agroforestri tanaman jahe merah di Kecamatan Mundam, Dumai, Riau. Salah satu anggota kelompok perempuan di Mundam, Ibu Jojo, berhasil mengembangkan budidaya jahe merah di demplot agroforestri yang terletak di belakang rumahnya. Tim ICCTF dan media, langsung menuju ke demplot agroforestri dan melakukan prosesi pemanenan perdana jahe merah.

Panen simbolik jahe merah tersebut dilakukan oleh Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretaris MWA ICCTF, Direktur Eksekutif ICCTF, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Lurah Mundam bersama perwakilan ibu-ibu Kelompok Perempuan Mundam.

Hasil jahe yang dihasilkan cukup memuaskan, tampak dari umbi-umbi jahe yang terlihat segar dan padat. Jahe merah dipilih sebagai komoditi untuk dikembangkan di Kota Dumai oleh kelompok perempuan dengan pertimbangan bahwa Jahe merah mudah tumbuh di lahan gambut, memiliki nilai ekonomi tinggi dan pilihan produk olahannya cukup banyak.



Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Universitas Tanjungpura, menyelenggarakan acara "Kick Off dan Ekspose Program ICCTF berbasis Mitigasi Lahan dan Gambut di Provinsi Kalimantan Barat" pada Jumat (07/09) di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.

Mitigasi Berbasis Lahan (*land-based mitigation*) termasuk diantaranya pengelolaan lahan gambut, merupakan salah satu fokus kegiatan yang didukung pendanaannya oleh ICCTF di Kalimantan. ICCTF didukung mitra pembangunan USAID dan UKCCU bekerja sama dengan berbagai LSM dan akademisi setempat untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan lahan gambut yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Salah satu program tersebut akan mulai dikerjakan oleh Universitas Tanjungpura bersama Benteng Kalimantan, yang ditandai dengan kegiatan sosialisasi melalui *kick off* program berjudul "Memperkuat Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai Pusat Belajar Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat Melalui Perlindungan dan Pengelolaan Gambut Berbasis Masyarakat". Diharapkan kegiatan ini mendorong munculnya dukungan dan komitmen para pihak, khususnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam mensukseskan implementasi dan pengembangan program hingga berkelanjutan.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik inisiasi program yang diusung oleh Universitas Tanjungpura melalui pendanaan ICCTF dan seluruh jajaran dinas terkait diharapkan mendukung penuh implementasi program ini", tegas Sutarmidji, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Komitmen para pihak yang berada di dalam/sekitar KHDTK dan sinergitas program dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Kabupaten penting dalam upaya mendukung perlindungan dan pengelolaan gambut di KHDTK guna mencegah laju deforestasi dan degradasi hutan.

Program tersebut sejalan dengan Komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim yang ditindaklanjuti melalui implementasi kebijakan dan rencana aksi yang komprehensif. Kementerian PPN/ Bappenas sebagai sistem integrator berperan penting memastikan upaya tindak lanjut komitmen tersebut dengan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyampaikan dalam pidato

sambutannya, "Inisiasi arah kebijakan pembangunan Indonesia yang mengusung keseimbangan pilar pembangunan berkelanjutan dalam kerangka Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang rendah emisi karbon".

Dalam upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi pada tingkat implementasi di lapangan, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2009 membentuk ICCTF sebagai alternatif mekanisme pembiayaan untuk perubahan iklim. ICCTF dibentuk untuk memobilisasi semua bentuk dukungan pendanaan, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah melalui skema yang ada, sehingga dukungan pendanaan tersebut dapat terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan.

"ICCTF tidak semata berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, melainkan juga menyoroti aspek-aspek penting lainnya dari kehidupan masyarakat secara terintegrasi. Sehingga program-program ICCTF menjadi pilot project dari pembangunan rendah karbon", Bambang Brodjonegoro menambahkan.

ICCTF melaksanakan berbagai kegiatan yang selaras dengan strategi pemerintah dalam restorasi gambut yang meliputi prinsip 3R (*rewetting, revegetation, revitalization*). ICCTF, sejak tahun 2010 telah mendanai 76 kegiatan mitigasi berbasis lahan, adaptasi dan energi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dilakukan termasuk peningkatan tata kelola hutan dan lahan gambut, peningkatan ketangguhan dan kapasitas adaptif masyarakat lokal, peningkatan ekonomi lokal, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan kebijakan dan peraturan.

Selama 9 tahun, ICCTF telah mendukung Pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. ICCTF telah melakukan berbagai program penanganan perubahan iklim utamanya yang berfokus pada mitigasi berbasis lahan serta peningkatan adaptasi dan ketangguhan. Salah satu fokus area yang perlu diperkuat dan dikembangkan ICCTF adalah pengembangan energi terbarukan dan kelautan-perikanan. Melalui upaya transformasi kelembagaan yang sistematis, sinergi dan koordinasi dengan seluruh elemen, baik pemerintah maupun swasta, diharapkan ICCTF dapat menjadi salah satu lembaga pendanaan perubahan iklim yang diakui secara nasional maupun internasional.



4 ICCTF DAY 2018: ICCTF MEDIA AWARD & GREENITATIVE CHALLENGE AWARD

Dalam rangka penjangkauan publik dan potensi donor yang lebih luas lagi, ICCTF menyelenggarakan kegiatan yang terdiri atas beragam agenda dalam satu kegiatan berjudul "ICCTF Day 2018". Acara ini merupakan ajang untuk mengekspos pencapaian program-program penanggulangan perubahan iklim yang telah dilakukan ICCTF bekerja sama dengan mitra pelaksana di daerah. Acara diisi dengan beragam kegiatan seperti: a) Pameran dan Ekspose Hasil Capaian Program ICCTF; b) Diskusi Panel tentang "Arah Kebijakan dan Potensi Pendanaan untuk *Renewable Energy* dalam Mendukung *Low Carbon Development Plan* (PPRK)"; dan c) Seminar Hasil Program ICCTF USAID dan UKCCU. Acara ini akan dilaksanakan selama satu hari dan terbuka untuk umum, yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 di Jakarta dengan tema "*Best Practices Collaboration on Indonesia Low Carbon Development Plan*". Kegiatan ini ditargetkan untuk menjangar lebih dari 200 target audiens yang berasal dari komponen Kementerian/Lembaga terkait, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO/LSM), Akademisi, Mitra Pembangunan, Donor, serta pemerhati lingkungan.

Dalam rangkaian agenda ICCTF Day tersebut, ICCTF turut menyelenggarakan kompetisi berjudul "ICCTF Media Award 2018" dan "ICCTF Greeninitiative Challenge Award 2018". Penganugerahan pemenang kedua kompetisi tersebut akan dilakukan pada saat hari pelaksanaan ICCTF Day, 31 Juli 2018.



ICCTF Media Award 2018

ICCTF Media Award merupakan penghargaan karya liputan jurnalis media yang memuat berita tentang program-program penanggulangan perubahan iklim, khususnya program ICCTF. Tujuannya adalah lebih menggalakkan peran aktif media dalam mengedukasi dan menyebarkan informasi terkait isu perubahan

iklim dan lingkungan. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah kompilasi karya jurnalistik, baik foto, tulisan maupun multimedia yang berkualitas yang memuat program-program penanggulangan perubahan iklim, khususnya program ICCTF di seluruh Indonesia. ICCTF bekerjasama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) dalam penyelenggaraan dan penjurian ICCTF Media Award 2018. Dewan Juri yang diusulkan berasal dari kalangan jurnalis senior serta praktisi bidang komunikasi yang terdiri atas Priyambodo R.H. (pengajar dan direktur eksekutif LPDS periode 2008-2018), Budiman (wartawan senior Media Sains) & Emilia Bassar (ahli bidang komunikasi dan PR). Penganugerahan Media Award diberikan kepada Pemenang 1 Bagus Supriadi dari Harian Jawa Pos-Radar Jember, Pemenang 2 Lusya Arumingtyas dari Mongabay, Pemenang 3 Christopel Paino dari Mongabay.



Greeninitiative Challenge Award

ICCTF bermaksud untuk mengajak generasi muda atau komunitas peduli lingkungan di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kompetisi Kampanye Kreatif Perubahan Iklim bertajuk "ICCTF Greeninitiative Challenge 2018". Tujuannya adalah ICCTF melalui kegiatan ini turut mengedukasi publik tentang pentingnya memahami perubahan iklim dan berkontribusi melalui tindakan nyata meminimalisir dampak perubahan iklim. Selain itu juga membuka ruang dan jaringan yang lebih luas untuk peluang-peluang ICCTF untuk melakukan kerja sama eksternal. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah ide dan gagasan kampanye kreatif tentang perubahan iklim, serta jaringan komunitas masyarakat peduli lingkungan di tingkat lokal untuk menjalankan kampanye-kampanye program ICCTF. Dalam menjalankan kegiatan ini, ICCTF

bekerja sama dengan Vanantara Communications. Dewan juri yang dipilih berasal dari kalangan praktisi lingkungan dan komunikasi yang berpengalaman di bidangnya antara lain, Gita Syahrani (Direktur Eksekutif Lingkaran Temu Kabupaten Lestari), Melda Wita Sitompul (Managing Director Econusa Foundation) dan Jatna Supriatna (Akademisi, Kepala Pusat Penelitian Perubahan Iklim UI). Penganugerahan Pemenang Greeninitiative Award diberikan kepada Komunitas Kemangteer dan I Love Tenaga Surya.

ICCTF Day 2018 merupakan sebuah ajang untuk mensosialisasikan upaya-upaya penanggulangan perubahan iklim yang telah dilakukan ICCTF melalui implementasi program di berbagai daerah di Indonesia yang diselenggarakan di Bappenas, 31 Juli 2018.

Acara bertajuk ICCTF Day 2018: "*Best Practices Collaboration on Indonesia Low Carbon Development Plan*" yang dibuka oleh Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas ini terbuka untuk umum. Pameran Hasil Capaian Program ICCTF, Pameran Foto, Diskusi Panel "Arah Kebijakan dan Potensi Pendanaan untuk *Renewable Energy* dalam Mendukung *Low Carbon Development Plan*", serta Seminar Hasil Program ICCTF-USAID dan ICCTF-UKCCU mewarnai rangkaian kegiatan ICCTF Day tersebut.

Dalam pidato sambutannya, Gellwyn Jusuf, Sekretaris Menteri PPN/Bappenas menyatakan bahwa "Komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim ditindaklanjuti melalui implementasi kebijakan dan rencana aksi yang komprehensif. Bappenas sebagai sistem integrator berperan penting memastikan upaya tindak lanjut komitmen tersebut dengan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial. ICCTF dibentuk untuk memobilisasi semua bentuk dukungan pendanaan, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah melalui skema yang ada, termasuk *blended finance*. Dengan demikian, dukungan pendanaan tersebut dapat terkoordinasi, efektif dan berkelanjutan".

"Semoga Kegiatan hari ini dapat menjadi salah satu sarana untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim", tambah Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretaris MWA ICCTF dalam pidatonya mewakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

ICCTF, sejak tahun 2010 telah mendanai 76 kegiatan mitigasi berbasis lahan, adaptasi dan energi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dilakukan termasuk peningkatan tata kelola hutan dan lahan gambut, peningkatan ketangguhan dan kapasitas adaptif masyarakat lokal, peningkatan ekonomi lokal, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan kebijakan dan peraturan.

Selama 9 tahun, ICCTF telah mendukung Pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. ICCTF telah melakukan berbagai program penanganan perubahan iklim utamanya yang terfokus pada mitigasi berbasis lahan serta peningkatan adaptasi dan ketangguhan. Salah satu fokus area yang perlu diperkuat dan dikembangkan ICCTF adalah pengembangan energi terbarukan. Melalui upaya transformasi kelembagaan yang sistematis, sinergi dan koordinasi dengan seluruh elemen, baik pemerintah maupun swasta, diharapkan ICCTF dapat menjadi salah satu lembaga pendanaan perubahan iklim yang diakui secara nasional maupun internasional.

Direktur Eksekutif ICCTF, Tonny Wagey, menambahkan "Kegiatan ICCTF tidak semata berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca, melainkan juga pada aspek penting lainnya. Ke depan, ICCTF akan mengembangkan dua potensi utama yang belum dimanfaatkan secara optimal yaitu, pengembangan energi terbarukan dan *blue carbon*". ICCTF terus berinovasi mengembangkan skema pendanaan yang sesuai melalui kerja sama dengan berbagai pihak, sehingga dapat mendukung pemerintah dalam mencapai target di tahun 2025.



Kemitraan Menuju Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Berbasis Sains

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersama dengan mitra-mitra pembangunan bekerjasama untuk mendukung inisiatif perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK). Kemitraan ini terdiri dari institusi pemerintahan, lembaga riset, mitra pembangunan, organisasi internasional, sektor swasta, serta tokoh-tokoh pembangunan terkemuka. Hasil dari kemitraan ini diharapkan akan mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJMN) 2020-2024 yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk pembangunan rendah karbon. Proses kemitraan ini dibangun berbasis sains dan ilmu pengetahuan sebagai panduan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Inisiatif Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia diluncurkan pada Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Perubahan Iklim (COP 23 UNFCCC) pada tahun 2017 di Bonn, Jerman. Prakarsa ini merupakan strategi yang berisi pendekatan penyusunan kebijakan-kebijakan mengenai pertumbuhan ekonomi, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Pendekatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara di barisan terdepan yang menciptakan masa depan dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan pembangunan Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal ini akan diperkuat di RPJMN 2020-2024 yang berlandaskan pada kajian mendalam untuk mewujudkan keseimbangan antara target pembangunan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bambang Brojonegoro.

Pembangunan Rendah Karbon Indonesia akan berlandaskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yakni rangkaian analisis dan permodelan yang sistematis, komprehensif, dan partisipatif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

KLHS dilakukan dengan pendekatan permodelan dinamika sistem untuk mengevaluasi dampak kebijakan,

rencana, dan program (KRP) terhadap indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kajian juga menangkap informasi spasial untuk menganalisis batas-batas biofisik untuk perencanaan pembangunan. Hasil dari KLHS akan melahirkan skenario kebijakan lintas sektor guna mencari pilihan-pilihan kebijakan yang dapat mencapai target pembangunan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan menjamin pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. KLHS juga akan dilengkapi dengan pemodelan investasi untuk menunjukkan angka kebutuhan dan kesenjangan dana pembangunan untuk sektor-sektor seperti energi, kehutanan, dan perikanan, sehingga pemerintah dapat menggalakkan mobilisasi investasi pembiayaan pembangunan rendah karbon Indonesia secara lebih masif.

Kemitraan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon didukung oleh tokoh-tokoh pembangunan terkemuka, atau disebut Duta Pembangunan Rendah Karbon, yaitu Profesor Boediono, Profesor Mari Elka Pangestu, dan Profesor Lord Nicholas Stern.

"Melaksanakan pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita, generasi sekarang, kepada generasi mendatang. Semua pemangku kepentingan harus bersedia bersinergi dan bekerja sama. Sektor publik harus satu visi: kebijakan pemerintah antar kementerian dan lembaga dan antara pusat dan daerah harus sinkron. Dunia usaha harus sungguh-sungguh membangun mata rantai pasok yang ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien energi, dan rendah emisi. Masyarakat, sebagai warga negara dan sebagai konsumen, harus aktif mengawasi pemerintah dan bisnis. Jangan sampai nantinya kita dicap sebagai generasi yang alpa akan tanggung jawab sejarahnya," ujar Prof. Boediono, Wakil Presiden RI ke-11 dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan dana yang besar dan tidak akan cukup jika hanya dari anggaran pemerintah maupun dana pembangunan dari lembaga internasional. Pendanaan harus bisa melibatkan berbagai sektor.

"Pembangunan rendah karbon harus diiringi dengan penguatan dan peningkatan investasi dari berbagai pihak. Lembaga keuangan, dana investasi, swasta, dan organisasi di bidang pendanaan iklim dapat ikut serta bersama-sama, menyajikan, dan menggerakkan modal, informasi, insentif, dan fasilitas untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi yang efisien

dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan skema-skema investasi baru yang didukung melalui kebijakan yang menciptakan kepastian investasi rendah karbon dalam jangka panjang, sistem insentif dan disinsentif yang tepat, untuk mengalakkan investasi yang menunjang pembangunan rendah karbon yang nyata dan berdampak luas,” ujar Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ke-13 dan Menteri Perdagangan RI ke-30.

Pembangunan Indonesia hingga saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, yakni di atas 5% pada tahun 2016 dan 2017. Akan tetapi, saat ini, kemampuan sumber daya alam kita terus menurun akibat beragam tekanan seperti urbanisasi, limbah dan pencemaran udara, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan. Kualitas keanekaragaman hayati kita pun menurun. Pertumbuhan ekonomi ini tidak akan dapat dipertahankan jika mengabaikan kemampuan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup kita.

“Pembangunan rendah karbon adalah kisah pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di abad ke-21. Banyak kesempatan besar bagi Indonesia, dan Indonesia menjadi contoh yang baik dengan menerapkan pembangunan rendah karbon,” ujar Lord Nicholas Stern, Komisioner Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, *co-chair* Komisi Global untuk Ekonomi dan Iklim, Profesor Ekonomi dan Pemerintahan di London School of Economics (LSE).

Kemitraan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dengan dukungan dari pemerintah Jerman, Inggris, Norwegia, Denmark, dan Jepang, serta berbagai institusi seperti International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), New Climate Economy, WRI Indonesia, Global Green Growth Institute, World Agroforestry Centre, ESP3 – DANIDA Environmental Support Programme, System Dynamics Bandung Bootcamp, dan Sarana Primadata



Networking

Networking merupakan salah satu asset dalam menjalankan sebuah bisnis. Semakin luas *networking* yang dimiliki, semakin besar probabilitas untuk berhasil dalam bisnis. *Networking* adalah membangun kepercayaan, membangun hubungan, tanpa ada kepercayaan tidak ada deal dalam bisnis, kata kunci membangun kepercayaan adalah adaptasi, sejauh mana kita beradaptasi dengan organisasi lain, sejauh itulah kepercayaan dapat dibangun.

Pada Q3 tahun 2018, ICCTF telah melaksanakan beberapa aktivitas untuk lebih memperkuat dan memperluas jaringannya melalui:

1 Pertemuan antara Bappenas, BRG, Proponen ICCTF dengan Organisasi Perangkat Daerah di Palangkaraya

ICCTF bekerjasama dengan Universitas Palangkaraya (UPR), Universitas Kristen Palangkaraya (UNKRIP), Badan Restorasi Gambut (BRG) dan University of Queensland menyelenggarakan *Kick Off* terkait Program “Implementasi Program Restorasi Gambut di KHG Kapuas - Barito, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah”. *Kick off* tersebut dilaksanakan selama 2 hari, 5-6 Juli 2018 di Ruang Rahan, Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya.

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk (1) Membangun komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan Program Restorasi Gambut di Indonesia khususnya di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (2) Mensosialisasikan Program BRG-RI, ICCTF/Bappenas tentang Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut di Kalimantan Tengah Tahun 2018, mendukung program BRG, (3) Mensosialisasikan Program University of Queensland Australia bekerjasama dengan Universitas Palangka Raya tentang

pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut, Pengembangan Mata pencaharian masyarakat, serta kegiatan-kegiatan penelitian terkait pengembangan komoditi unggulan lokal di Kalimantan Tengah, dalam rangka mendukung program BRG-RI.

Sejak tahun 2016, ICCTF memiliki kegiatan melalui Program “Tata kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk Mengurangi Emisi di Indonesia melalui Aktifitas Lokal (TEGAK)”.

Sebagai komitmen ICCTF terhadap Restorasi gambut di Kalimantan Tengah, pada tahun 2018-2019 ini ICCTF bekerjasama dengan P2KLH UPR dan UNKRIP akan melaksanakan program TEGAK *Batch* II dengan target tersusunnya 1 (satu) dokumen rencana aksi yang disusun di Kalimantan Tengah, termasuk Surat Pernyataan dari Gubernur dan Pemangku Kepentingan, terbangunnya 10 (sepuluh) *pilot sites*/desa yang menggunakan aturan dan prosedur mengenai restorasi



dan *re-wetting* di lahan bekas kebakaran melalui SOP dan EWS, terbangunya 60 (enam puluh) sekat kanal; 4 (empat) km penimbunan kanal tersier; Terbangunya 220 (dua ratus dua puluh) sumur bor; dan 2 (dua) tower pemantauan kebakaran hutan dan lahan di masing-masing provinsi target.; terbangunya 2 (dua) *peat ecosystem agroforest* yang dibangun melalui pembangunan minimal 5 (lima) demplot di 5 (lima) pilot sites/desa; pengkayaan tanaman 100 (seratus) ha di tiap target provinsi/KHG dengan menggunakan model-model agroforest.

Dalam kegiatan ini juga diundang *stakeholder* terkait yakni Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Bappeda Kabupaten Kapuas, TRGD Provinsi Kalimantan Tengah, KPHL Kahayan, UNOPS dan BOSWA. Kegiatan

Restorasi Gambut di KHG Kapuas-Barito ini disambut baik oleh *stakeholder* dalam upaya pengelolaan hutan dan lahan gambut.

Pada hari kedua, kegiatan *Kick off* dilakukan kunjungan lapangan di lokasi proyek yakni KHG Kapuas Barito. Kegiatan ini diawali melalui audiensi dengan Pemerintah Kecamatan Mantangai yang merupakan lokasi yang akan menjadi kegiatan restorasi gambut. Pemerintah Kecamatan saat audiensi, menyatakan, bahwa sangat mendukung kegiatan yang dilakukan ICCTF, BRG dan University of Queensland untuk melakukan restorasi gambut di wilayahnya. Selain itu, Camat Mantangai, Yanmarto, SH, M.Hum, menyampaikan harapannya juga terkait peningkatan ekonomi melalui kegiatan *agroforestry*.



Acara *workshop* dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 11 – 13 Juli 2018 di Golden Tuli Bay View Hotel, Bali. Tujuan dari *workshop* ini adalah: Mensosialisasikan sistem PEP *Online*, Mengevaluasi hasil perhitungan BAU *Baseline* dan Skenario Aksi Mitigasi, Melakukan penyusunan pelaporan PEP RAD-GRK sampai dengan tahun 2017, Menyusun draf 0 kaji ulang RAD-GRK, Meningkatkan kapasitas Pokja RAD-GRK dan Memainstreaming dokumen RAD-GRK kedalam RPJMD Provinsi. Acara ini didukung oleh para fasilitator yang berasal dari: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Restorasi Gambut, ICRAF, USAID-ICED, GIZ dan Sekretariat RAN-GRK.

Workshop dibuka oleh Direktur Lingkungan Hidup Bappenas dan dilanjutkan dengan *talkshow* dari beberapa perwakilan K/L teknis dan pembelajaran dari beberapa daerah. Dilanjutkan proses pendampingan masing-masing sektor, dimulai dengan evaluasi hasil pelaporan PEP *Online* dan dilanjutkan dengan evaluasi penyusunan draf 0 kaji ulang RAD-GRK, evaluasi perhitungan BAU *Baseline* dan Skenario Aksi Mitigasi dari tiap Provinsi untuk bidang kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, transportasi dan pengelolaan limbah. Sedangkan untuk sektor kelautan dan pesisir kegiatan pendampingan dilakukan untuk mengumpulkan data dari provinsi untuk membangun perhitungan BAU *Baseline* khususnya *baseline* emisi *below ground* dari *mangrove/soil* pada *mangrove* dan *baseline* emisi dari lamun.

Dari hasil *workshop* ini, Provinsi yang berhasil menyelesaikan draf 0 kaji ulang RAD-GRK hingga bab 3 adalah:

- Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut 27 Provinsi
- Bidang Pertanian 16 Provinsi
- Bidang Energi 25 Provinsi
- Bidang Transportasi 11 Provinsi
- Bidang Pengelolaan Limbah 23 Provinsi
- Bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir merupakan sektor baru dalam kelompok kerja RAN/RAD-GRK, bidang ini masih fokus kepada penyusunan BAU *baseline* emisi.

Tindak lanjut setelah *workshop* ini adalah:

- Pendataan Pokja RAD-GRK untuk komunikasi grup;
- Melakukan pendampingan khusus untuk provinsi yang belum memfinalisasi Kaji Ulang dan melaporkan PEP *Online*;
- Melibatkan kabupaten/kota dalam pengisian PEP *Online*;
- Bappeda mengkoordinir kegiatan *Focus Group Discussion* untuk pembahasan hasil *workshop* di Bali;
- Konsultasi dengan Sekretariat RAN-GRK dalam penyusunan kaji ulang RADGRK;
- Hasil *workshop* di Bali sebagai bahan diskusi Pokja RAD-GRK didaerah dengan melibatkan Kabupaten/kota;
- Daerah bisa meminta Sekretariat RAN-GRK untuk pendampingan Kaji Ulang dan Pelaporan PEP *Online*;
- Rakor dengan K/L dan Mitra Pembangunan sebagai tindak lanjut *workshop* di Bali.



Pembahasan Penyusunan Model Pembangunan Terintegrasi Indonesia 2045, Roadmap SDGs 2030 dan KLHS RPJMN 2020 – 2024 dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Juli 2018 di Hotel Courtyard by Marriott Bandung. Acara ini bertujuan untuk mengupdate perkembangan Penyusunan Model Pembangunan Terintegrasi Indonesia 2045, Roadmap SDGs 2030 dan KLHS RPJMN 2020 – 2024 serta menyusun rencana tindak lanjut untuk penyusunan booklet KLHS-PPRK-SDGs. Direktur Lingkungan Hidup Bappenas membuka acara dan memberikan arahan agar para pihak terkait yang hadir dalam pertemuan ini dapat melaporkan dan menyampaikan perkembangan hasil kajian yang sedang dilakukan oleh masing-masing institusi.

Masing – masing lembaga menyampaikan perkembangan kajiannya dimulai dengan Sekretariat RAN-GRK yang menyampaikan update perkembangan penyusunan Perpres PPRK dimana telah melalui rapat PAK lebih dari 7 kali. Sekretariat RAN-GRK akan melaksanakan rapat PAK lanjutan untuk menyempurnakan draft Perpres PPRK tersebut. Selanjutnya, Tim Pemodelan Non Spasial menyampaikan update kajian untuk mendukung penyusunan Model Pembangunan Terintegrasi Indonesia 2045. Simulasi kebijakan yang mempertimbangkan data mikro dan makro telah dikembangkan. Hasil kajian akan terus disempurnakan dan dikembangkan dengan input data-data terbaru selanjutnya.

Tim Pemodelan Spasial menyampaikan update kajian spasial untuk mendukung penyusunan Model Pembangunan Terintegrasi Indonesia 2045. Data-data telah diinput berdasarkan hasil kajian non spasial

sebelumnya menjadi keluaran peta-peta spasial untuk menggambarkan simulasi kebijakan dimasa mendatang (2045). Hasil peta ini akan terus dikembangkan lebih lanjut untuk penyempurnaan simulasi kebijakan yang direncanakan. Sedangkan Sekretariat RAN-API dan tim kajian adaptasi ITB memaparkan perkembangan hasil kajian kerentanan dan dampak yang telah dilakukan. Hasil kajian ini juga memuat peta-peta sebaran dampak dan kerentanan secara nasional yang dapat dijadikan acuan bagi daerah untuk menyusun perencanaan wilayah yang lebih adaptif perubahan iklim.

Pemaparan berikutnya adalah Sekretariat SDGs yang menyatakan telah menyelesaikan dokumen baseline roadmap SDGs pada bulan Juli 2018. Kedepannya akan dikembangkan penyusunan scenario roadmap SDGs untuk mencapai seluruh target indicator yang ditetapkan yang salah satunya akan mengintegrasikan kajian pemodelan pilar lingkungan kedalam roadmap tersebut. Pada akhir diskusi, ICRAF dan WRI menyampaikan perkembangan model kajian terutama lahan untuk mendukung KLHS untuk RPJMN 2020-2024. Kajian ini terutama focus pada isu Low Carbon Development. Kajian akan disempurnakan untuk menuju parallel event annual meeting IMF/World Bank dibulan oktober 2018.

Seluruh update yang disampaikan akan menjadi masukan dalam penyusunan booklet serta presentasi baseline scenario dan kebijakan KLHS-PPRK-SDGs. Booklet akan terdiri dari pengantar, pendahuluan, metodologi, indikator, baseline, scenario kebijakan, ringkasan dan penutup. Sedangkan presentasi akan terdiri dari 17 slide utama yang memuat proyeksi-proyeksi untuk semua sektor terkait.



Pada periode Januari - Agustus 2018, ICCTF bersama RAN-GRK dan RAN-API telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan ICCTF baik dengan sumber pendanaan APBN serta pendanaan hibah DANIDA, USAID dan UKCCU. Untuk mengetahui capaian dan perkembangan kegiatan 3 Sekretariat pada awal triwulan 3 tahun 2018, MWA ICCTF dan PPK Satker MWA ICCTF bermaksud menyelenggarakan pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kegiatan lingkungan hidup di 3 Sekretariat tersebut. Pertemuan ini diperlukan untuk membahas capaian, kendala serta menyusun rencana tindak lanjut untuk sisa waktu pelaksanaan kegiatan di tahun 2018.

Ada tiga tujuan dalam kegiatan tersebut yakni mengevaluasi capaian dan perkembangan kegiatan 3 Sekretariat pada pasca Triwulan 2 Tahun 2018 (Juli - Agustus); menyusun Rencana Strategis Penyerapan Anggaran Agustus - Desember 2018 untuk 3 Sekretariat dan kunjungan Lapangan Pemeriksaan dan Penelitian BMN Proyek Swakelola dengan Yayasan Tiara Pusaka ke Pulau Saparua.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin-Rabu, 13-15 Agustus 2018. Pada hari pertama dilakukan paparan Progress Capaian Keuangan Direktorat LH (Dit. LH, ICCTF, RAN GRK dan RAN API); Paparan Progress

capaian kegiatan Sekretariat ICCTF (Matriks capaian program dan keuangan untuk masing-masing kegiatan); Paparan Progress capaian kegiatan Sekretariat RAN GRK 2018 (Matriks capaian program dan keuangan untuk masing-masing kegiatan); Paparan Progress capaian kegiatan Sekretariat RAN API 2018 (Matriks capaian program dan keuangan untuk masing-masing kegiatan) dan FGD Penyusunan Rencana Strategis Penyerapan Anggaran Agustus - Desember 2018. Pada hari kedua dilakukan Pemaparan Rencana Strategis Penyerapan Anggaran Agustus - Desember 2018 Sekretariat ICCTF; Pemaparan Rencana Strategis Penyerapan Anggaran Agustus - Desember 2018 Sekretariat RAN GRK; Pemaparan Rencana Strategis Penyerapan Anggaran Agustus - Desember 2018 Sekretariat RAN API dan Kunjungan ke pasar Farm Market yang menampung Sayuran organik hasil proyek swakelola ICCTF dengan Yayasan Tiara Pusaka.

Hasil kegiatan ini telah tersampaikan hasil kinerja baik program dan keuangan Sekretariat ICCTF, RAN API dan RAN GRK Bulan Januari-Agustus 2018; rencana strategi Sekretariat ICCTF, RAN API dan RAN GRK pada Bulan September - Desember 2018 serta pembelajaran pemasaran sayuran organik di Farm Market.

UCLG ASPAC Congress adalah acara dua tahunan yang mempertemukan aktor-aktor kunci pembangunan di negara-negara Asia dan Pasifik. Kongres diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan diselenggarakan bersama dengan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC). Diharapkan bahwa Kongres akan menjadi ajang bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar gagasan dan pengalaman serta menjalin kemitraan baru untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam pencapaian agenda global melalui pemerintah lokal termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Agenda Urban Baru (NUA) di wilayah Asia Pasifik. Kongres dua tahunan ini adalah salah satu kegiatan terpenting dari UCLG ASPAC. Lebih dari 1.000 peserta berkumpul dari seluruh Asia Pasifik dan daerah lain, yang berasal dari kota-kota besar dan kabupaten, perwakilan dari pemerintah nasional, universitas dan organisasi penelitian, badan regional dan internasional, organisasi non-pemerintah dan sektor swasta.

KONGRES UCLG ASPAC ke-7 berisi rangkaian kegiatan, mulai dari High Level Session yang menyoroti perkembangan perkotaan terkini serta inovasi dan aplikasinya, termasuk juga berbagai sesi diskusi dan kegiatan lain yang ditujukan untuk membahas perkembangan saat ini dan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi komunitas perkotaan dimasa depan. Sesi tematik dan program sosial, menampilkan berbagai topik spesifik dan global serta terdapat pameran untuk membuka peluang dalam mengembangkan kerjasama, kemitraan dan hubungan bisnis maupun untuk memperkuat jaringan. UCLG ASPAC dan Kota Surabaya menyelenggarakan KONGRES UCLG ASPAC ke-7, yang diadakan di Dyandra Convention Center Surabaya pada tanggal 12 - 15 September 2018. Salah satu diskusi kongres adalah upaya pemerintah kota dalam mewujudkan kota yang lebih nyaman untuk ditinggali. Masalah yang terkadi memunculkan inovasi Pemerintah Kota untuk dapat menciptakan kota yang berkelanjutan.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, membuka kongres tentang perkotaan di depan forum yang terdiri dari beberapa negara pada Rabu (12/9). Selain itu, Risma juga mengungkapkan keprihatinan serius tentang perubahan iklim. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kota Surabaya adalah mengubah kampung kumuh dan pengelolaan sampah. Kampung di Surabaya dulunya identik sebagai tempat kotor, kumuh & sakit untuk ditinggali. Tapi sekarang kampung-kampung di Surabaya telah menjadi tempat yang bersih dan sehat untuk bermukim. Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah untuk mempromosikan pertanian perkotaan, serta pengelolaan limbah. Surabaya mampu mengolah sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik di Surabaya berubah menjadi dekorasi yang indah, fashion show, serta jogging track.

Risma juga menceritakan kepada khalayak tentang resep sukses Surabaya, adalah karena partisipasi pemerintah kota, warga, dan sekolah. Lebih dari 400 taman kota di Surabaya juga berkontribusi terhadap penurunan suhu di Surabaya sebesar 2%. Tidak hanya itu, sekitar 23,5 ton sampah plastik dari Bus Suroboyo akan dilelang dan akan menjadi pendapatan daerah. Hal ini membuat peningkatan jumlah penduduk Surabaya serta penurunan jumlah sampah di kota.

Salah satu sesi yang di hadiri adalah "Training event for city energy and climate action: how to set targets and develop a plan". Dalam training ini, Direktur Operasional ICCTF, Andi Abikusno, menyampaikan pemaparan

tentang "Financing Climate Action at Local Level: Climate Change Trust Fund".

Selanjutnya, Upacara Pembukaan UCLG ASPAC 2018 diadakan pada Kamis (13/9) dan dihadiri oleh Presiden UCLGASPAC Asia Pasifik Mr. Won Hee-Ryong, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Perwakilan UN Habitat PBB, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Sumarsono, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anis Baswedan dan kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia dan Asia Pasifik.

Setelah itu, ICCTF mengikuti sesi Collaborative governance for stronger enabling environment. Sesi ini membahas peran penting pemerintah lokal dalam melokalisasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Perkotaan Baru yang membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan adaptif yang memungkinkan pengembangan potensi lokal. Temuan-temuan dari penilaian City Enabling Environment di negara-negara Asia Pasifik menunjukkan banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki otoritas administratif, kebijakan dan otonomi fiskal yang kuat, keterampilan yang memadai, sumber daya, teknologi atau kapasitas untuk memainkan peran yang lebih penting dalam perencanaan regional, manajemen dan pembangunan. Dengan demikian, komitmen politik, kepemimpinan dan keterlibatan pemangku kepentingan di semua tingkat diperlukan untuk peningkatan fungsi dan manajemen pemerintah daerah.



6

The Leadership for Blue Carbon in Indonesia Professional Short Course

Pada 8-21 September 2018, Kementerian PPN/ BAPPENAS bekerja sama dengan LIPI dan University of Rhode Island menyelenggarakan The Leadership for Blue Carbon in Indonesia Professional Short Course di Rhode Island, Amerika Serikat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta agar mampu memahami Blue Carbon dalam konteks sains, ekonomi dan kebijakan untuk dapat menyusun strategi implementasi Blue Carbon yang pada tahap selanjutnya dapat menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kedepan. Peserta kegiatan ini meliputi 14 peserta yang meliputi perwakilan dari kementerian/lembaga, universitas dan pemerintah daerah.

Pada kegiatan ini, Executive Director ICCTF hadir pada sesi pembukaan pelatihan sebagai salah satu delegasi Pemerintah Indonesia. Selain itu, Monitoring & Evaluation Officer ICCTF juga hadir sebagai salah satu peserta pelatihan. Pada pelatihan ini, peserta diberikan materi tentang Blue Carbon baik di dalam maupun luar kelas oleh para ahli dan profesional dari Coastal Resources Center (CRC) University of Rhode Island dan lembaga terkait lainnya yang berada di Rhode Island. Beberapa materi utama yang disampaikan diantaranya Blue Carbon dalam konteks sains, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, valuasi ekonomi jasa

ekosistem, analisis biaya manfaat, serta strategi dan implementasi kebijakan Blue Carbon.

Pada akhir pelatihan, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menyusun strategi Blue Carbon. Kelompok tersebut meliputi: 1) Kebijakan Nasional Blue Carbon di Indonesia; 2) Pilot Project Blue Carbon: Blongko Marine Sanctuary di Sulawesi Utara; dan 3) Dukungan sains dan sektor pendidikan untuk implementasi Blue Carbon di Indonesia. Strategi-strategi berdasarkan ketiga pembagian tema tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan setelah peserta kembali ke Indonesia.



Foto bersama peserta pelatihan dengan Delegasi Pemerintah Indonesia dan pihak University of Rhode Island.

7

Diskusi dalam Rangka *Constructive Collaboration* dengan RARE

Diskusi potensi kolaborasi antara Kementerian PPN/ Bappenas, ICCTF dengan RARE dilaksanakan di Bloomberg Office New York pada 7 September 2018. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Menteri PPN/BAPPENAS, Direktur Kelautan dan Perikanan BAPPENAS serta pihak RARE meliputi Brett Jenks selaku CEO dan Valeria Ramundo Orlando selaku Vice President – Blended Finance. Beberapa isu yang dibahas pada pertemuan ini antara lain mengenai SDGs, RPJMN, COREMAP serta GEF 7. Terkait SDGs, model SDGs yang ada di Indonesia dapat dikembangkan lebih lanjut untuk dibandingkan dengan model atau konsep SDGs yang ada di negara lain. Terkait dengan RPJMN, pihak RARE dapat memberikan dukungan pendanaan selama RPJMN sejalan dengan target SDGs. Kemudian terkait dengan COREMAP, pihak RARE menyampaikan bahwa RARE memiliki beberapa lokasi di Indonesia yang dapat dijadikan tempat pelatihan “teaching

house” dengan menggunakan model seperti yang ada di Filipina. Berkaitan dengan GEF 7, pihak RARE akan mengembangkan proposal bersama untuk diajukan kepada GEF 7. Dalam diskusi ini, Ibu Valeria Ramundo menyampaikan bahwa konsep blended finance memerlukan site/lokasi yang sudah siap.



Diskusi Kementerian PPN/BAPPENAS, ICCTF dan RARE.

Untuk mencegah bencana ekologis kebakaran lahan gambut tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya dan sekaligus memperbaiki lahan gambut yang terdegradasi akibat kebakaran dan pengelolaan lahan yang kurang bijaksana, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Badan Restorasi Gambut. BRG bertugas mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan restorasi gambut sampai tahun 2020 pada tujuh provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Diharapkan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan lebih cepat.

Untuk memastikan pencapaian target restorasi tersebut, BRG telah menyusun Rencana Kontijensi 2017 dan Rencana Tindakan Tahunan Tahun 2018 yang berbasis ekosistem gambut (Kesatuan Hidrologis Gambut/ KHG), Di Provinsi Riau restorasi dilakukan pada KHG berikut:

1. KHG Pulau Rupat
2. KHG Sungai Barumon - Sungai Kubu
3. KHG Sungai Enok - Sungai Batang
4. KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka
5. KHG Sungai Mandiangin - Sungai Siak
6. KHG Sungai Rokan Kiri - Sungai Mandau
7. KHG Sungai Siak Kecil - Sungai Siak
8. KHG Pulau Padang
9. KHG Pulau Tebing Tinggi
10. KHG Sungai Kampar - Sungai Gaung
11. KHG Sungai Rokan - Sungai Siak Kecil
12. KHG Sungai Kiyap – Sungai Kerinci
13. KHG Sungai Siak – Sungai Kampar
14. KHG sungai Tapung Kiri –Sungai Kiyap

Kegiatan restorasi lahan gambut telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun civil society. Namun, kegiatan restorasi oleh para pihak tersebut saat ini belum terpetakan dengan baik sehingga tumpang tindih kegiatan di suatu lokasi maupun kekurangan/ kekosongan aktivitas restorasi pada KHG lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, BRG memandang perlu melakukan koordinasi dengan mitra agar dapat mendukung dan melakukan pemetaan kegiatan restorasi di masing-masing provinsi. Melalui kegiatan ini diharapkan BRG dan mitra restorasi mendapatkan informasi kegiatan/ proyek lain sehingga

dapat saling bekerjasama untuk mendukung pencapaian target restorasi gambut

Tujuan kegiatan ini:

1. Membangun komunikasi dengan Mitra Restorasi Gambut untuk mendukung kegiatan restorasi gambut Provinsi Riau.
2. Mendapatkan data dan informasi terkait komitmen dan kegiatan para Mitra Restorasi Gambut di Provinsi Riau dan selanjutnya dapat dipetakan untuk mengetahui pencapaian target kegiatan restorasi gambut

Pertemuan Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Bp. Ahmad Hijazi, SE., M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Riau sekaligus Ketua Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau didampingi oleh Bpk. Budi Wardhana, Deputi I BRG dan Bpk. Alue Dohong, Deputi II BRG.

Paparan Bp. Budi Wardhana, Deputi I Bidang Perencanaan dan Kerjasama Badan Restorasi Gambut (BRG), beliau memaparkan kegiatan BRG di Riau yang fokus pada 3R yaitu R1 (Rewetting), R2 (Revegetasi) dan R3 (Revitalization),

Paparan oleh Bp. Alue Dohong, Deputi II Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG), beliau memaparkan kegiatan BRG di Riau yang fokus pada 3R yaitu R1 (Rewetting), R2 (Revegetasi) dan R3 (Revitalization of Local Livelihood), dengan melalui 4 tahapan, yaitu :

- Tahap Perencanaan (Survei, Baseline Awal, Rencana Pemulihan)
- Tahap Implementasi Restorasi (R1, R2 dan R3)
- Tahap Pemantauan dan Laporan (Metode dan Teknik Pemantauan, Laporan Pemantauan)
- Tahap Tingkat keberhasilan (Tingkat keberhasilan, Rekomendasi Perbaikan)

Pada pertemuan ini, ICCTF menyampaikan perkembangan mitra ICCTF yang ada di Riau yaitu Perkumpulan Pancur Kasih, Konsorsium Walhi Riau dan Sampan Kalimantan. Progress dari 3 mitra ini semua dipaparkan, ada hal yang menarik adalah bahwa di Riau hanya mitra ICCTF yang melaksanakan program

restorasi lahan gambut dan pencegahan kebakaran sekaligus sejak dari hulu sampai hilir yaitu sejak baseline hidologi gambut di lokasi mitra, penyusunan rencana aksi daerah kabupaten, restorasi gambut dengan R1/ R2/R3, pencegahan kebakaran dengan pelatihan dan bantuan peralatan pemadam kebakaran sampai dengan penyusunan SOP dan EWS pencegahan kebakaran. Hal ini menandakan bahwa program ICCTF dalam restorasi gambut sangat kompleks dan lengkap.

Pada siang hari, pertemuan dilanjutkan dengan tanya jawab antara OPD Pemerintah Provinsi Riau, NGO di Riau dengan BRG, antara lain : KPH Tasik Serkap, KPH Rokan, Faperika UR, Belantara, WWF, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau, Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, UPT KLHK, Balai BP2PTS, Balitbang Provinsi Riau, Universitas Lancang Kuning, KPH Mandau, KPH Tebing Tinggi, Dinas PUPR Riau, dan KPH Sorek.



Pengembangan Proposal Fundraising

1

Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)

COREMAP-CTI merupakan program yang diresmikan Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 1998 sebagai program 15 tahun yang didanai berbagai donor dengan tujuan “melindungi, merehabilitasi dan mencapai pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem terkait yang berkelanjutan di Indonesia, yang juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir”. Program ini dilaksanakan oleh KKP dan LIPI dengan sumber pendanaan hibah GEF dan pinjaman melalui Bank Dunia dan ADB. Pada bulan Maret 2017, KKP menerbitkan surat resmi tentang pembatalan sebagian program COREMAP. Hal ini ditindaklanjuti dengan beberapa pertemuan Steering Committee selama bulan April hingga Desember 2017 yang menghasilkan

kesepakatan bahwa program COREMAP untuk komponen hibah GEF melalui Bank Dunia dan ADB akan dialihkan kepada Kementerian PPN/Bappenas selaku Executing Agency melalui ICCTF sebagai Implementing Unit.

Selama periode Juli-September 2018, Kementerian PPN/Bappenas serta ICCTF berkoordinasi intensif dengan Bank Dunia, ADB, KKP, serta LIPI untuk melakukan restrukturisasi terhadap proyek COREMAP-CTI. Berikut ini adalah informasi detail restrukturisasi Program COREMAP-CTI Komponen Hibah GEF.

	Hibah GEF-Bank Dunia	Hibah GEF-ADB
Tujuan Proyek	<i>To strengthen institutional capacity in coastal ecosystems monitoring and research to produce evidence-based resource management information, and to improve management of priority coastal ecosystems</i>	<i>Sustainable management of coral reef ecosystems in Lesser Sunda Seascape through enhanced capacity to manage coral reef ecosystems in targeted Marine Protected Areas (MPAs)</i>
Durasi Proyek	3 tahun (2019-2022)	3 tahun (2019-2021)
Lokasi Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Raja Ampat, Papua Barat • Teluk Sawu, NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Gilimatra, NTB • Gilibalu, NTB • Nusa Penida, Bali
Informasi Budget	5.2 juta USD	5 juta USD

Pada periode Juli-September 2018, telah dilakukan beberapa pertemuan baik untuk persiapan COREMAP WB maupun COREMAP ADB diantaranya: Wrap up Misi Kunjungan WB, Pembahasan Environmental and Social Safeguard (ESSF) COREMAP WB, Pembahasan Rekening Khusus COREMAP WB, Pembahasan Costings COREMAP WB, Pembahasan Restrukturisasi COREMAP ADB, Pertemuan Co-Financing COREMAP ADB, Due Dilligence COREMAP ADB dan Pertemuan Steering Committee COREMAP-CTI. Pada proses restrukturisasi ini, terdapat keterlambatan proses sehingga penandatanganan Perjanjian Hibah

yang semula direncanakan pada November 2018 ditargetkan menjadi Februari 2019. Hal ini dikarenakan restrukturisasi COREMAP-CTI ini dinilai mengalami perubahan yang besar (Major changes) oleh Sekretariat GEF sehingga memerlukan pembahasan dan persetujuan di Majelis GEF (GEF Council). Pada triwulan berikutnya, koordinasi baik dengan Bank Dunia dan ADB akan terus dilakukan untuk memfinalisasi restrukturisasi termasuk project activities, costings dan implementation arrangement. Detail timeline restrukturisasi COREMAP-CTI GEF dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kegiatan	Tanggal	Penanggung Jawab
COREMAP GEF World Bank			
1	Finalisasi restructuring paper	September 2018	GOI/WB
2	GEF CEO Endorsement	Desember 2018	WB/GEFSEC
3	WB Board Approval of Restructuring Paper	Februari 2019	WB
4	Signing of Amandment to the Legal Agreements (Loan and GEF Grant)	Akhir Februari 2019	GOI/WB
COREMAP GEF ADB			
1	GEF Council	tbc	ADB
2	Finalisasi Grant Agreement (Amandement COREMAP CTI)	tbc	Gol & ADB

2 Incorporating Biodiversity and Climate Change to Metropolitan Bimindo (IBC-Metro Bimindo)

Pada tanggal 23 Agustus 2018 telah dilakukan workshop terbatas sebagai kelanjutan dari rangkaian workshop sebelumnya mengenai penyusunan proposal Incorporating Biodiversity and Climate Change to the Metropolitan Bitung-Minahasa-Manado (IBC-BIMINDO). Workshop dipimpin oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dan dihadiri oleh perwakilan Bappeda Manado, Bitung, Minahasa, dan Tomohon. Workshop tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan akhir dari pihak pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pengembangan proposal kegiatan yang mengintegrasikan intervensi terhadap perubahan iklim, biodiversity, energi terbarukan dan kelautan. Dalam kesempatan tersebut, ICCTF bersama dengan tim dari INFIS-GIZ mempresentasikan konsep proposal proyek yang telah disusun melalui serangkaian proses konsultatif. Pihak pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi dan menyambut baik

terhadap usulan proposal tersebut, serta menyampaikan komitmen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, antara lain dengan mensinergikan rencana pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan IBC-BIMINDO.

Tindak lanjut dari workshop tersebut adalah penyampaian alokasi anggaran pemerintah daerah yang dapat disinergikan sebagai parallel funding untuk mendukung pelaksanaan kegiatan IBC-BIMINDO. Parallel funding tersebut diperlukan untuk dicantumkan dalam draft PIF (Project Identification Form) yang akan diajukan kepada Global Environment Facility (GEF) untuk mendapatkan dukungan pembiayaan hibah. Selanjutnya, direncanakan akan dilaksanakan workshop terakhir di Jakarta untuk finalisasi konsep proposal proyek sebelum diajukan kepada pihak donor.



Kelembagaan

Update Perkembangan New ICCTF/SKHA/KEPMEN 12/2018

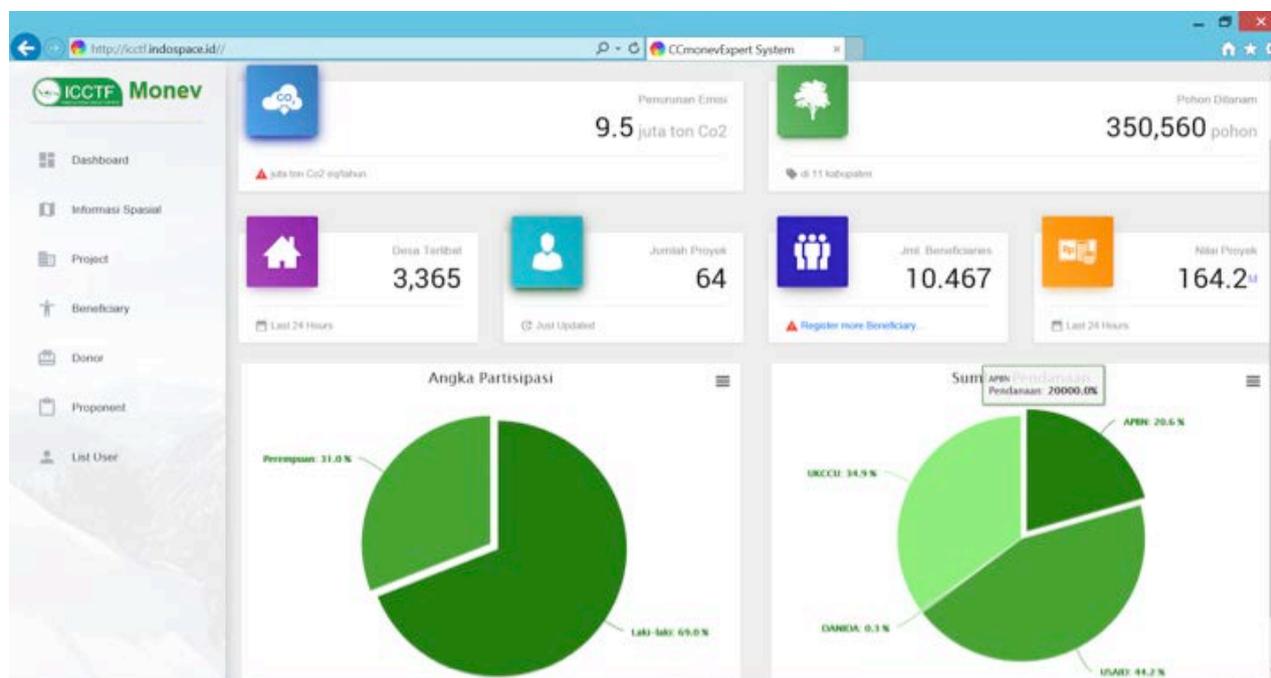
Sesuai dengan pertemuan MWA yang dipimpin oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas pada tanggal 22 Maret 2018 yang menghasilkan beberapa arah kebijakan bagi ICCTF, diantaranya adalah pembentukan window baru yaitu Kelautan dan Perikanan, maka pada tanggal 1 Agustus 2018 telah diundangkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 12 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPN No. 3/2013 tentang ICCTF.

Peraturan Menteri PPN No. 12 tahun 2018 menetapkan pembentukan kelompok kerja pada struktur MWA untuk semakin meningkatkan kinerja ICCTF. Secara lebih spesifik, kelompok kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri PPN No. 111 tahun 2018. Dalam Surat Keputusan tersebut, ditetapkan 3 kelompok kerja, yaitu: i) kelompok kerja bidang mitigasi dan adaptasi yang dikoordinasikan oleh Direktur Lingkungan Hidup Bappenas; ii) kelompok kerja bidang

energi baru dan terbarukan yang dikoordinasikan oleh Direktur Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Bappenas; dan iii) kelompok kerja bidang kelautan dan perikanan yang dikoordinasikan oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas. Di sisi lain, sebagai upaya untuk menuju kelembagaan ICCTF yang ideal, pada periode Juli – September 2018 telah dimulai kajian kelembagaan ICCTF oleh SKHA Consulting. Pada periode ini, SKHA Consulting mulai melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis kelembagaan yang memungkinkan untuk menjaga keberlanjutan program dan kegiatan ICCTF sebagai lembaga wali amanat. Identifikasi tersebut dilakukan melalui serangkaian diskusi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil identifikasi awal akan disampaikan pada laporan pendahuluan (inception) pada bulan Oktober 2018. Sedangkan hasil akhir kajian akan disampaikan pada akhir pelaksanaan yaitu bulan Desember 2018.



Money Tools



Tampilan Web Money Tools ICCTF <http://icctf.indospace.id/>

Pada Bulan Januari 2018 ICCTF menginisiasi rencana pengembangan *Money Tools* berbasis web dan android. Tujuan dari pengembangan *Money Tools* ini adalah untuk mempermudah memonitoring capaian perkembangan proyek yang dapat diupdate secara *realtime* melalui *online system* oleh para proponent dilapangan. Melalui dukungan GIZ INFIS telah dilaksanakan rangkaian diskusi dan *workshop* penyiapan *Money Tools* selama bulan Januari – September 2018.

Beberapa tahapan pengembangan *money tools* yang telah dilakukan antara lain:

- Menyusun skema *Money tools* yang akan dikembangkan ICCTF.
- Menyusun matriks pengumpulan data based dalam dormat excel.
- Pengumpulan data umum capaian proyek.
- Mengembangkan *web based Money tools* versi 1.0.
- Mengunggah data umum capaian proyek dalam web *Money Tools* versi 1.0.
- *Show case web money tools* dalam Rapat MWA ICCTF tanggal 22 Maret 2018.
- Evaluasi *web based Money Tools* versi 1.0.
- Pengadaan konsultan IT pengembangan Web dan Android untuk *Money Tools*.
- Pengumpulan rumus-rumus perhitungan emisi sebagai basis data.
- Membuat sistem untuk perhitungan emisi pada web.

Tindak lanjut pengembangan *Money Tools* yang akan dilakukan selanjutnya antara lain:

- Membuat sistem yang lebih *advance* & detail untuk setiap proyek.
- Pemasukan data detail untuk setiap proyek oleh proponent atau Sekretariat ICCTF.

Laporan Keuangan

Serapan Program ICCTF per September 2018

Sepanjang tahun 2018, Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua pelaksanaan kegiatan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada Tahun 2018, setelah dilakukan revisi anggaran maka total dana yang dikelola sebesar Rp 82.075.629.636 (delapan puluh dua milyar tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari sumber pendanaan Rupiah Murni APBN dan Hibah Luar Negeri. Capaian serapan sampai pada triwulan ketiga tahun 2018 adalah sebesar 62% dari total dana yang dikelola atau sebesar Rp 50.775.446.265. Secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

Sumber Dana	Alokasi Dana 2018 (IDR)	Penyerapan per 30 Sept 2018	Penyerapan (%)
 APBN	12.855.000.000	6.075.806.349	47%
 DANIDA	2.228.595.609	1.360.633.188	61%
 USAID	26.337.258.721	21.389.851.577	80%
 UKCCU	47.879.202.700	21.949.155.151	46%
 DANIDA-A	5.617.717.606	0	0%
TOTAL	82.075.629.636	50.775.446.265	62%

Lampiran

Monitoring Pemberitaan ICCTF Q3 Tahun 2018

1. <https://www.antaraneews.com/berita/724612/inggris-danai-180-sekat-kanal-melalui-icctf> (Jumat, 6 Juli 2018 – ANTARA)

INGGRIS DANAI 180 SEKAT KANAL MELALUI ICCTF

Dumai, Riau (ANTARA News) – Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Tony Wagey menyebut ada 180 sekat kanal yang dibangun dengan dana The UK Climate Change Unit (UKCCU) di lima provinsi prioritas restorasi gambut.

Tony, saat mendarat di sekat kanal yang dibangun bersama mitra lokal Riau Women Working Group (RWWG) di Kelurahan Mundam, Dumai, Riau, Jumat, mengatakan 180 sekat kanal yang dibangun di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu diperkirakan mampu membasahi sekitar 2.500 hektare (ha) lahan gambut [...]

2. <https://www.antaraneews.com/berita/724611/perempuan-dumai-ikut-kendalikan-emisi-dengan-agroforestri> (Jumat, 6 Juli 2018 – ANTARA)

PEREMPUAN DUMAI IKUT KENDALIKAN EMISI DENGAN AGROFORESTRI

Dumai, Riau (ANTARA News) – Sejumlah kelompok perempuan di empat kelurahan di Kotamadya Dumai, Riau, dilibatkan untuk mengendalikan emisi di lahan gambut melalui revitalisasi mata pencaharian dengan agroforestri dan biofloc.

"Memang tidak ada jaminan mereka tidak kembali ke lahan dan tidak membakar. Tapi memang ini memberikan pencegahan bahwa mereka tidak boleh hanya bergantung dari sawit karena nyatanya ada yang bisa dihasilkan dari lainnya," kata Direktur Riau Woman Working Group (RWWG) Sri Wahyuni dalam sesi media visit dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di Dumai, Riau, Jumat [...]

3. <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/07/06/video-direktur-klh-bappenas-ri-panen-lele-di-dumai> (Jumat, 6 Juli 2018 - Tribunnews.com Pekanbaru)

Liputan Video: DIREKTUR LH BAPPENAS RI PANEN LELE DI DUMAI

Tribundumai.com, Dumai – Kelompok Perempuan Bunga Desa melakukan panen perdana lele, Kamis (5/7/2018). Mereka memanen di kolam ikan biofloc di Selingsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Direktur Lingkungan Hidup Bappenas RI, Medrilzam ikut serta dalam panen tersebut. Kelompok tersebut adalah binaan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama mitra, Riau Women Working Group (RWWG). Ada lima kolam ikan biofloc di lokasi tersebut. Mereka memanen lele setelah menyebar bibit tiga bulan lalu. Kelompok ini terbentuk pada Februari 2017. RWWG sebagai mitra ICCTF memberi pengertian kepada perempuan di kelurahan tersebut. Mereka yang kebanyakan tidak bekerja pun terdorong untuk berwirausaha [...]

4. <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/07/06/kreatifnya-ibu-ibu-dari-kelurahan-mundam-olah-jahe-merah-jadi-dodol-yang-lezat> (Jumat, 6 Juli 2018 – Tribunnews.com Pekanbaru)

KREATIFNYA IBU-IBU DARI KELURAHAN MUNDAM, OLEH JAHE MERAH JADI DODOL YANG LEZAT

Tribundumai.com, Dumai – Sekelompok ibu rumah tangga di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, memanfaatkan lahan dekat rumahnya untuk bertanam jahe merah. Mereka akhirnya bisa memanen jahe merah perdana di lahan seluas seperempat hektar ini, Jumat (6/7/2018). Para kaum ibu disana mengolahnya jadi sejumlah produk untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Saat ini produk olahannya berupa jahe merah bubuk dan dodol jahe merah. Kelompok itu adalah kelompok binaan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama mitra,

Riau Women Working Group (RWWG). Lembaga perwalian dana perubahan iklim Indonesia di bawah pengelolaan Bappenas RI bersama RWWG berupaya mendampingi kelompok perempuan yang ada di kecamatan Medang Kampai [...]

5. <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/07/06/icctf-bantu-pembangunan-sekat-kanal-di-dumai-untuk-basahi-gambut> ((Jumat, 6 Juli 2018 – Tribunnews.com Pekanbaru)

ICCTF BANTU PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DI DUMAI UNTUK BASAHI GAMBUT

Tribundumai.com, Dumai – Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) membantu pembangunan infrastruktur pembasahan gambut melalui teknik sekat kanal di kota Dumai. Lembaga perwalian dana perubahan iklim di Indonesia di bawah pengelolaan Bappenas RI membantu pembangunan empat sekat kanal di Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai pada tahun 2017 silam. Kawasan ini merupakan satu titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Sekat kanal itu menyebar di Kelurahan Mundam, Kelurahan Pelintung, Kelurahan Guntung dan Kelurahan Teluk Makmur. Program ini selaras dengan konsep restorasi gambut yang diterapkan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) [...]

6. **The Jakarta Post (Cetak), Selasa, 10 Juli 2018 (Gemma Holliani Cahya)**

RIAU WOMEN IMPROVE FAMILIES' WELFARE, FIGHT CLIMATE CHANGE

Dozens of catfish flopped around in a net, splashing water in every direction as Ramlah, 37, gripped the net's handle above a fishing pond made of tarp at Pelintung village, Dumai, Riau, recently.

"We raised them for nine months and this is our first harvest. There are around 1,000 catfish in this pond, and we have five ponds," Ramlah told The Jakarta Post as she pointed at other fish ponds lined up in her backyard. Ramlah is the head of Perempuan Bunga Desa, a group consisting of 20 women from Pelintung village in Medang Kampai district, which manages the ponds. Like most of her group members, she is a homemaker and her husband works at an oil palm plantation.

Medang Kampai was among the areas in Riau that suffered the most during the nation's worst forest fire in 2015, as one third of the district was transformed into an oil palm plantation.

The fire, which lasted more than two months, sent vast plumes of smoke into the air, not only across the island of Sumatra, but also across neighboring countries including Malaysia, Singapore, southern Thailand, Vietnam, Cambodia and the Philippines. Evidence indicated that most hot spots were related to oil palm and pulpwood plantations.

Funded by the United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), a trust fund organization under the National Development Planning Board (Bappenas), initiated a program for 80 women in Dumai to improve their livelihoods by growing red ginger and raising catfish on the peatland in their backyards.

They have also learned to process the goods into food, such as catfish into fish balls and sausages, and ginger into candy and drinks, to gain more profit when selling it in markets.

"We want to encourage Riau women who live around peatland to do more than just stay at home or help their husbands on oil palm plantations. We want to show them that they also can improve their financial condition from their front yard, without leaving their domestic responsibilities," said Sri Wahyuni, the director of the Riau Working Women Group (RWWG).

The women, including Ramlah, are residents of four villages, namely Belintung, Buntung, Makmur and Mundam, in Medang Kampai district. Currently, there are four women's groups across Medang Kampai, and each manages five catfish ponds and around a quarter hectare of red ginger farmland.

The RWWG have assisted the women over the past 13 months in learning about raising catfish using an innovative and cost-effective technology called Biofloc, which can be used in relatively small areas. They claimed that the technique could produce healthier and tastier fish since they made their own fish pellets using organic plant residue from around the house. With the technology, they can build a pond using tarp. It also allows them to take care of and financially contribute to their respective households.

ICCTF executive director Tonny Wagey said they had given around Rp 2 billion (US\$139,655) to the RWWG for the women's empowerment program. They hope that the local administration will follow up on the programs, thus enabling more women to improve their livelihoods by managing peatland and playing a bigger role in anticipating the impact of climate change.

While the importance of the role of women in climate change is often discussed, implementation of programs that engage women remains limited, said Medrilzam, the head of the environment directorate at Bappenas.

It is concerning, he said, because women and their children usually bear the brunt of environmental disasters. For example, many women get sick from breathing smoke during severe haze, but they also have to take care of their sick children.

Children and pregnant women are among the most vulnerable to the harmful effects of air pollution. A child's respiratory tract can easily absorb toxic particles emitted from burning wood.

7. Sabtu, 7 Juli 2018 - KOMPAS – cetak

PEREMPUAN UJUNG TOMBAK JAGA GAMBUT

Perempuan bisa menjadi ujung tombak dalam menjaga lahan gambut dari kebakaran hutan. Untuk itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui Lembaga Perwalian Dana Perubahan Iklim/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menjalankan program "Inisiasi Kelompok Perempuan dalam Mengurangi Emisi yang berasal dari Kebakaran Hutan, Kebun, dan Gambut sebagai bagian dari Pengarusutamaan Gender dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam. Demikian dikatakan Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang juga Sekretaris Majelis Wali Amanat ICCTF di Dumai, Riau, Jumat (6/7/2018).

8. <https://photo.sindonews.com/view/28578/kelompok-perempuan-dumai-tanam-dan-olah-jahe-merah-di-lahan-gambut> (Jumat, 6 Juli 2018 – Inews/Sindo Photo)

KELOMPOK PEREMPUAN DUMAI TANAM DAN OLAH JAHE MERAH DI LAHAN GAMBUT

Foto Slide dan caption

Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Tonny Wagey (kedua kiri) dan Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA) ICCTF Medrilzam (ketiga kanan), berbincang dengan kelompok perempuan Mundam, saat memanen jahe merah di lahan Demplot Agroforestry Tanaman Jahe Merah, di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, Jumat (06/7/2018). Pengelolaan lahan gambut melalui agroforestry oleh perempuan yang digalakkan oleh ICCTF bekerja sama dengan Riau Women Working Group (RWWG) di Kota Dumai ini bertujuan supaya perempuan juga memiliki akses informasi dan kontrol mengenai tata kelola lahan mulai dari penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hingga rencana pengolahan pasca panen.

Jahe merah dipilih sebagai komoditas untuk dikembangkan di Kota Dumai oleh kelompok perempuan dengan pertimbangan? bahwa jahe merah mudah tumbuh di lahan gambut, bernilai ekonomi tinggi, dan memiliki pilihan produk olahan cukup banyak.

Kelompok perempuan tidak hanya diajak menanam, tetapi juga diajarkan mengolahnya menjadi produk makanan seperti dodol jahe, minuman dan permen jahe. Selain bernilai ekonomis, program tanam tanpa bakar dengan memanfaatkan lahan sekitar rumah tersebut sebagai upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pengendalian perubahan iklim.

9. https://www.inews.id/multimedia/read/172465/perempuan-perempuan-ini-budidaya-lele-di-kolam-ikan-biofloc?sub_slug=photo (Jumat, 6 Juli 2018 – Inews.id/Sindo Photo)

PEREMPUAN-PEREMPUAN INI BUDIDAYA LELE DI KOLAM IKAN BIOFLOC

Foto Slide dan caption

DUMAI, iNews.id - Anggota Kelompok Perempuan Bunga Desa memanen perdana lele, yang dibudidaya di kolam ikan biofloc di Selingsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau, Kamis (5/7/2018). Teknologi Kolam Ikan Biofloc merupakan salah satu alternatif budidaya ikan air tawar, yang mulai diperkenalkan oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama mitra, Riau Women Working Group (RWWG) pada masyarakat yang tinggal dilahan gambut tersebut.

Satu kolam dapat menampung sedikitnya seribu ikan yang siap dipanen setelah menebar bibit selama tiga bulan. Dalam pemeliharaannya, Kelompok Perempuan Bunga Desa memproduksi sendiri makanan ikan dari bahan baku yang didapat dari sekitar mereka.

Budidaya ikan lele disekitar hunian ini diharapkan bisa menambah ekonomi yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup dari kebun sawit, sekaligus menghilangkan stigma kasur, dapur dan sumur bagi kaum hawa. (Koran Sindo/Ali Masduki)

10. <https://womantalk.com/world/articles/ini-bukti-perempuan-pelosok-juga-bisa-mandiri-DrBJm> (Minggu, 15 Juli 2018 – Womantalk.com)

INI BUKTI PEREMPUAN PELOSOK JUGA BISA MANDIRI

Dapur, sumur dan kasur. Ujar-ujar yang beredar di masyarakat sejak lama mengatakan, perempuan hanya diperlukan (dan wajib) melakukan ketiga hal ini saja di rumah. Dengan ketiga hal ini pula seakan menunjukkan perempuan hanya bisa bersandar kepada pasangannya. Namun, pada kenyataan, perempuan mampu melakukan lebih dari tiga hal itu. Bahkan, bisa mandiri!

Kemandirian ini yang mulai dicoba lakukan oleh puluhan perempuan di pelosok Dumai, Riau. Di bawah bimbingan Riau Working Women Group (RWWG) yang didukung oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), para perempuan ini belajar tentang besarnya peran perempuan untuk keluarga, masyarakat, lingkungan, bahkan negara [...]

11. <http://www.mongabay.co.id/2018/07/15/para-perempuan-di-riau-ini-tingkatkan-pendapatan-keluarga-dari-lahan-gambut/> (Minggu, 15 Juli 2018 – Mongabay.co.id)

PARA PEREMPUAN DI RIAU INI TINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA DARI LAHAN GAMBUT

Perempuan berperan penting dalam tata kelola gambut guna menanggulangi perubahan iklim. Mereka bahkan jadi garda terdepan dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Ia tak hanya demi kebaikan lingkungan, juga meningkatkan kesejahteraan.

Salmiana, bekerja keras menghidupi dua anak yang masih duduk di bangku SMA. Dia mengelola kebun nenas seluas 0,3 hektar sejak 2005. Penghasilan ibu empat anak ini tak menentu, tergantung hasil dan harga panen. Sehari-hari perempuan 47 tahun ini juga mengajar ngaji dan jadi kader posyandu, dengan penghasilan sekitar Rp1.200.000. Dia juga berjualan makanan saat Lebaran tiba, seperti dodol nenas atau dodol kelapa. "Kalau dihitung-

hitung ya tidak cukup. Uang sekolah saja Rp500.000 per bulan, belum biaya lain-lain,” katanya, saat ditemui saat media visit bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di Dumai, Riau, awal Juli lalu [...]

12. Jumat, 6 Juli 2018, halaman 16 – Tribun Pekanbaru (Cetak)

BUDIDAYAKAN LELE dan OLAHANNYA

Program Pemberdayaan Perempuan Tanpa Bakar Lahan

Dumai, Tribun – Kaum hawa di Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, dulu hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Namun saat ini, mereka menjadi bagian kelompok perempuan dalam mengurangi emisi yang berasal dari kebakaran hutan, kebun dan lahan gambut. Program ini memang bertujuan memberdayakan perempuan yang ada di kawasan gambut. Para kaum ibu yang selama ini tidak punya aktivitas kii bisa menghasilkan. Di antaranya dengan membudidayakan ikan di kolam biofloc. Tidak hanya membudidayakan lele, para wanita anggota kelompok juga mengolah lele menjadi sejumlah produk, seperti ikan asap lele, abon lele, bakso lele, dan nugget lele. Mereka sudah membudidayakan lele dan olahan lele sejak Februari 2017 silam. “Kami olah juga lele yang panen di kolam biofloc,” ujar staf pendamping Kelompok Guntung Jaya, Cut Utari, saat Media Visit Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di Selinsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kamis (5/7) [...]

13. Sabtu, 7 Juli 2018, Halaman 16 – Tribun Pekanbaru (Cetak)

UBAH JAHE MERAH JADI DODOL

Kreasi Kelompok Wanita di Kelurahan Mundam

Manfaatkan Lahan Gambut Tanpa Membakar Lahan

Dumai, Tribun – Sekelompok ibu rumah tangga di RT 2 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kamoai, memanfaatkan lahan dekat rumahnya untuk bertanam jahe merah. Mereka akhirnya bisa memanen jahe merah perdana di lahan seluas seperempat hektare, pada Jumat (6/7) kemarin. Kelompok Perempuan Mundam Bersatu sudah mengelola lahan ini sejak 2017 silam. Mereka sebelumnya cuma bekerja sebagai buruh tani di ladang nenas. Namun kini mereka juga membudidayakan jahe merah. Tak hanya itu, kaum ibu di sana mengolah jahe merah tersebut menjadi sejumlah produk untuk meningkatkan nilai ekonomisnya [...]. Proses penanaman jahe merah di sini dilakukan secara organik di lahan gambut. Mereka hanya butuh menggemburkan lahan sebelum menanam jahe merah. Kelompok itu merupakan kelompok binaan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama mitranya Riau Women Working Group (RWWG) [...]

14. Sabtu, 7 Juli 2018, halaman 16 – Tribun Pekanbaru (Cetak)

SEKAT KANAL AGAR GAMBUT TETAP BASAH

Program ICCTF Atasi Kebakaran Lahan di Dumai

Dumai, Tribun – Kecamatan Medang Kampai merupakan satu wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai. Lokasinya menyebar di kelurahan tersebut, dan memiliki hamparan lahan gambut yang cukup luas. Kondisi ini membuat Medang Kampai rentan terjadi kebakaran lahan. Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) membantu pembangunan infrastruktur pembasahan gambut melalui teknik sekat kanal. Lembaga dana perwalian perubahan iklim Indonesia di bawah pengelolaan Bappenas RI itu membantu pembangunan emp at sekat kanal pada 2017 silam. Sekat kanal itu menyebar di kelurahan Mundam, kelurahan Pelintung, kelurahan Guntung, dan kelurahan Teluk Makmur [...]

15. Sabtu, 14 Juli 2018, halaman 16 – Media Indonesia (Cetak)

PEREMPUAN BERDAYA DI LAHAN GAMBUT

Jejak Hijau

Telapak tangan Hidayah, 31 menggenggam butiran pakan ikan. Begitu erat jemarnya mencengkeram seolah tak ingin sebutir pun pelet terlepas sebelum dikehendaki. Begitu telah berada di atas kolam buatan, ia menaburkan pakan itu. Ikan lele yang berada di dalam pun sontak membuka mulut, beradu dengan lele lain untuk mendapat jatah makan siang. Pelet yang digunakan bukan hasil pabrikan, melainkan dibuat sendiri dengan bahan alami yang telah tersedia di lingkungan sekitar. Lahan gambut ternyata punya bahan melimpah untuk membuat pelet, seperti azolla atau gulma gambut. Hidayah tinggal di tengah lahan gambut yang rawan terbakar [...] Hidayah ialah salah satu dari 20 anggota Kelompok Perempuan Bunga Desa di Selingsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, Riau. Kelompok perempuan itu ialah salah satu kelompok Binaan The Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang bermitra dengan Riau Women Working Group (RWWG) dalam Program Mitigasi Berbasis Lahan dengan dana sekitar Rp 2,5 Miliar dari the UK Climate Change Unit (UKCCU) [...]

16. <https://en.tempo.co/read/news/2018/08/11/313920724/Women-of-the-Peatlands> (Sabtu, 11 Agustus 2018 - Tempo English Magazine & Tempo.co)

WOMEN OF THE PEATLANDS

Tempo.Co, Jakarta - Fires that consumed Riau's estates and forests in 2014 have left behind some tough homework for restoring and managing the region's natural resources. Several organizations have been moved to act. The Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) has devised a conservation strategy in response to the fires and the impacts of climate change in Riau, among other things by training the region's women to manage the peatlands. The women are also trained to apply the biofloc system for cultivating catfish, to ensure better quality yields. Additionally, they are taught how to process their catfish into ready-to-eat food products, to improve the local economy. In July, a women's group covering four administrative villages in Medang Kampai, Riau, celebrated their first catfish harvest. Tempo English reports.

17. <http://www.mongabay.co.id/2018/07/15/para-perempuan-di-riau-ini-tingkatkan-pendapatan-keluarga-dari-lahan-gambut/> (Minggu, 15 Juli 2018 – Mongabay.co.id)

PARA PEREMPUAN DI RIAU INI TINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA DARI LAHAN GAMBUT

"Perempuan berperan penting dalam tata kelola gambut guna menanggulangi perubahan iklim. Mereka bahkan jadi garda terdepan dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Ia tak hanya demi kebaikan lingkungan, juga meningkatkan kesejahteraan".

Salmiana, bekerja menghidupi dua anak yang masih duduk di bangku SMA. Dia mengelola kebun nanas seluas 0,3 hektar sejak 2005. Penghasilan ibu empat anak ini tak menentu, tergantung hasil dan harga panen. Sehari – hari perempuan 47 tahun ini juga mengajar ngaji dan jadi kader posyandu, dengan penghasilan sekitar Rp 1.200.000,00. Dia juga berjualan makanan saat lebaran tiba, seperti dodol nanas atau dodol kelapa.

"Kalau dihitung-hitung ya tidak cukup. Uang sekolah saja Rp 500.000 per bulan, belum biaya lain-lain," katanya, saat ditemui saat media visit bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di Dumai, Riau, awal Juli lalu.

Sejak Februari 2017, Sal, begitu panggilan akrabnya ikut dalam kelompok Perempuan Mundam Bersatu, Kelurahan Mundam, Dumai, Riau.

"Kami diajari budidaya lele dengan (sistem) biofloc dan menanam jahe merah untuk menambah penghasilan. Saya bersyukur," katanya.

Kedua kegiatan ini, katanya, diharapkan jadi alternatif menunggu masa panen nanas setiap lima bulan sekali. "Kalau nanas kan harus meninggalkan rumah, jahe bisa di pekarangan, tak memerlukan lahan besar. Jahe juga bisa diolah sepanjang waktu," katanya.

Program-program ini, katanya, diinisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Lembaga Perwalian Dana Perubahan Iklim (ICCTF).

18. Majalah SAINS Indonesia edisi 80 Halaman 74

BERHARAP LAHAN GAMBUT TAK TERBAKAR LAGI

"Asap putih pekat itu sangat menyiksa. Saking tebalnya, mata tak mampu melihat benda berjarak satu meter. Selain memerihkan mata, asap yang berasal dari kebakaran lahan gambut itu juga menyesakkan nafas. Anak-anak pun terserang penyakit saluran pernafasan."

"Kalau sudah begini kamilah para ibu yang paling sibuk mengurus anak sakit," tutur Hidayah, warga kelurahan Pelintang, kota Dumai mengisahkan bencana asap terparah pada 2014. Sekitar dua minggu wilayah Dumai diselimuti asap tebal. Di pagi hari, asap itu enggan beranjak menjauh karena tak ada angin berhembus. Saat siang dan sore hari, kondisinya lumayan berkurang karena asap tebal mulai bergeser di tiup angin. Menurut Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Dr. Medrilzam, lahan gambut sangat mudah terbakar pada musim kemarau.

19. <https://www.antaraneews.com/berita/745895/universitas-tanjungpura-kerja-sama-11-deskelola-gambut> (ANTARA, 7 September 2018; 14.20 WIB)

UNIVERSITAS TANJUNGPURA KERJA SAMA 11 DESA KELOLA GAMBUT

"Dengan bantuan riverosmosis kita berharap koperasi desa atau BUMDes misalnya menjual air galon dengan sumber air gambut".

Pontianak (ANTARA News) - Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat bekerja sama dengan 11 desa di daerah tersebut dalam mengelola lahan gambut. "Kerja sama ini dalam konteks perlindungan pengelolaan ekosistem gambut di desa masing-masing," kata Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Gusti Hardiansyah di Pontianak, Jumat. Kerja sama tersebut disepakati lewat penandatanganan MoU dengan 11 kepala desa disela-sela pertemuan dan diskusi perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berbasis masyarakat di Kalimantan yang diselenggarakan ICCTF/Bappenas [...]

20. <https://www.antaraneews.com/berita/745924/kelola-gambut-jaga-keberlangsungan-hidup-masyarakat> (ANTARA, 7 September 2018; 16:07 WIB)

KELOLA GAMBUT JAGA KEBERLANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT

Pontianak (ANTARA News) – Pengelolaan lahan gambut tidak akan sukses tanpa menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya, kata Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Medrilzam. "Karena bicara gambut sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Emisi turun masyarakat juga harus sejahtera," kata Medrilzam dalam diskusi perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berbasis masyarakat di Kalimantan yang dilaksanakan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)/Bappenas di Pontianak, Jumat.

21. <https://www.antaranews.com/berita/745959/bappenas-partisipasi-masyarakat-cegah-bencana-di-lahan-gambut> (ANTARA, 7 September 2018; 17:46 WIB)

BAPPENAS: PARTISIPASI MASYARAKAT CEGAH BENCANA DI LAHAN GAMBUT

Pontianak (ANTARA News) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, partisipasi masyarakat sangat berperan untuk mencegah terjadinya bencana di lahan gambut seperti kebakaran lahan dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang pertama memang harus edukasi masyarakat bagaimana memanfaatkan lahan gambut dan mengurangi risiko kebakaran lahannya,” kata Bambang saat menutup Kick Off Meeting dan Ekspos program ICCTF di Pontianak, Jumat. Bambang mengapresiasi upaya kerja sama yang diinisiasi Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dengan Universitas Tanjungpura lewat program perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berbasis masyarakat di Kalimantan Barat [...]

22. <https://www.antaranews.com/berita/745986/dana-desa-bisa-digunakan-perbaiki-lahan-gambut> (ANTARA, 7 September 2018; 19:02 WIB)

DANA DESA BISA DIGUNAKAN PERBAIKI LAHAN GAMBUT

Pontianak (ANTARA News) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran dana desa sangat memungkinkan dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas lahan gambut. "Pemanfaatan dana desa saya pikir bisa untuk lingkungan," kata Bambang saat menutup Kick Off Meeting dan Ekspos Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) atau program dana perwalian perubahan iklim di Pontianak, Jumat. Dia mengatakan, awalnya dana desa memang lebih banyak digunakan untuk infrastruktur desa [...]

23. <https://www.antaranews.com/berita/745994/insentif-rp150-juta-untuk-desa-tanpa-karhutla> (ANTARA, 7 September 2018; 19:33 WIB)

INSENTIF Rp 150 JUTA UNTUK DESA TANPA KARHUTLA

Pontianak (ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat memberikan insentif sebesar Rp 150 juta kepada setiap desa yang mampu mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla di desanya). "Kalau sampai Oktober nanti tidak ada kebakaran, akan dapat insentif Rp 150 juta per desa dan saat ini sudah diberikan sebelumnya Rp 10 juta sebagai awalnya," kata Kepala Bappeda Kubu Raya Yusran Anizam dalam diskusi Perlindungan dan Pengelolaan Gambut berbasis masyarakat di Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat. Dalam kegiatan yang diinisiasi Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut, Yusran mengatakan, banyak upaya yang telah dilakukan Pemkab Kubu Raya agar tidak ada lagi karhutla di wilayah mereka [...]

24. <https://creativelab.tempo.co/read/1125214/budidaya-kopi-liberika-dan-madu-rasa-asam-di-lahan-gambut> (TEMPO.CO, 10 September 2018; 13:54 WIB)

BUDIDAYA KOPI LIBERIKA DAN MADU RASA ASAM DI LAHAN GAMBUT

TEMPO.CO, Pontianak - Hasil kerajinan warga di sekitar kawasan hutan lindung di lahan gambut Sungai Paduan dan Hutan Produksi Sungai Purang, mencuri perhatian di acara pameran. Selebar tikar dari daun pandan dengan warna mencolok dipamerkan pada acara Kick Off Meeting dan Ekspose Program Indonesia Climate Change Trust Fund di Pontianak, Jumat, 7 September 2018. Selain tikar, terdapat tas pandan dan tabung berbentuk ayam dari bahan batok kelapa. "Tikar pandan bisa dipakai sajadah," ujar Edi Rahman, dari Yayasan Palung, yang mendampingi warga menginisiasi kawasan hutan sebagai hutan desa. Di sudut lain, pengunjung mencicipi madu kelulut. Madu lebah ini rasanya asam yang diyakini memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Madun kelulut dibudidayakan masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat [...]

25. <https://kalbar.antaranews.com/berita/365202/perkuat-khdtk-melalui-perlindungan-dan-pengelolaan-gambut-berbasis-masyarakat> (ANTARA Kalbar, 8 September 2018; 05:21 WIB)

PERKUAT KHDTK MELALUI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT BERBASIS MASYARAKAT

Pontianak (Antaraneews Kalbar) - Kementerian PPN/Bappenas melalui satuan kerja (satker) Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menginisiasi program Memperkuat Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai Pusat Belajar Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat, melalui Perlindungan dan Pengelolaan Gambut Berbasis Masyarakat. "Dalam menjalankan program tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menggandeng Universitas Tanjungpura (Untan) dalam upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi pada tingkat implementasi di lapangan. Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas pada 2009 membentuk ICCTF sebagai alternatif mekanisme pembiayaan untuk perubahan iklim," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Kick Off Meeting dan Ekspose Program ICCTF, di Pontianak, Jumat.

26. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/09/08/tangani-karhutla-dan-masalah-air-bersih-icctf-jalin-kerjasama-dengan-fakultas-kehutanan-untan> (Tribun Pontianak.co.id, 8 September 2018; 21:09 WIB)

TANGANI KARHUTLA DAN MASALAH AIR BERSIH, ICCTF JALIN KERJASAMA DENGAN FAKULTAS KEHUTANAN UNTAN

Tribunpontianak.co.id, Pontianak – Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan lembaga wali amanat dana perwalian perubahan iklim Indonesia yang berada di bawah Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas melirik Fakultas Kehutanan Untan untuk melakukan kerjasama dalam penanganan Karhutla dan ketersediaan air bersih untuk warga desa yang belum memiliki akses air bersih. Manajer Komunikasi ICCTF, Angga Aristia menuturkan lembaga ICCTF bertindak sebagai penyalur dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah iklim yang dananya bersumber dari luar negeri seperti USAID dan UKAid [...]

27. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/09/08/fakultas-kehutanan-untan-dan-icctf-sulap-air-gambut-jadi-air-bersih-dan-penanganan-karhutla> (Tribun Pontianak, 8 September 2018; 18:01 WIB)

FAKULTAS KEHUTANAN UNTAN DAN ICCTF SULAP AIR GAMBUT JADI AIR BERSIH DAN PENANGANAN KARHUTLA

Tribunpontianak.co.id, Pontianak – Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang merupakan lembaga wali amanat dana perwakilan perubahan iklim Indonesia yang bertindak sebagai penyalur dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan berkaitan dengan masalah iklim. Melakukan kerjasama proyek untuk membantu masyarakat pedesaan dalam bidang air bersih dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mendukung program kerjasama antar lembaga ini, Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Gusti Hardiansyah membawa rombongan dari ICCTF untuk meninjau prototipe instalasi pengolahan air gambut menjadi air bersih yang ada di Kecamatan Pontianak Utara tepatnya RT 05/RW 13 Kelurahan Batu Layang.

28. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/09/09/alat-pemadam-api-nyapar-karya-fakultas-kehutanan-dilirik-icctf-untuk-tangani-kebakaran> (Tribun Pontianak, 9 September 2018; 12:03 WIB)

ALAT PEMADAM API, NYAPAR KARYA FAKULTAS KEHUTANAN DILIRIK ICCTF UNTUK TANGANI KEBAKARAN

Tribunpontianak.co.id, Pontianak – Fakultas Kehutanan Untan telah membuat alat pemadam api atau nozzle yang hak ciptanya telah didaftarkan pada negara, saat ini hasil riset tersebut telah dilirik pihak Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang merupakan lembaga wali amanat dana perwalian perubahan iklim Indonesia yang bertindak sebagai penyalur dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah iklim melakukan kerjasama proyek untuk membantu masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Gusti Hardiansyah menuturkan jika alat nyapar yang dibuat pihaknya adalah alat modern karena ada yang menggunakan sistem digital [...]

29. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/09/09/fakultas-kehutan-an-untan-ciptakan-alat-pengolah-air-gambut-jadi-bersih-warga-ikut-terbantu> (Tribun pontianak, 9 September 2018; 11:58 WIB)

FAKULTAS KEHUTANAN UNTAN CIPTAKAN ALAT PENGOLAH AIR GAMBUT JADI BERSIH WARGA IKUT TERBANTU

Tribunpontianak.co.id, Pontianak – Warga RT05/RW 13 Kelurahan Batu Layang, Pontianak Utara merasa terbantu dengan adanya instalasi pengolahan air gambut menjadi air bersih. Meskipun alat yang dihibahkan oleh Fakultas Kehutanan ini hanya bisa memfasilitasi sekitar enam sampai tujuh rumah. Lantaran kapasitas pengolahan terbatas. Ketua RT setempat Candra (56), menyampaikan sebagai warga sangat merasa terbantu dengan adanya alat ini dan air hasil olahan dapat diminum. “Selama ini kami kesulitan air bersih di lokasi ini, sudah puluhan tahun kami tinggal disini belum ada air bersih masuk,” ujar Candra saat dikunjungi tim dari Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan civitas akademika Kampus Kehutanan Untan, Sabtu (8/9/2018) [...]

30. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/09/09/sutarmidji-pengelolaan-gambut-untuk-kesejahteraan-masyarakat> (Tribun Pontianak, 9 September 2018; 17:45 WIB)

SUTARMIDJI: PENGELOLAAN GAMBUT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tribunpontianak.co.id, Pontianak – Perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berbasis masyarakat jadi hal penting di wilayah Indonesia khususnya Kalbar. Selain sebagai upaya menjaga kelestarian gambut dan menekan kasus kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan lahan gambut berbasis masyarakat dapat berdampak kepada kesejahteraan. Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan lahan gambut bisa jadi satu diantara usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dimanfaatkan oleh masyarakat melalui Anggaran Dana Desa (ADD). Menurut dia, nantinya BUMDES bisa lakukan kegiatan usaha di lahan-lahan gambut seperti pertanian. “Hasil dari usaha itu akan kembali lagi ke masyarakat setempat. ADD boleh digunakan sebagai modal BUMDES sekitar 30 persen,” ungkapnya saat acara Kick Off Meeting dan Ekspose Program ICCTF di Hotel Ibis Pontianak, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Jumat (7/9/2018) [...] Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana memanfaatkan lahan gambut dan risiko pemakaian lahan gambut [...]

31. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/09/08/hasil-pengolahan-air-gambut-fakultas-kehutan-an-untan-bagi-warga-di-batu-layang-bisa-langsung-minum> (Tribun Pontianak, 8 September 2018; 18:17 WIB)

HASIL PENGOLAHAN AIR GAMBUT FAKULTAS KEHUTANAN UNTAN BAGI WARGA DI BATU LAYANG BISA LANGSUNG MINUM

Tribunpontianak.co.id, Pontianak – Warga RT 05/RW 13, Kelurahan Batu Layang, Pontianak Utara merasa terbantu dengan adanya instalasi pengolahan air gambut menjadi air bersih. Meskipun alat yang dihibahkan oleh fakultas kehutanan ini hanya bisa memfasilitasi sekitar enam sampai tujuh rumah. Lantaran kapasitas pengolahan terbatas. Ketua RT setempat, Candra (56), menyampaikan sebagai warga sangat merasa terbantu dengan adanya alat ini dan air hasil olahan dapat diminum. “Selama ini kami kesulitan air bersih di lokasi ini, sudah puluhan tahun kami tinggal disini belum ada air bersih masuk,” ujar Candra saat dikunjungi tim dari Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan civitas akademika Kampus Kehutanan Untan, Sabtu (8/9/2018) [...]

32. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/04/03/alternatif-mata-pencarian-warga-secara-berkelanjutan> (Tribun Pontianak, 3 April 2018; 14.48 WIB)

Alternatif Mata Pencaharian Warga Secara Berkelanjutan

Tribunpontianak.co.id, Kayong Utara – Yayasan Palung bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menggelar Kick Off program mitigasi berbasis pengelolaan lahan gambut, Senin (3/4/2017) di Mahkota Kayong.

Adapun sosialisasi tersebut sebagai alternatif sumber mata pencarian masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai penting lahan gambut di sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Palung [...]

33. <https://www.antarariau.com/berita/103760/18-desa-di-riau-dapat-pendampingan-memulihkan-lahan-gambut> (ANTARA RIAU, 12 September 2018)

18 DESA DI RIAU DAPAT PENDAMPINGAN MEMULIHKAN LAHAN GAMBUT

Siak, (Antarariau.com) - Sebanyak 18 desa yang berada di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Siak-Sungai Kampar, Provinsi Riau mendapatkan pendampingan untuk memulihkan lahan gambut melalui program "tata kelola hutan dan lahan gambut untuk mengurangi emisi di Indonesia melalui kegiatan lokal" atau Tegak. "Dalam program Tegak ini ICCTF bekerjasama dengan beberapa LSM Riau yang akan menjadi lembaga pelaksana untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang berada di KHG Sungai Siak - Sungai Kampar," ujar Team Leader PMU UKCCU - ICCTF, Eko Putranto di Siak, Rabu. Beberapa LSM tersebut dibagi dalam tiga konsorsium, di antara Konsorsium Mitra Insani yang terdiri atas Yayasan Mitra Insani (YMI), Jaringan Masyarakat Gambut Riau, dan Fitra Riau. Selanjutnya Konsorsium Elang yang terdiri dari Perkumpulan Elang, KAR, Teras Riau, dan SART. Terakhir Konsorsium RWWG, meliputi Riau Women Working Group, dan Kaliptra Andalas.

34. <https://www.gonews.co/berita/baca/2018/09/13/18-desa-di-siak-dan-pelalawan-jadi-fokus-program-tegak-inilah-output-yang-diharapkan> (Gonews.co Riau, 13 September 2018)

18 DESA DI SIAK DAN PELALAWAN JADI FOKUS PROGRAM TEGAK, INILAH OUTPUT YANG DIHARAPKAN

PEKANBARU - Sebanyak 18 desa yang masuk dalam wilayah intervensi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Siak - Sungai Kampar akan menjadi fokus kegiatan R3 yang masuk dalam program Tegak. Program ini diekspose oleh Konsorsium Yayasan Mitra Insani (YMI), Konsorsium Elang, dan Konsorsium Riau Women Working Grup (RWWG), dalam acara Ekspose Bersama Program Tegak di Grand Mempura Hotel, Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, Rabu, (12/9/2018) lalu. Direktur YMI Muslim, dalam wawancara bersama wartawan sesuai kegiatan tersebut, mengatakan tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut melalui kerja sama langsung dengan pemerintah ditingkat pusat dan daerah.

35. <https://www.potretnews.com/berita/baca/2018/09/12/bupati-siak-jika-lahan-gambut-dimanfaatkan-bisa-meningkatkan-perekonomian-masyarakat> (Potretnews.com, 12 September 2018)

BUPATI SIAK: JIKA LAHAN GAMBUT DIMANFAATKAN, BISA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

SIAK, POTRETNEWS.com - Bupati Siak Syamsuar mengingatkan agar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut dapat memanfaatkan lahan tersebut, agar bisa meningkatkan perekonomian. "Kita tak ingin daerah ini menjadi ancaman terus, tiap musim panas langsung ada kebakaran. Jadi memang harus dimanfaatkan lahan tersebut," kata Syamsuar saat membuka Ekspos Program Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang digagas Konsorsium Yayasan Mitra Insani (YMI) bersama Konsorsium Elang dan Riau Woman Working Group (RWWG), Rabu (12/9/2018) di Hotel Grand Mempura Siak [...] Dilain pihak, Eko Putranto tim leader PMU UKCCU-ICCTF mengatakan, Ekspos Program Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut itu dilakukan sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut melalui kerja sama langsung dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

36. <http://m.detakriau.com/read-21317-2018-09-12-ekspos-program-kelola-hutan-lahan-gambut-bupati-siak-sebut-lahan-gambut-bisa-tingkatkan-ekonomi-masy.html#sthash.UruuJYOu.dpbs> (Detakriau, 12 September 2018; 19:56 WIB)

Ekspos Program Kelola Hutan Lahan Gambut, Bupati Siak Sebut Lahan Gambut Bisa Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

SIAK-(Detakriau.com) Sebanyak 47 orang ikuti Kegiatan Ekspos Program Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi Emisi di Indonesia melalui kegiatan lokal (TEGAK). Bertempat di hotel Grand Mempura tersebut dihadiri langsung oleh Konsorsium Yayasan Mitra Insani (YMI) bersama Konsorsium Elang dan Riau Woman Working Group (RWWG), dan dibuka langsung oleh Bupati Siak Drs H Syamsuar pada hari Rabu, (12/09/2018). Dalam sambutannya, Syamsuar mengatakan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan gambut akan bangkit jika lahan tersebut dijaga dimanfaatkan dengan baik. "Kita tak ingin daerah ini menjadi ancaman terus, tiap musim panas langsung ada kebakaran" ujar Syamsuar [...]

37. <http://m.fokusriau.com/berita-bupati-syamsuar-bicara-soal-sinergitas-program-tata-kelola-hutan-dan-lahan-gambut.html> (Fokus Riau, 13 September 2018; 13:24 WIB)

BUPATI SYAMSUAR BICARA SOAL SINERGITAS PROGRAM TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN GAMBUT

SIAK-Bupati Syamsuar membuka ekspose bersama program Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Mempura, Rabu kemarin itu bertujuan untuk mengurangi emisi di Indonesia melalui kegiatan lokal (Tegak). Acara diikuti 47 orang dan digagas Konsorsium Yayasan Mitra Insani (YMI) bersama Konsorsium Elang dan Riau Woman Working Group (RWWG) [...] Eko Putranto yang merupakan tim leader PMU UKCCU-ICCTF menyebut, program ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut melalui kerja sama langsung dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Kemudian, program ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan strategi penanggulangan kebakaran dan mempromosikan praktik-praktik terbaik di masyarakat.

38. <https://www.kapurnews.com/read-503-9434-2018-09-12-ekspose-bersama-program-tegak-syamsuar-ekonomi-di-kawasan-gambut-akan-bangkit.html> (Kapurnews.com, 12 September 2018; 16:58 WIB)

EKSPOSE BERSAMA PROGRAM TEGAK, SYAMSUAR: EKONOMI DI KAWASAN GAMBUT AKAN BANGKIT

KapurNews.com - Bupati Siak Syamsuar, membuka kegiatan Ekspos Bersama Program Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk mengurangi emisi di Indonesia melalui kegiatan lokal (TEGAK), Rabu 12 September 2018. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di daerah itu diikuti sebanyak 47 orang, dan digagas oleh Konsorsium Yayasan Mitra Insani (YMI) bersama Konsorsium Elang dan Riau Woman Working Group (RWWG) [...] Dilain pihak, Eko Putranto, tim leader PMU UKCCU-ICCTF mengatakan, program ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut melalui kerja sama langsung dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Kemudian, program ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan strategi penanggulangan kebakaran dan mempromosikan praktik-praktik terbaik di masyarakat.

39. <http://riautrust.com/m/read-156043-2018-09-13-bupati-siak-syamsuar-ekspose-bersama-program-tegak.html><http://riautrust.com/m/read-156043-2018-09-13-bupati-siak-syamsuar-ekspose-bersama-program-tegak.html> (Riaustrust.com, 13 September 2018, 07:54 WIB)

BUPATI SIAK SYAMSUAR EKSPOSE BERSAMA PROGRAM TEGAK

Bupati Siak Syamsuar, membuka kegiatan Ekspos Bersama Program Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk mengurangi emisi di Indonesia melalui kegiatan lokal (TEGAK), Rabu 12 September 2018. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di daerah itu diikuti sebanyak 47 orang, dan digagas oleh Konsorsium Yayasan Mitra Insani (YMI) bersama Konsorsium Elang dan Riau Woman Working Group (RWWG) [...] Dilain pihak, Eko Putranto, tim leader PMU UKCCU-ICCTF mengatakan, program ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut melalui kerja sama langsung dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Kemudian, program ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan strategi penanggulangan kebakaran dan mempromosikan praktik-praktik terbaik di masyarakat.

40. <https://riaubernas.com/news/detail/2754/bupati-siak-ekspose-bersama-program-tegak> (Riau Bernas, 12 September 2018)

BUPATI SIAK SYAMSUAR EKSPOSE BERSAMA PROGRAM TEGAK

Bupati Siak Syamsuar, membuka kegiatan Ekspos Bersama Program Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk mengurangi emisi di Indonesia melalui kegiatan lokal (TEGAK), Rabu 12 September 2018. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di daerah itu diikuti sebanyak 47 orang, dan digagas oleh Konsorsium Yayasan Mitra Insani (YMI) bersama Konsorsium Elang dan Riau Woman Working Group (RWWG) [...] Dilain pihak, Eko Putranto, tim leader PMU UKCCU-ICCTF mengatakan, program ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut melalui kerja sama langsung dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Kemudian, program ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan strategi penanggulangan kebakaran dan mempromosikan praktik-praktik terbaik di masyarakat.

41. <http://www.m.riau24.com/berita/baca/95244-bupati-syamsuar-hadiri-ekspos-bersama-program-tata-kelolo-hutan-gambut/> (Riau24.com, 12 September 2018; 17:19 WIB)

BUPATI SYAMSUAR HADIRI EKSPOSE BERSAMA PROGRAM TATA KELOLA HUTAN GAMBUT

Bupati Siak Syamsuar, Rabu (12/9/2018) , membuka kegiatan Ekspos Bersama Program Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk mengurangi emisi di Indonesia melalui kegiatan lokal (TEGAK). Kegiatan tersebut berlangsung di hotel grand Mempura yang diikuti sebanyak 47 orang. Kegiatan ini digagas oleh Konsorsium Yayasan Mitra Insani (YMI) bersama Konsorsium Elang dan Riau Woman Working Group (RWWG) [...] Disampaikan Myrna, kegiatan ini harus terus bersinergi dengan program-program yang ada di kabupaten dan desa. Selanjutnya bagaimana program ini dapat terintegrasi dengan program desa dan kabupaten sehingga saat program ini selesai, masih bisa berlanjut. Di lain pihak, Eko Putranto tim leader PMU UKCCU-ICCTF mengatakan program ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut melalui kerja sama langsung dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

42. <http://www.riauonline.co.id/riau/read/2018/09/12/yimi-ekspos-program-tegak-untuk-kurangi-emisi-di-indonesia> (Riauonline.co.id, 12 September 2018; 14:50 WIB)

YMI EKSPOS PROGRAM TEGAK UNTUK KURANGI EMISI DI INDONESIA

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Konsorsium Yayasan Mitra Insani (YMI) bersama Konsorsium Elang dan Riau Woman Working Group (RWWG) mengekspose Program Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk mengurangi emisi di Indonesia melalui kegiatan lokal (TEGAK). Program ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut melalui kerja sama langsung dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Kemudian, program ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan strategi penanggulangan kebakaran dan mempromosikan praktik-praktik terbaik di masyarakat. Program Tegak selaras dengan konsep program restorasi gambut yang diterapkan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dikenal dengan 3R, Rewetting, Revegetation dan Revitalization of Local Livelihood.

43. **TRIBUN PEKANBARU (CETAK), 12 September 2018**

44. **RIAU POS Halaman 16, 12 September 2018**

45. **KOMPAS, 17 September 2018, Halaman 1 dan 21, 17 September 2018**



MITIGATION | ADAPTATION | ENERGY | MARINE

ICCTF Sekretariat

Lippo Kuningan, lt. 15,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
Jakarta 12940, Indonesia
E sekretariat@icctf.or.id



www.icctf.or.id



[ICCTF_ID](#)



[icctfofficial](#)



[Indonesia Climate Change Trust Fund](#)